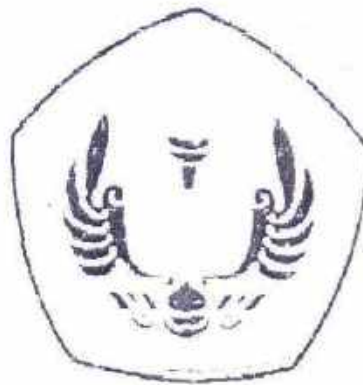


SUKARNO DAN KONSTRUKSI KEKUATAN BARU
(ANALISIS TEKSTUAL PIDATO POLITIK SUKARNO TENTANG
KONSTRUKSI "KEKUATAN BARU" DALAM TATANAN POLITIK
INTERNASIONAL)

OLEH
ARI SULISTYANTO
NPM: 17022008-21

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi
Program Studi Ilmu Komunikasi



PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PADJAJARAN
Bandung 2010

SUKARNO DAN KONSTRUKSI KEKUATAN BARU
(ANALISIS TEKSTUAL PIDATO POLITIK SUKARNO TENTANG
KONSTRUKSI “KEKUATAN BARU” DALAM TATANAN
POLITIK INTERNASIONAL)

OLEH

ARI SULISTYANTO
NPM: 17022008-21

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Ilmu
Komunikasi Program Pendidikan Magister Ilmu Komunikasi

Telah di setujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah

Bandung, 2010



Prof. Dr.H. Soleh Soemirat, MS
Ketua Tim Pembimbing




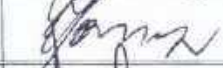
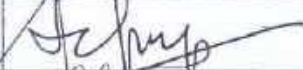
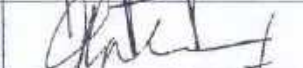

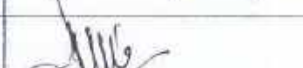
Drs. Dadang Sugiana, M.Si
Anggota Tim Pembimbing

REVISI
(LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN)
TESIS (S2)

Nama : Ari Sulistiyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 170220080021
Tanggal Ujian : 22 Mei 2010
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Ilmu Komunikasi

Judul UT : **SUKARNO DAN KONTRUKSI KEKUATAN BARU**

TELAH DIREVISI DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI/TIM PEMBIMBING

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr.H.Soleh Soemirat,M.S.	
2	Drs.Dadang Sugiana,M.Si.	
3	Dr.Hj.Betty RFS Soemirat,M.S.	
4	Dr.Agus Rahmat,M.Pd.	
5	Drs.H.Pawit M.Yusup,M.S.	
6	Dra.Hj.Ninis Agustini D.,M.Lib.	

Bandung,

Mengetahui



Prof.Dr.H.Soleh Soemirat,M.S.
Ketua Komisi Pembimbing



Drs.Dadang Sugiana,M.Si.
Anggota Komisi Pembimbing

Pernyataan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doctor) baik di Universitas Padjajaran maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Mei 2010

Yang membuat pernyataan



(Ari Sulistyanto)

NPM:17022008-

ABSTRACT

Ari Sulistyanto. 17022008-21. SUKARNO DAN KONSTRUKSI KEKUATAN BARU: ANALISIS TEKSTUAL PIDATO POLITIK SUKARNO TENTANG KONSTRUKSI "KEKUATAN BARU" DALAM TATANAN POLITIK INTERNASIONAL. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Soleh Soemirat, MS, dan Drs. Dadang Suganda, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam konstruksi kekuatan baru atau New Emerging Force (Nefo) oleh Sukarno yang di kemukakan secara tekstual dalam pidatonya.

Obyek dalam penelitian ini adalah teks pidato Sukarno tentang konstruksi kekuatan baru, yang di pidatokan saetiap tanggal 17 Agustus mulai dari tahun 1962 sampai 1965.

Metode yang digunakan analisis kualitatif dengan analisa bahasa dengan hermeneutika interpretatif Paul Ricouer. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Melalui "kekuatan baru-Nefo", Soekarno hendak membangunkan kesadaran bahwa merdeka adalah hak setiap bangsa, adalah hak setiap manusia. Tiap-tiap insan ciptaan Tuhan mempunyai hak yang sama di atas bumi, oleh karena itu pula memperoleh hak yang sama untuk memiliki dunia secara bersama, memiliki hak atas diri sendiri, memiliki hak azasi. Keadaan sekarang, wajah dunia yang masih di warnai dengan berbagai konflik internasional yang silih berganti dengan berbagai sebab dan kepentingan, begitu juga dengan ideology liberal dengan mekanisme pasar bebas secara tidak langsung melahirkan berbagai ketimpangan-ketimpangan ekonomi, maka ide Soekarno tentang *Pax humanica* –persatuan umat manusia adalah *social conscience of man*-budi nurani manusia yang memberi pijakan terhadap keluhuran hak manusia untuk hidup sederhana dengan yang lain tanpa penindasan dan penghisapan.

ABSTRACT

Ari Sulistyanto, 17022008-21, SUKARNO AND CONSTRUCTION OF POWER NEW ADDRESS textual analysis SUKARNO POLITICAL CONSTRUCTION OF "POWER OF THE NEW" INTERNATIONAL POLITICAL ORDER IN. Under the guidance of Prof. Dr. H. Soleh Soemirat, MS, and Drs. Dadang Suganda, M. Si

This study aims to determine the meaning contained in the construction of new power or the New Emerging Forces (Nefo) by Sukarno in textually pointed out in his speech.

Object in this research is the text of Sukarno's speech about the construction of new power, which in voiced each dated August 17 starting from 1962 until 1965.

The method used to analyze qualitative analysis of language by Paul Ricouer interpretaif hermeneutics. Data collection technique is to study the documentation and literature study.

The conclusion of this research is through "a new power-Nefo", Sukarno to awaken the awareness that freedom is the right of every nation, is the right of every human. Each of God's creation has the same right upon the earth, therefore also obtain the same right to have the world collectively, have the right to oneself, to have rights. Present circumstances, face the world which is still in color with various international conflicts that followed each with different causes and interests, as well as with the liberal ideology of free market mechanisms indirectly gave birth to a variety of inequality-economic imbalance, then the idea of Pax humanica Soekarno-unity humans are social Conscience of a man-cultivation of human conscience that gives a foothold to the nobleness of human rights to live equal with each other without oppression and exploitation.

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Dzat yang Maha Kuasa di seluruh semesta alam karena berkat rahmat dan karunia-Nya maka thesis yang berjudul "Sukarno dan Konstruksi Kekuatan Baru" (Analisis Tekstual Pidato Politik Soekarno Tentang Konstruksi kekuatan Baru" Dalam Tatanan Politik Internasional) ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian dalam rangka menyelesaikan studi di Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan masukan dan partisipasi berbagai pihak terutama dari tim komisi pembimbing.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. H. Soleh Soemirat, MS. yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan perhatian serta memberikan bimbingan, arahan dan kritikan kepada penulis sejak awai penyusunan. Mulai dari usulan penelitian sampai dengan Tesis demi kesempurnaan hasil penelitian ini dengan penuh kesabaran.
2. Anggota Komisi Pembimbing. Drs. Dadang Sugiana, M.Si yang berkenan memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis hingga tesis ini selesai dengan baik.

3. Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Dr. Agus Rahmad, M.Pd atas semangat dan dorongan yang selalu diberikan kepada kami selama menimba ilmu di bangku Pasca Sarjana ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA sebagai Rektor Universitas Padjajaran yang telah memberi kesempatan menyelesaikan perkuliahan di Universitas Padjajaran Bandung.
5. Para Penelaah pada Seminar Usulan penelitian Dan Tesis, Ibu Betty RFS Soemirat, MS, Bapak Drs. Pawit Yusuf, MS, Dr. Agus Rahmad, M.Pd, atas segala masukan, saran dan koreksi demi kesempurnaan hasil penelitian.
6. Ibu Lilies, Bapak Dody dan bapak Aat selaku staf Akademik dan Administrasi yang selalu setia dan sabar memberikan kemudahan serta pelayanan administrasi.
7. Kepada teman-teman angkatan IX Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran bandung, terima kasih atas segala bantuan , kekompakan dan kebersamaanya selama masa-masa studi.

Akhirnya penulis sangat menyadari keterbatasan dalam menyebutkan satu persatu semua pihak yang sduah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Sebagai bentuk terima kasih, penulis hanya bisa menyerahkan kepada Tuhan SWT, semoga kebaikan mereka mendapat amal yang berlipat ganda dariNya.

Bandung, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Identifikasi Masalah.....	7
1.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Kegunaan Teoritis	9
1.4.2. Kegunaan Praktis	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka	10
2.2. Kerangka Pemikiran	18
2.2.1. Konstruksi Realitas Dalam Paradigma Konstruktivisme.....	18
2.2.2. Komunikator Politik Dalam Konstruksi Realitas	24
2.2.3. Konstruksi Kekuatan Baru Dalam Tatanan Politik Internasional...	28
2.2.4. Pendekatan Bahasa Post Strukturalis	34
2.2.5. Hermeneutika Teks Paul Ricouer.....	40

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian	45
3.2. Subyek Penelitian.....	47
3.2. Metode Penelitian	48

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data	54
3.2.2 Jenis Data	54
3.2.3. Sumber Data	55
3.2.4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	55
3.3. Jadwal Penelitian	57

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Analisa Struktural	58
4.2. Latar Kehidupan Sukarno.....	61
4.2.1. Masa Kanak-kanak	61
4.2.2. Masa Muda	65
4.2.3. Masa Sebagai Pemimpin Nasional.....	85
4.2.4. Nawaksara Dan Akhir Kekuasaan Soekarno.....	92
4.3. Pandangan Sukarno Tentang Indonesia	96
4.3.1. Persatuan Nasional.....	96
4.3.2. Revolusi.....	99
4.3.3. Berdikari.....	101
4.4. Pandangan Sukarno Tentang Konstelasi Internasional.....	105
4.4.1. Neo- Kolonialisme.....	105
4.5. Penjelasan Atau Dekontekstualisasi Konstruksi Nefo.....	108
4.5.1. New Emerging Forces.....	108
4.5.2. Pax Humanica.....	112
4.6. Tahapan Pemaknaan Referensial (Kontekstual-Post structural).....	115
4.7. Pandangan Sukarno Tentang Indonesia	116
4.7.1. Persatuan Nasional.....	116
4.7.2. Revolusi.....	124
4.7.3. Berdikari.....	130
4.8. Pandangan Sukarno Tentang Kontstelasi Politik Internasional.....	138
4.8.1. Neo- Kolonialisme.....	138
4.9. Kontekstualisasi, Relevansi Konstruksi Kekuatan Baru.....	145

4.9.1. New Emerging Forces.....	145
4.9.2. Pax Humanica.....	153

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	158
5.2. Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

4.9.1. New Emerging Forces.....	145
4.9.2. Pax Humanica.....	153

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	158
5.2. Saran.....	163

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat tradisional, seperti yang dikatakan Weber kepemimpinan diperoleh melalui ketokohan karena pemimpin itu adalah orang yang kuat, besar, sakti dan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang lain. Masyarakat atau pengikut menganggap bahwa mereka adalah titisan Tuhan yang juga berhak untuk mewariskan tahta kepemimpinan kepada keturunannya. Dalam konteks ini dalam sejarah dunia di kenal tokoh-tokoh penakluk dunia, seperti Alexander Agung, Julius Cesar, ataupun Jenghis Khan. Di samping di kenal dengan kekuatan fisik yang lebih di banding dengan yang lain, juga dikenal ahli dalam strategi peperangan. Kombinasi kekuatan yang dimiliki menjadikan sebagai pemimpin legendaris yang menghiasi sejarah dunia.

Dalam konteks modern, kepemimpinan timbul bukan karena ia orang besar dan kuat, ahli perang, melainkan orang yang mampu memobilisasi, mempengaruhi massa yang kemudian menetapkan berbagai tujuan dalam bentuk reformasi, atau bahkan mengadakan perubahan revolusioner. Keadaan demikian menuntut bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan keahlian, yaitu komunikasi. Melalui komunikasi ini, bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan berbagai obyek kemudian mengorganisir, memodifikasi menjadi makna yang di sampaikan dalam pesan-pesan persuasif

Nama-nama seperti, Sukarno, Hitler, Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Lenin maupun Trotsky adalah contoh pemimpin politik dengan keterampilan komunikasi (retorika) mampu menggugah kesadaran massa untuk

ikut dalam mendukung ide ataupun gagasan sang pemimpin. Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi, seperti di jelaskan Dann Nimmo (1999:42), adalah kepemimpinan timbul dari komunikasi. Melalui Kepemimpinan timbul upaya untuk melakukan penyusunan bersama, pertukaran modifikasi, dan kepercayaan, nilai serta pengharapan bersama atas suatu realitas atau obyek melalui komunikasi.

Misalnya, retorika Lenin mampu membius kesadaran ribuan buruh untuk bergerak mengepung kota St. Petersburg dan mengakhiri kekuasaan Tsar. Atau, presiden Amerika Serikat, Roosevelt, kendati kaki kirinya pincang mampu membangkitkan semangat hidup rakyat Amerika keluar dari depresi sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Presiden John F. Kennedy pernah mengucapkan sebuah pernyataan, “Jangan pernah tanyakan apa yang akan berikan bangsa dan negara padamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan pada bangsa dan negaramu”. Pernyataan itu mampu menyihir rasa patriotisme ribuan pemuda Amerika Serikat untuk terlibat mengabdikan dirinya terjun dalam perang Vietnam.

Begitu pula dengan presiden Amerika Sarikat sekarang, Barack Obama, salah satu artikel di Jakarta Post tertulis judul besar, *Obama's oratory: Recalling the sway of Sukarno*. Artikel yang ditulis Al Makin seorang *visitor scholarship* pada Mc Gill University, Canada menyatakan bahwa pidato Obama dalam pelantikan sebagai Presiden Amerika Serikat mengingatkan kembali akan kehebatan retorika Sukano. Seperti Sukarno yang mengidentifikasikan sebagai “penyambung lidah rakyat”, Obama menyatakan bukan sekedar suara Amerika,

melainkan juga perwakilan dari suara dunia. *"We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth."*

Pada awalnya, para pemimpin ini adalah karena posisinya yang dimiliki dalam struktur sosial atau organisasi. Legitimasi yang di dapat karena aturan-aturan yang telah diterapkan dalam struktur sosial. Di luar dari struktur sosial itu, pemimpin ini tidak mempunyai wewenang maupun otoritas yang mengikat, seperti kebanyakan yang merupakan orang biasa, oleh Nimmo (1999:46) di sebut sebagai pemimpin organisasi. Sedangkan Weber (dalam Haga Maran:2000) menyebut sebagai otoritas rasional, melalui pengaturan sistem politik memperoleh legitimasi dari seperangkat peraturan dan prosedur yang telah disepakati bersama. Misalnya, presiden yang terpilih melalui hasil pemilu. Presiden boleh berganti-ganti, tetapi, pemilu sebagai lembaga adalah ketentuan normatif yang tetap.

Berbeda dengan pemimpin kharismatik atau simbolik, kekuasaan yang di dapatkan bukan karena tradisi, melainkan karena daya tarik luar biasa dari seorang individu- suatu kualitas personal yang luar biasa hebat, yang secara populer dihubungkan dengan individu –individu tertentu. Para pengikut mereka mengerti pemimpin yang karismatik sebagai pribadi-pribadi yang ditakdirkan memiliki visi yang luar biasa. Pemimpin simbolik, menurut Klapp (dalam Nimmo,1999) adalah kepemimpinan simbolik bekerja pada massa dan khalayak sebelum, tanpa , dan tidak dapat dihalangi oleh organisasi.

Dengan kemampuan mengelola pesan terhadap suatu masalah atau isyu, pemimpin simbolik bertindak sebagai aktor dalam setting dramatik untuk menyederhanakan suatu fenomena yang semula rumit, kompleks dan mengawatirkan menjadi suatu yang mudah dipahami, memberi pemecahan terhadap suatu masalah dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam keadaan tertentu, apabila fenomena yang berkembang bertentangan dengan cita-cita idealismenya, pemimpin simbolik melalui pengaruhnya membuka kepentingan-kepentingan tersembunyi dibalik suatu fenomena tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh Sukarno, sebagai pemimpin dalam mengkonstruksi gagasan, pesan atau simbol, membongkar struktur diskursif¹ yang dikembangkan oleh dunia barat. Misalnya, dalam pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh dunia barat, kenyataannya sarat dengan praktek-praktek hegemoni terhadap negara berkembang. Dalam kaitan ini, Sukarno pernah melontarkan slogan yang sangat terkenal, yaitu “*go to hell with your aid*”, sebagai bentuk penolakan terhadap bantuan luar negeri yang disertai dengan syarat-syarat tertentu.

Begitu pula dalam tatanan politik internasional, Bung Karno mengecam apa yang dituduhkan oleh Menteri luar negeri Amerika Serikat J.F. Dulles yang menyatakan “*Neutrality is immoral* “. Sebagai tanggapan terhadap tuduhan tersebut, dikatakannya, “bahwa pembagian dunia di dalam dua blok yang bertentangan tidak nanti akan membuka jalan buat persatuan umat manusia”

¹ Eriyanto, *Analisa Wacana*, LKIS, Yogyakarta, 2008.h.75

Pecahnya dua blok tersebut bermula, ketika berakhirnya perang dunia ke-II, praktis disusul dengan pembagian Eropa menjadi dua bagian. Bagian barat dibawah hegemoni Amerika dan sekutunya, bagian timur dibawah Uni Soviet. Sebagai akibat dari bipolarisasi dua kekuatan, masing-masing blok melakukan “politik pembendungan”. Untuk mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet di Eropa Barat, Amerika melancarkan program “*Marshal Plan*”. Melalui politik pembendungan itu Amerika Serikat menjalin persekutuan dengan sejumlah negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam membendung ekspansi komunis, di Eropa membentuk pakta pertahanan, yaitu NATO, di kawasan Asia Pasifik dengan SEATO.

Begitu pula dengan Uni Soviet, dalam menangkal pengaruh blok barat membentuk aliansi pertahanan yang dikenal dengan Pakta Warsawa, kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada negara di kawasan Asia, seperti Korea Utara dan Vietnam.

Bentuk konfrontasi dari dua kekuatan dunia sangat mewarnai percaturan politik internasional pasca perang II. Namun ditengah situasi konfrontasi dua kekuatan itu, tumbuh gagasan baru untuk merubah sistem bipolarisasi tersebut yang dimanifestasikan dalam suatu kekuatan baru. Upaya untuk membangun kekuatan baru, Sukarno kemudian mengkonstruksi suatu gagasan yang dikenal dengan New Emerging Forces (NEFO) –kekuatan baru dunia.

Pada kenyataannya dunia memang terbagi dalam blok-blok kekuatan. Dalam sudut pandang ekonomi, China mengemukakan teori “tiga kekuatan”. Dalam teori tersebut di sebutkan bahwa dunia pertama mencerminkan hegemoni

Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan yang kedua terdiri dari negara-negara China, Eropa Barat, Jepang, Kanada dan Australia, dan kelompok ketiga disebut dengan negara yang sedang berkembang.

Dalam hal ini, Sukarno menolak teori tersebut dan mengemukakan “teori dua kekuatan” Seperti yang dikatakan dalam pidato kenegaraan tahun 1965: “Indonesia tidak menganut teori tiga kekuatan, karena republik Indonesia membagi dunia hanya dua kutub, yaitu kubu *NEFO*, *NEFO* yang revolusioner dan kubu *OLDEFO* yang reaksioner.

Nefo, *New Emerging Forcers* adalah kekuatan raksasa baru yang tumbuh sebagai suatu proses dialektika sejarah yang tak dapat dielakan, Sukarno menyatakan *NEFO* sebagai kekuatan raksasa yang terdiri dari bangsa –bangsa dan golongan-golongan progresif yang hendak membangun satu dunia baru. Dalam pengertian ini, sejarah bangsa bulan lagi milik dari kekuatan bangsa tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk mendominasi bangsa lain, melainkan berkembang dalam kesetaraan untuk saling menghargai satu sama lain.

Sukarno melihat, di satu sisi ada kekuatan lama yang masih bercokol dan ingin tetap mendominasi dunia dengan watak imperialis–kapitlistik dalam memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara yang baru dengan jalan mengadakan tekanan, campur tangan dan intervensi. Sedangkan kekuatan baru adalah negara-negara baru yang ingin mempertahankan kedaulatan dan ingin memperjuangkan keadilan sosial serta menentang penghisapan manusia oleh manusia atau bangsa oleh bangsa lainnya dalam bentuk apapun.

Kekuatan baru adalah negara-negara nasional baru yang lahir karena proses dialektika dari kontradiksi negara-negara kapitalis. Perdamaian dunia tidak terwujud apabila masih bercokol kekuatan-kekuatan lama yang berwatak neo-kolonialis. Dibutuhkan kekuatan baru dalam menghancurkan kekuatan lama. Dalam menggalang kekuatan baru tersebut, Sukarno merencanakan adanya Konferensi NEFO, dimaksudkan untuk mengadakan “*samenbundelling van alle internatyonale revolutionaire krachten*”, atau istilah lainnya adalah “Persatuan Internasional”, gabungan dari pada negara-negara dengan berbagai paham dalam skala dunia, untuk melumpuhkan kekuatan Neo-kolonialisme, kemudian di atasnya dibangun suatu tatanan baru yaitu dunia tanpa imperialisme dan tanpa eksploitasi.

Maka dalam membangun kekuatan NEFO itu, Sukarno mengadakan hubungan internasional secara aktif untuk menggalang kekuatan negara-negara baru, terutama Asia –Afrika dan Amerika Latin. Dalam upaya penggalangan itu, tercatat Sukarno mengandalkam kunjungan luar negeri sebanyak 14 kali, dengan tujuan utama untuk menarik sekutu dan simpatisan baru bagi konsepsi *The New Emerging Force*. Perjalanan ke luar negeri itulah yang dikenal dengan “Safari Berdikari”

Di samping itu dibangun sebuah komunike bersama dengan ditandai dengan berdirinya “poros Jakarta-Peking”, yang kemudian diteruskan dengan “poros Jakarta –Peking-Hanoi-Pyongyang-Pnompenh, yang merupakan poros anti imperiais. Terbentuknya poros antar negara tersebut, akan memperkuat kedudukan NEFO, yang direncanakan pada tahun 1966 akan mengadakan

Konfeerensi di kenal dengan *Conference Emerging Forces (Conefo)*. Agenda yang terpenting dan monumental yang akan diputuskan dalam Conefo itu adalah “negara –negara yang tergabung dalam NEFO tidak akan membeli produk-produk negara imperilais-kapitalis. Kekuatan NEFO itu pula akan menempatkan Indonesia pada “ Pilar kekuatan ke empat dunia”, dimulai dari Amerika Serikat sebagai pilar pertama, Uni Soviet sebagai pilar kedua, RRT sebagai pilar ke tiga dan Indonesia sebagai pilar ke empat.

Apa yang dilakukan Sukarno adalah membongkar wacana-wacana yang dikembangkan dunia barat yang hegemonik dan cenderung mengekalkan dominasi kekuasaan terhadap negara berkembang. Realitas empirik yang berkembang dalam tatanan internasional adalah suatu tatanan yang tidak seimbang dimana dominasi yang kuat selalu mengendalikan yang kecil dan lemah.

Sukarno, sebagai pemimpin nasional melalui pidato terlibat dalam hubungan sosial bersama dengan massa rakyat untuk mendefinisikan realitas sosial tersebut untuk dimaknai bersama, sehingga terbentuk suatu citra maupun pengertian terhadap realitas tersebut. Strategi “kekuatan baru dunia” adalah simbolisme kondensasi (Nimmo:1999:54) yang dimaknai tidak sekedar ‘berdiri di kaki sendiri” melainkan lebih luas menyangkut eksistensi hidup bangsa dalam percaturan dunia internasional.

Meneliti pidato-pidato Bung Karno dalam mengkonstruksi simbol dalam memberi keyakinan tentang suatu cita-cita bangsa adalah suatu hal yang menarik, apalagi penciptaan itu sebagai perlawanan arus dari suatu *mainstream* kebudayaan yang hendak dimapankan oleh kekuatan yang hegemonik. Tujuan mengkonstruksi

simbol-simbol adalah merangsang orang untuk memberi tanggapan dengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu, dan mengubah pikiran, perasaan dan pengharapan mereka, lambang politik signifikan memudahkan orang menanggapi. Penciptaan lambang atau simbol dalam komunikasi politik adalah suatu hal yang penting. Sebagaimana lambang signifikan dari pembicaraan politik, kata-kata, gambar dan tindakan komunikator politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat mengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itu dengan cara tertentu yang sudah diperkirakan.

Analisis mengenai komunikator politik dalam bagaimana proses penciptaan lambang ataupun simbol masih jarang dilakukan. Proses di sini diartikan sebagai rangkaian pemaknaan terhadap realitas yang berkembang dan faktor kepribadian komunikator. Oleh karena studi interpretatif tentang komunikator politik dalam penciptaan lambang atau simbol terhadap teks pidato Bung Karno tentang strategi berdikari sebagai langkah pencerahan bagi bangsa Indonesia yang saat ini di landa krisis multidimensional

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil fokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Sukarno berpengaruh dalam mengungkapkan gagasan-gagasan tentang konstruksi kekuatan dunia baru?
2. Bagaimana pandangan Sukarno tentang Indonesia baik dalam konteks historis secara tekstual dalam pidato-pidatonya.

3. Bagaimana pandangan Sukarno dalam membongkar dominasi Negara maju maju secara tekstual yang dikemukakan dalam pidatonya.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuannya untuk memperoleh gambaran dan penjelasan analitis dari teks pidato-pidato Bung Karno pada tahun 1959-1966 yang meliputi :

1. Pengaruh kehidupan Bung Karno pada masa kanak, masa muda, masa sebagai pemimpin nasional mempunyai keterkaitan dalam mengkreasikan konstruksi kekuatan dunia baru.
2. Gambaran secara deskriptif Bung Karno tentang konstruksi kekuatan dunia baru secara tekstual yang dikemukakan dalam pidato-pidatonya.
3. Pandangan Bung Karno tentang dunia barat (negara maju) secara tekstual yang dikemukakan dalam pidatonya.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu Komunikasi, yaitu pesan-pesan politik sebagai bagian dari pembentukan komunikasi politik, serta sebagai bukti bahwa suatu penelitian tentang pesan-pesan yang terdapat dalam teks memiliki hubungan dalam hal teori dan metodologi sebagai fenomena komunikasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana pencerahan bagi para pengambil kebijakan negara, hendaknya dalam merumuskan kebijakan ekonomi, politik maupun sosial berorientasi pada kekuatan sendiri, tanpa harus bergantung pada kekuatan luar.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap komunikator politik, khususnya Bung Karno terhadap tulisan sampai saat ini belum ada, walaupun ada jumlahnya sangat minim. Untuk itu dalam penelitian hendak memberi perhatian terhadap peran komunikator politik dalam mengkonstruksi simbol ataupun lambang dalam mempengaruhi masa rakyat agar dapat mengikuti garis kebijakannya.

Dalam mengkonstruksi simbol, seorang komunikator politik, seperti yang dikatakan oleh Marx bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada ide atau gagasan individu dalam menciptakan dunia sosialnya. Demikian juga dengan Bung Karno, lingkungan masa kecil dan persentuhannya dengan dunia pergerakan mencapai Indonesia merdeka sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses penciptaan simbol ataupun lambang politik. Demikian juga pula konstelasi internasional maupun nasional masa kepemimpinannya mempunyai andil bagaimana suatu simbol atau lambang diciptakan.

F. Kerangka Pemikiran dan Teori

Komunikasi politik sering dipahami sebagai jembatan antara komunikasi dengan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya antara komunikasi dan politik menjadi kajian tersendiri. Kalangan ilmuwan melihat bahwa komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki fungsi yang sangat istimewa karena

meletakkan basis untuk menganalisa permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik.²

Secara formal obyek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik, di samping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik, maka obyek formal komunikasi politik adalah proses penciptaan pesan sehingga tercapai kesamaan makna tentang suatu fakta atau peristiwa politik.

Sebagai komunikator politik, Bung Karno berada pada posisi yang strategis untuk menciptakan pesan ataupun simbol dalam setting politik.

Menurut Dann Nimmo:

Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika di rangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi³.

Mengkaji komunikasi politik yang dilakukan pemimpin politik, seperti Bung Karno adalah suatu hal yang menarik. Dikenal sebagai proklamator yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan dikenal sebagai orator ulung. Bung Karno seperti yang dikatakan Dann Nimmo tentang teori orang besar adalah orang yang memiliki keinginan, sifat dan kemampuan istimewa muncul sewaktu-waktu dalam sejarah dan ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang besar.

² Deddy Mulyana dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosda Karya, Bandung 2008, h.29

³ Dann Nimmo, *Op. Cit.* h. 72

Misalnya, pada saat gagasan tentang berdikari dilontarkan, negara maju sedang mendesak begitu masif suatu ideologi “pembangunan” yang harus dicontoh dan diterapkan terhadap negara berkembang. Bung Karno melakukan pembongkaran terhadap “proyek modernisasi” yang dikembangkan oleh negara barat. Upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, maka strategi yang paling jitu dilakukan negara berkembang adalah dengan menerapkan strategi yang diterapkan oleh negara maju.

Untuk mempercepat laju “modernisasi” negara maju memberi bantuan atau pinjaman negara berkembang. Pada kenyataanya hubungan antara negara maju dengan negara berkembang adalah sebuah ketergantungan. Negara maju yang dipahami sebagai negara *center* akan selalu melakukan dominasi maupun hegemoni untuk mendapatkan keuntungan ekonomis maupun politis terhadap negara berkembang, yang di sebut sebagai negara *phery-phery*.

Dalam perspektif ini, Bung Karno membongkar agenda tersembunyi yang menyebut ideologi pembangunan yang dikembangkan ala barat sebagai *neo-kolonialisme* (penjajahan baru). Hal tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa akibat dari perang dunia II adalah lahirnya negara-negara nasional baru sebagai hasil kontradiksi dari kapitalisme. Di pihak lain, kapitalisme melakukan reformasi diri dalam bentuk-bentuk perbaikan sistem produksi, efisiensi cara kerja, perbaikan distribusi barang dan reorganisasi tenaga kerja serta propaganda yang lebih menarik. Reformasi kapitalisme ini menghasilkan imperium baru yang berbentuk “neo-kolonialisme”.

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki korporasi secepat yang bergadangan tangan dengan lembaga keuangan dunia, seperti World Bank, maupun IMF pada ujungnya yang menyebabkan hegemoni, monopoli, bahkan kalau ada negara yang tidak mematuhi rejim kebijakan dari “*neo-kolonialisme*” maka tidak segan-segan, rejim itu akan mengintervensi kedaulatan negara tersebut secara tidak riil. Dengan cara, misalnya, melemahkan mata uang negara bersangkutan, atau mengganti penguasa lama dengan penguasa baru yang lebih mudah dikendalikan.

Hubungan antara pemimpin dengan pengikut di tandai dengan adanya komunikasi. Semua kepemimpinan – termasuk kepemimpinan dalam proses opini- adalah transaksi timbal balik dan sirkular di antara pemimpin dan pengikut⁴. Pemimpin dalam melontarkan gagasan, atau merumuskan suatu tujuan merupakan upaya untuk memperluas maupun memperkuat pengaruhnya di antara pengikut.

Gagasan atau rumusan tujuan adalah produksi pesan, dalam kaca mata ilmu sosial masih berada dalam wilayah prateoritis atau belum terstruktur secara simbolis.⁵ Oleh karena cara bertindak dan berperilakunya belum terstruktur, jadi tak bisa diterima begitu saja sebagai benar apa adanya sebagaimana diinginkan oleh positivisme. Maka dunia kehidupan ini tak dapat diketahui melalui observasi seperti dalam metode -metode ilmu alam, melainkan cara khas tertentu. Yaitu pemahaman.

⁴ *Ibid*, h.41

⁵ Elvinaro Ardianto & Bambang Q, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007, h.130

“Apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial itu terutama bukan kausalitas yang niscaya, melainkan makna. Oleh karena itu, tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya adalah memahami makna. Dalam hal ini seorang ilmuwan sosial tidak lebih tahu daripada para pelaku dalam dunia kehidupan itu. Oleh karena itu dengan cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia-kehidupan itu. Untuk menjelaskannya, ia harus memahami. Untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses menghasilkan dunia-kehidupan itu. Akhirnya partisipasi itu mengandalkan bahwa ia sudah termasuk ke dalam dunia kehidupan itu⁶.

Hermeneutika menegaskan bahwa fenomena khas manusia adalah bahasa, dan karena itu memahami manusia dapat dimulai dari bahasa. Hal ini karena obyektivitas dari kesadaran manusia akan kenyataan. Bahasa mencerminkan realitas yang dialami si penutur, sekaligus apa yang dipikirkan oleh penutur itu.

Dalam komunikasi politik terdapat adagium bahwa “politik adalah pembicaraan “. Pembicaraan tersebut menggunakan lambang-lambang tertentu demi tujuan dan kepentingan politik, baik lambang verbal ataupun lambang nonverbal.

Pidato Bung Karno adalah bahasa politik yang sarat dengan tujuan dan kepentingan yang di sampaikan baik secara verbal maupun non verbal. Untuk itu perlu pemahaman secara terstruktur terhadap isi teks pidato Bung Karno sehingga di dapatkan pemahaman secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif.

G. Metodologi

a. Metode Penelitian

⁶ *Ibid*, h.34

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berparadigma holistik induktif, menggunakan strategi interpretatif dan teknik hermeneutika.

b. Subyek Penelitian

Bahan yang dikaji adalah dokumen yang berupa teks pidato Bung Karno mulai dari tahun 1959 sampai 1966, khususnya pidato kenegaraan yang di sampaikan pada saat perayaan proklamasi 17 Agustus .

c. Teknik Analisa Data

Data dianalisis dengan pendekatan interpretatif yang diadopsi dari tiga langkah yang dilakukan oleh Ricoeur yaitu yang berlangsung dari penghayatan atas simbol-simbol ke gagasan tentang “berpikir” dari simbol-simbol. Langkah pertama, langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol, Langkah kedua, adalah pemberian makna oleh simbol serta ‘penggalian’ yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya.

Hasil akhir penafsiran disajikan dalam bentuk konstruk-konstruk bahan bahasan. Pembahasan secara formal terhadap hasil penafsiran itu sendiri oleh karenanya lebih merupakan proses penjabaran pemahan hasil penafsiran terhadap konstruk-konstruk tipe pesan-pesan dari komunikasi politik.

Analisis untuk menjawab penyebab dari realitas tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Marx, bahwa sumber daya untuk kebutuhan hidup yang tersedia di dunia ini sangat terbatas, karena keterbatasan-keterbatasan itulah tumbuh penguasaan bagi yang kuat dengan jalan menjajah dan menghisap terhadap yang lemah.

Analisis untuk menjawab penyebab dari realitas tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Marx, bahwa sumber daya untuk kebutuhan hidup yang tersedia di dunia ini sangat terbatas, karena keterbatasan-keterbatasan itulah tumbuh penguasaan bagi yang kuat dengan jalan menjajah dan menghisap terhadap yang lemah.

Oleh Foucault, wacana tentang “pembangunan”, *development*, ataupun *modernisme* adalah struktur diskursif yang sengaja dibangun oleh negara –negara maju untuk terus melanjutkan dominasi maupun hegemoni mereka terhadap negara berkembang. Melalui struktur diskursif ini bagaimana kebudayaan berpikir di arahkan, dibentuk oleh suatu wacana, bahwa pembangunan harus dilakukan oleh negara berkembang untuk mengatasi berbagai keterbelakangan maupun kemiskinan .

tanpa Sebenarnya, pertarungan dua kekuatan itu kalau disederhanakan merupakan bentuk pertarungan dua pemikiran teoritis antara kubu Liberal dengan kubu Marxis

Bagi Bung Karno Pangkalan-pangkalan militer didirikan di pesisir Samudera Hindia sampai pedalaman di Jepang.

Istilah “pembangunan” atau *developments* yang diwacanakan oleh negara maju begitu menonjol setelah berakhirnya perang dunia II. Berakhirnya kolonialisasi, membuka peluang bagi negara berkembang yang baru merdeka untuk membenahi nasib dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan menjadi kata kunci untuk segera keluar dari ketertinggalannya untuk mengejar kemakmuran.

Tetapi dalam melaksanakan pembangunan, bagi negara berkembang merupakan suatu dilema. Di satu sisi, mengenai pilihan-pilihan strategi seperti apa yang akan diambil. Di sisi lain adalah keterbatasan akan modal, pengetahuan, teknologi maupun sumber daya manusia.

Untuk itu ditempuhlah kebijakan-kebijakan pragmatis yang menjadi pegangan negara berkembang untuk melakukan penerapan yang sama persis terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh negara maju. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk sesegera mungkin keluar dari bayang –bayang pahit kemiskinan akibat proses penjajahan yang begitu panjang.

Sebagai realisasi dari “proses peniruan”, maka konsep Rostow menjadi trend untuk diterapkan dalam model pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konsepnya, Rostow mengemukakan tahapan-tahapan pertumbuhan yang dilalui oleh negara-negara modern. Tahapan-tahapan tersebut adalah, masyarakat tradisional, prakondisi untuk tinggal landas, tinggal landas (*take off*), masa menjelang kedewasaan, dan abad konsumsi massa yang tinggi.

Konsep Rostow ini pada masa Orde Baru begitu trend, bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu selalu menyebut tentang tahapan tinggal landas yang segera di lalui oleh bangsa Indonesia. Tinggal landas, seperti yang dikatakan Rostow adalah suatu interval dimana bagian yang lama dari sistem ekonomi dan hambatan terhadap pertumbuhan yang mantap akhirnya dapat di atasi, dan pertumbuhan suatu kondisi yang normal bagi seluruh masyarakat. Dalam tahap tinggal landas ini jelas terlihat bahwa masalah akumulasi modal yang dimungkinkan dengan peningkatan tabungan dan investasi adalah penting.

Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan industrialisasi secara besar-besaran sebagai instrumen utama, sehingga dimana-mana digalakan pembangunan dalam skala besar, waduk-waduk hidroelektrik, paberik baja, paberik barang lainnya. Keterbatasan modal untuk membiayai proyek-proyek besar tersebut bukan masalah, karena negara-negara kaya siap untuk memberi bantuan atau pinjaman untuk menjaga kestabilan pertumbuhan yang mantap. Upaya itu pun terlihat, pada era-80-an, Indonesia tampil sebagai “macan

Asia” dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang memungkinkan adanya tabungan dan investasi yang tinggi

Di samping menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita, teori pembangunan ini juga mempunyai asumsi, bahwa kalau sudah terjadi peningkatan pada suatu sektor, selanjutnya akan terjadi apa yang disebut sebagai efek menetes ke bawah, atau *trickle down effect*.

Menurut Daniel Lerner menyebut “pembangunan “ sebagai suatu ideologi internasional bermula dari suatu komunikasi: yakni pidato Presiden Truman kepada Kongres AS. Dalam pidatonya, Truman, menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan melaksanakan suatu program baru yang tangguh berupa bantuan teknik dan keuangan bagi negara –negara miskin. Di kemudian hari, dunia mengenal apa yang disebut sebagai Marshal Plan yang merupakan program bantuan AS untuk kembali merevitalisasi Eropa yang hancur sebagai akibat perang dunia II. Kebijakan tersebut kemudian berlanjut yang diikuti oleh negara maju lainnya untuk membantu mengentaskan kemiskinan negara berkembang.

Kebijakan yang ditempuh negara maju terhadap negara berkembang bukan tanpa kritik yang dipelopori oleh para intelektual Amerika Latin, seperti Andre Gunder Frank, Furtado, Cardoso dan lain-lain mengedepankan apa yang dikenal dengan teori dependensi. Secara umum yang dimaksud dengan dependensia adalah keadaan dimana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang , seperti keputusan

mengenai harga komoditas, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh institusi di luar negara bersangkutan.

Dalam perspektif lain, Sukarno, Presiden pertama RI melakukan pembongkaran terhadap selumbang-selumbang ideologis atas nama “pembangunan”. Bung Karno menyebut model pembangunan yang dikembangkan ala barat sebagai *neo-kolonialisme* (penjajahan baru).

Bung Karno sebagai seorang komunikator politik menggariskan suatu kebijaksanaan yang mengandalkan pada kekuatan sendiri, yang ia namakan sebagai strategi “berdikari”. Bahkan, ketika ada tawaran pinjaman atau bantuan dari negara lain, tetapi disertai dengan persyaratan-persyaratan yang memberatkan, Bung Karno dengan lantang meneriakkan, “*go to hell with your aid*”.

Studi ini akan menggunakan paradigma interpretatif (fenomenologis), khususnya pendekatan hermeneutika terhadap teks-teks pidato Presiden Sukarno pada tahun 1959-1966. Sebagai seorang komunikator politik bagaimana pengelolaan pesan dilakukan dalam membongkar suatu paradigma, dan kemudian menawarkan alternatif paradigma baru.

“BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini peneliti menelaah tentang konstruksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin bangsa, yaitu Sukarno dalam merumuskan suatu gagasan mengenai kekuatan baru atau *New Emerging Forces*(*NEFO*) melalui teks pidato Sukarno yang berkaitan dengan ”kekuatan baru atau *NEFO*”. Gagasan ini mulai di ungkapkan pada pidato kenegaraan mulai tahun 1962 sampai 1965. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang utuh tentang konstruksi gagasan tersebut serta kontekstualisasinya dengan perkembangan zaman.

Penelitian yang membahas mengenai konstruksi gagasan Sukarno melalui mengenai kekuatan baru atau *New Emerging Forces*(*NEFO*) melalui teks pidato sampai saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu dalam penelitian ini hendak memberi perhatian terhadap peran komunikator politik dalam mengkonstruksi simbol ataupun lambang. Dengan menggunakan metode kualitatif dan penggunaan analisis hermeneutika (post structural), di dapatkan suatu hasil deskriptif tentang pemaknaan sebuah konstruksi, juga secara deskriptif dijelaskan pengaruh kondisi sosio cultural terhadap pembentukan konstruksi.

Analisis terhadap hasil penelitian sejenis, dalam arti memiliki substansi yang sama baik dari segi tema, judul dan metode penelitian. Hal ini di maksudkan untuk bisa menambah serta perbedaan terhadap penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

(1) Tesis Ibnu Anshori (1994) pada Faculty of Graduate and Research Mc Gill, University, Montreal, Canada, dengan judul ‘ *Mustafa Kemal And Sukarno: A Comparison of Views Regarding Relations Between State And Religion*’ Karya ini merupakan studi perbandingan tentang proses sekularisasi di Turki dan Indonesia dengan mengacu pada pikiran dan kebijakan Mustafa Kemal dan Sukarno. Kesimpulannya, penelitian yang menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif historis menjelaskan bahwa dalam pendekatan rasional mereka untuk agama dan perhatian untuk memodernisasi masyarakat mereka kedua pemimpin tersebut dipandu oleh paradigma sekuler tentang hubungan antara negara dan agama yang masing-masing dirumuskan. Penghapusan sistem kesultanan-khalifah, menandai akhir Islam sebagai agama negara dan penggantian dengan system demokrasi tampak dari setiap kebijakan yang di rumuskan. “Kebijakan-dominasi sekularisasi” Mustafa Kemal di lihat dalam penghapusan pendidikan agama, melarang perintah mistical, dan pelarangan penggunaan ritual Islamic setiap kegiatan di Turki, membuat Turki negara sekuler sepenuhnya. Di Indonesia, sekularisasi dimaksudkan tidak hanya untuk mengejar laju modernisasi tetapi juga telah memiliki hubungan khusus untuk memastikan dukungan minoritas agama tentang sistem politikl. Kebijakan Sukarno untuk memapankan sebuah negara kuasi-sekuler Pancasila dipandu oleh kepedulian terhadap kesatuan politik. Namun, tidak seperti Mustafa Kemal, Sukarno menghindari strategi oposisi terbuka terhadap agama, agar tidak menuai risiko politik yang tidak di inginkan. Meskipun partai-partai Islam Indonesia sering di warnai oleh sinkretisme Sukarno, sebagaimana yang termaktub dalam manifesto NASAKOM nya. Tidak seperti di Turki, partai-partai Islam diakui, dan pengadilan Islam dan

sistem pendidikan agama yang diintegrasikan ke dalam struktur negara di Indonesia.

2. Tesis Wolly Baktiono (2008)¹, yang meneliti tentang “Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno 17 Agustus 1959”. Penelitian ini mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks pidato Presiden Soekarno, yang disampaikan pada hari Senin, jam 08.10 WIB tanggal 17 Agustus 1959, yang diberi judul oleh Soekarno sendiri, *The Rediscovery of Our Revolution* atau Penemuan Kembali Revolusi Kita. Teks pidato inilah yang kemudian jauh lebih dikenal sebagai doktrin Soekarno yang dinamai Manifesto Politik. Disamping itu juga akan mengungkapkan faktor-faktor kesejarahan, kekuatan-kekuatan sosio-politik, ekonomi serta budaya. Pidato sebagai bagian dari aktivitas pribadi (individu), yang melibatkan seluruh bangsa (sosial), sebagai *political public sphere* dan model ini bisa terselenggara karena Presiden Soekarno memiliki hegemoni, yang memungkinkan kesemuanya ini niscaya bisa terjadi. Analisis wacana kritis (DA) ini bertumpu atas teks dengan metode kualitatif yang menggunakan interpretasi Burthesian. Dan ini menimbulkan (foment) kebutuhan akan *semiotic interpretation stance*, yang melibatkan tokoh-tokoh lain yang sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Didalam penelitian ini memerlukan teori-teori narasi dari perspektif wacana, guna memahami sebuah wacana politik (political discourse). Teori-teori wacana dari pemikir yang lain, seperti Foucault, Derrida maupun van Dijk, sangat membantu memperkaya pendekatan Barthes. Meskipun secara spesifik menaruh perhatian kuat pada koneksitas wacana dengan bahasa, kekuasaan dan analisis mitisnya.

¹ library@lib.unair.ac.id; library@unair.ac.id

3. Penelitian Pawito, Ph. D, (2006), Wacana Tentang Perempuan Studi terhadap Sarinah- Karya Sukarno. Penelitian ini mengambil titik tekan pada tiga pertanyaan: (a) bagaimana realitas tentang perempuan di lukiskan oleh Sukarno, (b) bagaimana bahasa yang digunakan oleh Sukarno dalam mengembangkan wacana tentang perempuan dan apa fungsi dari bahasa yang bersangkutan, dan (c) symbol-simbol apa yang digunakan oleh Sukarno dalam mengembangkan wacana tentang perempuan. Penelitian ini menggunakan analisis wacana terutama etnografi komunikasi dengan pendekatan sosiokultural, yakni dengan menempatkan wacana sebagai praktik social yang karena wacana yang di kembangkan sebagai tindakan manusia yang senantiasa berkaitan dengan proses-proses simbolik, seperti kekuasaan dan ideology. Hasil penelitian, Sukarno menempatkan wacana perempuan ke dalam bingkai yang bervariasi, termasuk budaya dan masyarakat, kekuasaan, dan ideology dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks kebudayaan, Sukarno melihat perempuan Indonesia sampai 1960-an memperlakukan dengan tidak adil, yakni di tempatkan di belakang dan tidak diberi peran. Lebih dari itu Sukarno juga mengamati bahwa kaum perempuan cenderung di anggap atau diperlakukan seperti dewi tolol, senantiasa di pundi-pundi dan di jaga-jaga seperti seorang dewi, namun sekaligus juga senantiasa di tolong-tolong seolah-olah kaum perempuan tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri.

Adapun matriknya sebagai berikut

Gambar 1

Peneliti	Ibnu Anshori
Judul	<i>Mustafa Kemal And Sukarno: A Comparison of Views Regarding Relations Between State And Religion</i>
Metode	Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif analisis historis. Data penelitian yang di peroleh selanjutnya di klasifikasikan di verifikasi dan di interpretasikan.
Hasil	Hasil penelitian menjelaskan tentang pendekatan rasional mereka untuk agama dan perhatian untuk memodernisasi masyarakat mereka kedua pemimpin tersebut dipandu oleh paradigma sekuler tentang hubungan antara negara dan agama yang masing-masing dirumuskan. Penghapusan sistem kesultanan-khalifah, menandai akhir Islam sebagai agama negara dan penggantian dengan system demokrasi tampak dari setiap kebijakan yang di rumuskan. "Kebijakan-dominasi sekularisasi" Mustafa Kemal di lihat dalam penghapusan pendidikan agama, melarang perintah mistical, dan pelarangan penggunaan ritual Islamic setiap kegiatan di Turki, membuat Turki negara sekuler sepenuhnya. Di Indonesia, sekularisasi dimaksudkan tidak hanya untuk mengejar laju modernisasi tetapi juga telah memiliki hubungan khusus untuk memastikan dukungan minoritas agama tentang sistem politik. Kebijakan Sukarno untuk memapankan sebuah negara kuasi-sekuler Pancasila dipandu oleh kepedulian terhadap kesatuan politik. Namun, tidak seperti Mustafa Kemal, Sukarno menghindari strategi oposisi terbuka terhadap agama, agar tidak menuai risiko politik yang tidak di inginkan. Meskipun partai-partai Islam Indonesia sering di warnai oleh sinkretisme Sukarno, sebagaimana yang termaktub dalam manifesto NASAKOM nya. Tidak seperti di Turki, partai-partai Islam diakui, dan pengadilan Islam dan sistem pendidikan agama yang diintegrasikan ke dalam struktur negara di Indonesia.
Analisis	Namun hasil penelitian ini seharusnya bisa mengungkap tentang pengaruh latar belakang maupun pengaruh kebudayaan masing-masing pemimpin sehingga dapat diketahui penyebab dari perbedaan dalam menerapkan sekularisme dalam negara.
Persamaan	Tema tentang actor politik yang melakukan konstruksi terhadap realitas dalam bentuk ide ataupun gagasan yang di relasikan dalam bentuk kebijakan negara.
Perbedaan	Dalam pemilihan tema, maupun pendekatan yang di gunakan. Hasil yang di capai adalah perbedaan deskriptif tentang pemikiran kedua pemimpin itu.

Gambar II

Peneliti	Wolly Baktiono
Judul	Analisis Wacana Kritis Pidato Soekarno 17 Agustus 1959”
Metode	Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan
Hasil	Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor-faktor kesejarahan, kekuatan-kekuatan sosio-politik, ekonomi serta budaya. Pidato sebagai bagian dari aktivitas pribadi (individu), yang melibatkan seluruh bangsa (sosial), sebagai <i>political public sphere</i> dan model ini bisa terselenggara karena Presiden Soekarno memiliki hegemoni, yang memungkinkan kesemuanya ini niscaya bisa terjadi.
Analisis	Karakter spesifik dari analisa wacana kritis adalah melihat maksud-maksud tersembunyi di balik praktek kewacanaan. Sebuah wacana di pahami secara subyektif sebagai alat untuk melakukan hegemoni kekuasaan.
Persamaan	Tema yang di angkat adalah wacana yang dikembangkan komunikator politik, yaitu Sukarno dalam melakukan konstruksi realitas. Metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan analisis bahasa hanya sampai pada taraf analisis structural, serta obyek kajian adalah teks pidato Sukarno.
Perbedaan	Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dan tema dalam focus kajian terhadap teks adalah pidato Sukarno tahun 1959.

Gambar III

Peneliti	Pawito
Judul	Wacana Tentang Perempuan Studi terhadap Sarinah-Karya Sukarno
Metode	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana terutama etnografi komunikasi dengan pendekatan sosiokultural, yakni dengan menempatkan wacana sebagai praktik social yang karena wacana yang di kembangkan sebagai tindakan manusia yang senantiasa berkaitan dengan proses-proses simbolik, seperti kekuasaan dan ideology.
Hasil	Hasil penelitian, Sukarno menempatkan wacana perempuan ke dalam bingkai yang bervariasi, termasuk budaya dan masyarakat, kekuasaan, dan ideology dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam konteks kebudayaan, Sukarno melihat perempuan Indonesia sampai 1960-an memperlakukan dengan tidak adil, yakni di tempatkan di belakang dan tidak diberi peran. Lebih dari itu Sukarno juga mengamati bahwa kaum perempuan cenderung di anggap atau diperlakukan seperti dewi tolol, senantiasa di pundi-pundi dan di jaga-jaga seperti seorang dewi, namun sekaligus juga senantiasa di tolong-tolong seolah-olah kaum perempuan tidak dapat berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri.
Analisis	Penelitian ini seharusnya tidak sekedar mengungkap maksud wacana tentang perempuan yang dikembangkan Sukarno, melainkan juga wacana itu mempunyai kontekstualisasi dengan realitas sekarang.
Persamaan	Tema yang di angkat adalah wacana yang dikembangkan komunikator, yaitu Sukarno dalam melakukan konstruksi realitas. Metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan analisis bahasa hanya sampai pada taraf analisis structural, serta obyek kajian adalah teks pidato Sukarno.
Perbedaan	Penelitian ini sekedar menggambarkan secara deskriptif tentang perempuan yang di maksud Sukarno, tidak menjelaskan makna terdalam terhadap wacana yang dikaji. Pendekatan bahasa yang di gunakan sebatas level analisis structural. Obyek kajian juga terbatas pada teks Sukarno tentang Sarinah.

2.2. Kerangka Pemikiran dan Teori

Dalam penelitian ini termasuk dalam paradigma konstruktivisme (interpretatif), yang menekankan bahwa realitas itu ada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang di dasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik serta tergantung pada pihak yang melakukan (Salim:2006:71). Untuk itu tradisi dalam paradigma konstruktivisme, teori yang relevan digunakan dalam mendukung analisis kajian adalah, teori konstruksi, national interest, sedang untuk analisis bahasa digunakan hermeneutika teks Paul Ricouer.

2.2.1. Konstruksi Sosial Dalam Paradigma Konstruktivisme

Dalam pandangan fungsional struktural Parson, memandang masyarakat sebagai sistem sosial, yang menekankan pada fungsi-fungsi dari struktur sosial dari suatu fakta sosial terhadap fakta sosial lainnya. Teori ini memandang bahwa masyarakat merupakan sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula pada bagian lainnya.

Sedangkan, manusia adalah aktor yang pasif dalam sistem sosial, bagaimana sistem sosial mengontrol aktor, bukan bagaimana aktor menciptakan dan memelihara sistem (Ritzer:2008:261). Teori ini menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan utama dalam mengintegrasikan dan tempat internalisasi berbagai aktor dalam sistem sosial. Misalnya dalam sub kebudayaan ekonomi, adalah sub sistem yang dapat difungsikan dalam sistem sosial masyarakat tempat para aktor untuk mengenal dan melakukan sistem produksi, kerja dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tatanan kerja ekonomi sudah terbentuk sebelu 17 ehingga tinggal mengikuti dan memelihara

tatanan kerja tersebut. Seorang yang memilih pekerjaan petani karena pekerjaan itu sudah ada pada generasi sebelumnya.

Berbeda dengan teori interaksi simbolik, menempatkan aktor berperan aktif dalam mendefinisikan berbagai fenomena ataupun realitas sosial. Manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya, bahwa tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan ataupun nilai-nilai tertentu yang tergambar dalam fakta sosial, dan menjadi cerminan dalam kebudayaan sistem sosial itu.

Prinsip dari teori interaksi simbolik ini adalah, kehidupan sosial pada dasarnya adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”, mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga berpengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial (Mulyana: 2008:71) .

Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang merdeka mengkreasi dan menstruktur dunia sosial berdasarkan penafsiran subyektif terhadap realitas sosial. Max Weber melihat realitas sosial sebagai perilaku sosial yang memiliki subyektif, karena itu perilaku memiliki tujuan dan motivasi. Perilaku sosial itu menjadi sosial, oleh Weber dikatakan kalau yang dimaksud subyektif dari perilaku sosial membuat individu mengarahkan dan memperhitungkan kelakuan orang lain dan mengarahkan kepada subyektif itu. Perilaku itu memiliki kepastian kalau menunjukkan keseragaman dengan perilaku pada umumnya dalam masyarakat (Veeger, 1993:171).

Berbeda dengan teori konfliknya Marx bahwa adanya dikotomi dalam realitas sosial antara kelas pemilik produksi dengan kelas pekerja. Sebagai akibat dari ketidak

adilan dalam sistem produksi ekonomi, kelas pemilik produksi selalu melakukan penindasan ekonomi terhadap kelas pekerja. Untuk itu perlu perjuangan dari kelas pekerja merebut sistem produksi dari tangan pemilik produksi.

Pada kenyataannya realitas sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial di antara individu di landasi oleh motif-motif kebutuhan dunia sosial. Melalui interaksi yang direlasikan melalui bahasa melahirkan simbol-simbol yang kemudian menjadi fakta obyektif realitas sosial. Perjuangan untuk mengkonstruksi simbol sehingga menjadi fakta yang obyektif adalah permasalahan dalam konstruksi sosial.

Perlu ditegaskan yang dimaksud dengan realitas sosial, dalam pengertian Berger dan Luchmann (13:1967) adalah kenyataan sosial yang di definisikan sebagai : *“to define “reality” as a quality appertaining to phenomena that we rezognize as having a being independent of our own volition (we cannot “wish” them away), and to define “knowledge”as the certainty that phenomena are real and that they possess spscific characteristrics”*. Dengan demikian, realitas sosial adalah bentuk fenomena-fenomena yang berada dalam kenyataan obyektif dan sifatnya otonom terlepas dari kehendak manusia, kemudian berdasarkan pemahaman subyektif manusia mempunyai karakteristik spesifik yang di sebut dengan pengetahuan.

Perspektif di atas merupakan asumsi dalam menjelaskan teori konstruksi atas realitas sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam penjelasannya bahwa dalam masyarakat berlangsung dialektika, dan dialektika berlangsung dalam 3 (tiga) moment secara simultan. Pertama, eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia socio kultural sebagai produk manusia. Kedua, obyektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionlisasi. Sedangkan ketiga, internalisasi, yaitu proses dimana individu

mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

Moment “eksternalisasi”, seperti yang diterangkan Berger dan Luchmann (75:1990), bahwa produk-produk sosial dari eksternalisasi manusia mempunyai suatu sifat yang *sue generis* dibandingkan dengan konteks organisme dan konteks lingkungannya, maka penting ditekankan bahwa eksternalisasi itu sebuah keharusan antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia. Keberadaan manusia tak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerakan. Keberadaan manusia harus terus-menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas.

Melalui eksternalisasi manusia mulai melakukan proses pembelajaran dengan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial yang merupakan produk manusia berdasarkan hasil interaksi. Dengan proses eksternalisasi, manusia merupakan produk dari masyarakat

Moment “obyektivasi” berlangsung dalam dunia intersubyektif masyarakat yang dilembagakan. Pada moment ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedang individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia (Berger dan Luchmann:49:1967).

Hal yang terpenting dalam proses obyektivasi adalah signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda oleh manusia. Selanjutnya, Berger dan Luchmann (59:1967) menyatakan, sebuah tanda (*sign*) dapat dibedakan dari obyektivasi-obyektivasi lainnya, karena tujuannya yang eksplisit untuk digunakan sebagai isyarat-isyarat atau indeks bagi makna-makna subyektif. Melalui penandaan yang melahirkan makna maka dapat membedakan bentuk obyektivasi yang satu terhadap yang lain.

Kemudian, tanda-tanda dikelompokkan dalam sejumlah sistem, maka ada sistem tanda dengan tangan, sistem gerak-gerak badan yang berpola, sistem berbagai perangkat artefak material, dan sebagainya. Sistem tanda ini kemudian membentuk bahasa. Dengan demikian obyektivitas yang umum dari kehidupan sehari-hari pertama-tama dipertahankan adalah signifikasi bahasa (Berger dan Luchmann:51-53:1967).

Memahami “moment dialektika” Berger dan Luchmann, maka di tengah kondisi sosiokultural masyarakat terjadi proses kreatif untuk melakukan terhadap dunia sosial melalui bahasa. Sebab, dengan bahasa mampu menjadi tempat penyimpanan yang obyektif dari akumulasi makna dan pengalaman yang besar sekali dan yang kemudian dapat dilestarikannya dalam waktu dan diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. (Berger:42:1967).

Melalui bahasa digunakan untuk menciptakan representasi –representasi realitas yang tidak pernah sekedar refleksi dari realitas yang ada sebelumnya, tetapi mampu memberikan kontribusi pada pengkonstruksian realitas dalam bentuk yang terstruktur, yaitu wacana (Jorgensen & Philip:16:2007). Konsekuensi dari hal itu adalah adanya perjuangan wacana yang terus menerus yang senantiasa mengalami transformasi karena adanya interaksi dengan wacana lain, sehingga mampu mencapai hegemoni, yakni menetapkan makna-makna bahasa menurut caranya sendiri. Dengan demikian Laclau dan Mouffe (dalam Jorgensen & Philip:12:2007) menyatakan hegemoni untuk sementara waktu bisa di pahami sebagai dominasi satu perspektif khusus. Sedangkan Edmund Huserl menyebut realitas/dunia sosial telah mencapai bentuk sebagai pengetahuan sejati.

Adanya pengetahuan membuka ruang untuk terjadinya internalisasi. Berger dalam Luchmann (185:1990) menyatakan internalisasi adalah pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan suatu makna, artinya, sebagai suatu manifestasi dari proses-proses subyektif orang lain yang dengan demikian menjadi bermakna secara subyektif bagi individu sendiri. Tidak peduli apakah subyektif orang lain itu bersesuaian dengan subyektif individu tertentu, karena bisa jadi individu memahami orang lain secara keliru, karena sebenarnya subyektivitas orang lain itu tersedia secara obyektif bagi individu dan menjadi bermakna baginya. Kesesuaian sepenuhnya dari kedua makna subyektif dan pengetahuan timbal balik mengenai kesesuaian itu mengadaikan terbentuknya pengertian bersama.

Dengan internalisasi, individu melakukan transformasi terhadap dunia obyektif, kemudian melakukan proses kreatif memodifikasi kenyataan sosial sesuai dengan subyektif individu, tidak menjadi persoalan apabila proses kreatif berbeda dengan individu lain. Dalam konteks ini, Berger dan Luchmann(186:1990) mewngatakan bagaimanapun juga, dalam bentuk internalissi yang kompleks, individu tidak hanya “memahami” proses-proses subyektif orang lain yang berlangsung sesaat, individu “memahami” dunia di mana ia hidup dan dunia itu menjai dunia individu sendiri. Ini menandai bahwa individu dan orang mengalami kebersamaan dalam waktu dengan cara yang lebih dari sekedar sepintas lalu dan suatu perspektif komprehensif yang mempertautkan urutan situasi secara intersubyektif. Sekarang mereka masing-msing tidak hanya memahami definisi pihak lainnya tentang kenyataan sosial yang di alaminya bersama, namun mereka juga mendefinisikan kenyataan-kenyataan itu secara timbal balik. Sekarang yang terpenting bahwa

terdapat suatu pengidentifikasian timbal balik yang berlangsung terus menerus antar mereka. Mereka tidak hanya hidup dalam dunia yang sama, tetapi mereka masing-masing berpartisipasi dalam keberadaan dunia lainnya. Baru setelah mencapai taraf internalisasi semacam ini, individu menjadi anggota masyarakat.

Integrasi dalam masyarakat melalui moment dialektis ini juga menyediakan tempat bagi adanya penyimpangan-penyimpangan selama proses konstruksi. Berger dan Luchmann (61:1967) menyatakan, oleh karena pengetahuan ini secara sosial diobyektivasi sebagai pengetahuan, artinya, sebagai satu perangkat kebenaran yang berlaku umum mengenai kenyataan, maka setiap penyimpangan yang radikal dari tatanan kelembagaan tampak sebagai suatu penyimpangan dari kenyataan. Penyimpangan seperti bisa dianggap sebagai kejahatan moral, penyakit jiwa atau sekedar ketidaktahuan.

2.2.4. Komunikator Politik Dalam Konstruksi Realitas

Dalam konteks komunikasi politik, seorang konstruktor atau pemimpin politik adalah komunikator politik. Menurut Dann Nimmo (73:1999):

Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika di rangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi.

Dengan demikian komunikator politik juga merupakan pemimpin opini, seperti yang dikemukakan oleh Rosenau (dalam Nimmo:47:1999), bahwa menduduki posisi yang memungkinkan mereka, dengan keteraturan tertentu, menyampaikan opini tentang masalah kebijakan kepada orang-orang yang tak dikenal. Roger dan Shoemaker (dalam Nasution:98) menggambarkan para pemimpin opini sebagai

“pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain dalam perilaku opini(*opinion behavior*) melalui cara-cara atau jalan yang disukai oleh orang-orang yang dipengaruhi tersebut”.

Karena kemampuan mempengaruhi, seorang pemimpin opini harus mempunyai kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Kredibilitas menurut Rakhmat (1985:264) adalah seperangkat persepsi khalayak tentang sifat-sifat komunikator, sehingga sesungguhnya kredibilitas tidak melekat dalam diri komunikator. Hovland dan Wiss dalam Rakhmat (1985:262) menjelaskan bahwa kredibilitas atau etos itu terdiri dari dua komponen, yaitu keahlian (*experties*) dan dapat dipercaya (*trust worthiness*).

Untuk memainkan peran yang lebih besar di banding yang lain, komunikator politik bekerja melalui opini. Karl Poper dalam Nimmo (29:1999) menegaskan bahwa para pemimpin menciptakan opini publik karena mereka “berhasil membuat beberapa gagasan mula-mula di tolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima. Dengan kata lain, menciptakan opini sama halnya juga dengan melakukan konstruksi terhadap realitas dalam bentuk gagasan ataupun ide melalui lambang (simbol), sebab penggunaan lambang signifikan memudahkan pembentukan opini publik. Dengan lambang yang berupa kata-kata, gambar, ataupun tindakan yang sengaja di konstruksikan komunikator politik merupakan petunjuk bagi sesama warga menanggapi lambang lambang itu dengan cara tertentu yang sudah diperkirakan.

Proses pembentukan pendapat seseorang dapat dijelaskan dalam beberapa pendekatan, seperti yang dijelaskan Hennessy (103:1990), yaitu; aliran rasionalisme filosofis, menjelaskan pendapat seseorang lahir dengan menggunakan kekuatan akalnyanya dan bahwa kebenaran atau kesalahan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan suatu kebenaran yang ideal atau hukum yang bukan ciptaan manusia. Pendekatan

psikologis Freud, menjelaskan bahwa pengalaman semasa bayi dan kanak-kanak menentukan struktur kepribadian dan pola sikap sesudah dewasa. Hal ini selanjutnya tidak saja membatasi dan memberi bentuk pada gambaran diri (*self image*) tetapi juga penglihatan dan pandangan mengenai isu politik. Oleh karena itu pendapat pribadi dan umum timbul sebagai bagian yang terbatas dan biasanya diputarbalikan dari apa yang mungkin untuk dipercaya oleh pikiran manusia. Sedangkan pendekatan sosiologis menyatakan pendapat dibentuk oleh tradisi kultur, lembaga sosial, dan kaidah kelompok masyarakat di mana setiap orang menjadi bagiannya. Sedangkan Cangara (168:2009), menjelaskan bahwa sikap atau pendapat seseorang di pengaruhi oleh situasi sosial atau isu, kondisi sosial atau latar belakang sejarah dan faktor psikologis.

Proses pembentukan pendapat atau opini dalam pemahaman Berger dan Luchmann (43-46:1967) sebagai sebagai konstruktor realitas. Lebih lanjut dijelaskan proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor melakukan obyektivasi terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi terhadap suatu obyek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui proses persepsi itu di internalisasikan ke dalam diri seorang konstruktor. Dalam tahap ini inilah dilakukan konseptualisasi terhadap suatu obyek yang dipersepsi. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses permenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan. Alat membuat pernyataan tersebut tiada lain adalah kata-kata atau konsep atau bahasa.

Dengan demikian titik sentral dalam konstruksi adalah opini yang dimanifestasikan dalam bentuk wacana. Dalam linguistic, istilah wacana di pahami sebagai suatu rangkaian sinambung bahasa (khususnya lisan) yang lebih besar dari

pada kalimat. Konsep ini merupakan reaksi dari bentuk linguistic formal yang lebih memerhatikan unit kata, fraase, atau kalimat semata, tanpa melihat keterkaitan di antara unsure-unsur tersebut (Oetomo, 1993:4)

Dalam perspektif politik, Faucoult (1972) menjelaskan wacana adalah realitas social sebagai arena diskursif (*discursive filed*) yang merupakan kompetisi tentang bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta proses-proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara khas. Dengan pengertian demikian, wacana merujuk pada berbagai cara tersedia untuk berbicara atau menulis untuk menghasilkan kekuasaan untuk menghasilkan makna yang di dalamnya melibatkan beroperasinya kekuasaan untuk menghasilkan obyek dan efek tertentu (Sparingga, 2001:1)

Sedangkan medium pembentuk wacana adalah bahasa. Hal ini karena bahasa mampu mentrasendensikan kenyataan hidup sehari-hari secara keseluruhan, ia dapat mengacu kepada pengalaman-pengalaman yang menyangkut wilayah-wilayah makna yang berhingga, dan ia dapat menjangkau wilayah-wilayah kenyataan yang berlainan (Berger dan Luchmann:54:1967)

Melalui interaksi, bahasa menjadi medium perantara untuk mendefinisikan kenyataan sosial dalam sistem tanda yang mempunyai makna. Untuk itu bagi konstruktor dibutuhkan keahlian, yaitu komunikasi. Keahlian ini bukan sekedar diartikan hanya sebatas kefasihan dalam mengungkapkan bahasa verbal ataupun non verbal, melainkan bagaimana mampu mengintepretasikan berbagai obyek kemudian mengorganisir, memodifikasi menjadi makna yang di sampaikan dalam tulisan dan pesan-pesan persuasif.

Lebih lanjut Hikam (1999:179) menjelaskan tentang bahasa sebagai berikut:

Bahasa dan praktik tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial dan politik. Namun, semakin di sadari bahwa bahasa, di dalam dirinya, tampil sebagai macam kekuatan. Oleh karena itu bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu *space* (ruang) di mana konflik berbagai kepentingan kekuatan, proses hegemoni, dan *counter-hegemony* (hegemoni tanding) terjadi.

Dengan demikian bagi seorang konstruktor, terlebih komunikator politik penggunaan bahasa bukan sekedar interpretasi terhadap realitas sosial, melainkan medium kepentingan untuk memaparkan sebuah wacana agar menjadi seperangkat nilai atau mengalami hegemoni dalam tatanan sosial. Untuk itu bagi konstruktor, pemaparan wacana adalah proses perjuangan, karena sebelumnya telah berlaku wacana yang dominan dan hegemonik.

2.2.5. Kontruksi “Kekuatan Baru” Dalam Tatanan Politik Internasional

Dalam mengkaji konstruksi tentang “kekuatan yang baru”, perlu menelaah lebih dulu beberapa perspektif kunci yang harus dipahami, seperti hubungan internasional, politik internasional, politik luar negeri dan kepentingan nasional. Kalau mengikuti alur pemikiran Berger dan Luchmann, perspektif tersebut merupakan moment eksternalisasi dalam pembentukan konstruksi. Dengan pemahaman tersebut, setidaknya membantu menempatkan konstruksi realitas itu sesuai dengan konteksnya, sehingga bisa di dapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.

Dalam perspektif politik internasional lebih menekankan kepada dinamika interaksi dari sesuatu negara tertentu dengan negara-negara lain. Politik internasional memusatkan kepada kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara di tengah-tengah hubungan internasional, sehingga mengandung kadar aksi dinamik. Sedang perspektif hubungan internasional, menekankan seluruh hubungan antar negara di dunia ini dalam suatu kerangka yang integralistik dalam segala bidang seginya

tercakup dalam istilah itu baik yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial budaya, maupun militer (Sufri Yusuf:13:1989).

Sedangkan Holsty (21:1983) membedakan ketiga perspektif dengan menyatakan bahwa “hubungan internasional” adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apakah disponsori oleh pemerintah atau tidak. Studi hubungan internasional mencakup analisis kebijakan luar negeri atau proses politik antara bangsa-bangsa, tetapi karena minatnya dalam semua segi hubungan antara masyarakat-masyarakat yang berbeda, ia mencakup juga mengenai serikat perdagangan internasional, misi kebudayaan. Mengenai “kebijakan luar negeri” adalah deskripsi kepentingan, tindakan dan unsur kekuatan negara. Apabila kepentingan, tindakan dari suatu negara bersinggungan dan mendapatkan tanggapan dari dunia luar atau negara lain, maka kebijakan tersebut membentuk tatanan politik internasional. Chris Brown (68:2001) memberikan pemahaman sederhana mengenai politik luar negeri adalah sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.

Berdasarkan pada pengertian di atas, di dapatkan suatu pemahaman bahwa sumber dari ketiga hal tersebut adalah adanya kepentingan nasional dari masing-masing negara. Perjuangan kepentingan nasional pada akhirnya membentuk relasi-relasi dialektis antar negara dengan segala aspeknya yang menjelma dalam tatanan politik internasional.

Mengenai kepentingan nasional, Joseph Frankel membagi konsep kepentingan nasional pada tingkatan aspirasional ini dalam tujuh sifat, yaitu kepentingan nasional itu berjangka panjang, berakar dalam sejarah dan ideologi, sumber kritik oposisi terhadap pemerintah, memberikan kesadaran akan tujuan atau harapan terhadap

kebijaksanaan, tidak perlu diartikulasikan dan dikordinasikan secara penuh serta bisa saling bertentangan, tidak memerlukan studi kelayakan dan lebih ditentukan oleh kehendak politik dari pada kemampuan nyata. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan landasan bagi arah dan orientasi kebijakan politik luar negeri.

Holsti (1983:22), mendefinisikan orientasi politik internasional suatu negara adalah sebagai sikap umum dan komitmen terhadap lingkungan eksternal, strategi fundamental untuk mencapai tujuan domestik dan tujuan serta aspirasi eksternal dan untuk menghadapi ancaman yang ada. Holsti membedakan tipe orientasi dalam tiga bagian, yaitu isolasi, non blok dan koalisi. Orientasi ini biasanya stabil. Perubahan berlangsung jika terjadi peralihan radikal struktur politik domestik, keseimbangan regional dan sistem global.

Penjelasan dari Holsti memberikan pengertian bahwa situasi tata politik internasional dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan pola interaksi dari negara-negara dunia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya masing-masing. Kondisi demikian berakibat kebijakan politik internasional atau politik luar negeri suatu negara cenderung berubah dari waktu ke waktu tanpa indikasi yang jelas. Chris Brown (1968:2001) memberikan pemahaman tentang politik luar negeri sebagai cara untuk mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional terhadap dunia luar.

Untuk itu ada beberapa faktor determinan atau indikator yang dapat dipakai untuk memahami perilaku politik luar negeri yang dinamis. Dalam hal ini, William D. Coplin (1965:1992) mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri.

Pertama, adalah konteks internasional. Artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaimana negara itu akan berperilaku. Dalam kaitan ini, Coplin lebih lanjut menyatakan bahwa ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politik. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi geografis yang didudukinya dan dalam kaitannya dengan negara –negara lain dalam sistem itu serta hubungannya ekonomi dan politik antara negara itu dengan negara-negara lainnya. Geografi merupakan sesuatu hal yang konstan keberadaannya. Namun, meski faktor geografi masih merupakan salah satu bagian terpenting dari keputusan-keputusan politik luar negeri, namun tidak lagi terpenting seperti yang diberikan oleh para pendukung geopolitik pada masa lalu. Sebagaimana halnya geografi, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri. Melalui faktor itu arus barang dan jasa dapat mempengaruhi pendulum ketergantungan antar satu negara dengan negara lain.

Faktor *kedua*, yang menjadi determinan dalam politik luar negeri adalah perilaku para pengambil keputusan. Dalam hal ini mencakup pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. Sementara itu determinan *ketiga* adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain.

Keempat, determinan terakhir yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam negeri. Melalui perspektif ini yang ingin dilihat adalah sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional. Situasi politik yang terjadi dalam negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Sedangkan, faktor-faktor politik domestik atau kepentingan nasional yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, Bantarto Bandaro (dalam Wuryandari: 9:2007) secara khusus mengelompokkannya dalam tiga kategori berdasarkan pada kecepatan dari perubahan yang terjadi (*pace of Change*), yaitu sebagai berikut:

1. Determinan yang kesetabilannya tinggi (*highly stable determinan*). Perubahan dalam determinan ini biasanya berjalan sangat lambat dan ada kemungkinan berubah secara mendadak. Contohnya antara lain lokasi dan ukuran geografi, sumber daya dan populasi.
2. Determinan yang kesetabilannya moderat (*moderately stable determinan*). Perubahan dalam determinan ini, jika memang berubah biasanya terjadi lebih lambat daripada determinan yang kesetabilannya tinggi. Misalnya, budaya politik, gaya politik, kepemimpinan politik dan proses politik.
3. Determinan yang sifatnya tidak stabil (*usntable determinant*). Bentuknya antara lain persepsi, sikap dan faktor-faktor yang muncul secara kebetulan saja. Sikap publik bisa berubah dengan cepat dan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam alat yang digunakan dalam menjalankan politik luar negeri.

Berdasarkan pada uraian di atas, secara teoritik memberikan penjelasan tentang terbentuknya tata politik internasional, bahwa kepentingan nasional yang berwujud dalam sasaran dan tindakan kebijakan internasional di satu negara

bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain sehingga membentuk interaksi yang terjalin dalam konfigurasi yang kompleks dan dinamis. Atau, Holsty (29:1985) menyebut sebagai sebagai sistem internasional yang dapat dirumuskan dalam suatu himpunan kesatuan-kesatuan politik yang merdeka – suku bangsa, negara kota, bangsa atau kerajaan yang sering berinteraksi dan mengikuti proses yang teratur.

Dewi Fortuna Anwar (dalam Wuryandari:14:2008), melihat kepentingan nasional adalah suatu hal yang kontradiktif. Di satu sisi, lebih mengacu pada pendekatan “obyektif”. Pendekatan ini melihat “kepentingan nasional sebagai sesuatu yang bisa di definisikan secara jelas dengan menggunakan kriteria yang obyektif sehingga rumusan kepentingan nasional suatu negara cenderung konstan dari waktu ke waktu.

Pada sisi lain, pandangan “subyektif” dalam melihat kepentingan nasional. Artinya, kepentingan nasional merupakan “sesuatu yang selalu mengikuti preferensi subyektif para pembuat keputusan. Artinya, bagaimana negara merumuskan kepentingan nasionalnya dan aspek-aspek apa saja yang akan ditonjolkannya serta kebijakan yang dihasilkan, bisa saja sangat tergantung pada pandangan, sikap dan preferensi pilihan yang dibuat oleh para elite pembuat kebijakan. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dan Harmon Zeigler (dalam Wuryandari:15:2008) tentang ”Teori Elite” yang menyatakan bahwa kebijakan yang dihasilkan merupakan preferensi dan nilai dari para elite yang berkuasa.

Teori kepentingan nasional (*national interest*) menjadi pijakan berpikir dalam menganalisis tentang konstruksi “kekuatan baru”. Sebagai bentuk kebijakan

politik luar negeri pada masa Presiden Sukarno, di satu sisi dapat diteropong melalui pendekatan yang obyektif, di sisi lain melalui pendekatan subyektif.

2.2.2. Pendekatan Bahasa Post Strukturalis

Pendekatan bahasa dalam paradigma konstruksi tidak seperti tradisi yang dikembangkan kelompok strukturalis, misalnya tradisi Roland Barthes, Levi Straus, Althausser yang berpijak pada asumsi bahwa bahasa adalah tempat saluran pengkomunikasian informasi tentang keadaan mental utama atau perilaku atau fakta-fakta dunia sosial ini. (Jorgensen & Philips:18:2007). Sedangkan Little John, menyatakan teori struktural memperlakukan bahasa dan wacana sebagai suatu produk dan instrumen dari komunikator manusiawi, dengan menganalisis struktur wacana orang memahami makna-makna yang di sampaikan dan fungsi-fungsi yang dipenuhi bagi makhluk manusia dengan berbicara.

Dalam pemahaman struktural, bahasa di artikan sebagai sistem yang ditentukan oleh realitas yang menjadi rujukannya, sehingga bersifat stabil dan tidak bisa di rubah. Untuk itu dalam proses intepretasi, setiap tanda bahasa memperoleh pemaknaan tergantung hubungan-hubungan internal dalam sistem tanda tersebut.

Hoed (2008:60) menjelaskan prinsip dasar strukturalisme adalah bahwa (1) struktur dan system selalu hadir bersama, (2) struktur dan system bersifat abstrak dan merupakan bangun (*construct*) yang adanya dalam kognisi manusia, bukan sesuatu yang konkrit, dan (3) struktur dan system merupakan satuan yang tertutup dan memenuhi dirinya sendiri.

Sedangkan kaidah dalam analisis structural, Noth (1990:295) menyatakan:

1. Kaidah imanensi: analisi structural bersifat tertutup dan berlaku dalam jejaring system dengan perspektif sinkronos sebagai dasar.

2. Kaidah partinensi: analisis structural di dasari oleh diferensiasi dalam jejaring system, yakni makna atau identitas suatu entitas di dasarkan pada nilai pembeda.
3. Kaidah komutasi: analisis structural dilakukan dengan metode oposisi pasangan biner(pasangan minimal yang terdiri atas dua unsure yang di oposisikan untuk mengidentifikasi makna atau identitas.
4. Kaidah kompabilitas : analisis structural juga menghubungkan kesesuaian (kompabilitas) antar unsure dalam sebuah kombinasi sintagmatik sebagai syarat terbentuknya struktur yang berterima dan kesesuaian maknawiah. Dalam linguistik “kesesuaian” ini tercakup dalam istilah/konsep “kolokasi”
5. Kaidah integrasi analisis: analisis structural mengkaji hubungan antara unsur bawaan yang harus terintegrasi dengan yang di atasnya dalam suatu hirarki struktur-substruktur, sistem-subsistem yang keseluruhan membentuk suatu totalitas yang tertutup. Suatu entitas yang tidak dapat dimaksudkan ke dalam suatu struktur di atasnya merupakan bagian dari struktur yang lain.
6. Kaidah diakronis: analisis structural membedakan pendekatan sinkroni(melihat suatu unsure dalam hubungan dengan unsure-unsur yang lain dalam struktur dan system pada (kurun) waktu yang sama dengan unsure-unsur yang lain dalam struktur dan system dari segi perkembangannya dalam poros waktu). Namun, analisis struktur lebih mendahulukan pendekatan sinkronis daripada diakroni.
7. Kaidah fungsi: analisis structural mengkaji makna dan identitas sebagai fungsi unsure-unsur dalam system dalam rangka komunikasi atau fungsi-fungsi yang lain yang berkaitan dengan makna dan identitas unsur-unsur itu.

Kaidah-kaidah di atas menjadi ciri dari analisa structural. Tidak semua kaidah harus diterapkan . Penerapan satu atau beberapa di antaranya sudah memperlihatkan bahwa analisis suatu kajian berciri structural.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemaknaan tidak terbatas pada analisis structural, tetapi berlanjut pada tradisi yang di sebut dengan post strukturalis. Pemahaman terhadap bahasa ini dirintis oleh Ferdinand de Saussure, yang menyatakan tanda lingusitik bersifat manasuka, artinya kategori dan kaidah linguistik tidak dapat diramalkan ataupun di simpulkan dari realitas-realita ekstralinguistik (Leech:37:1993). Untuk itu makna yang kita berikan pada kata-kata tidak melekat pada kata-kata itu melainkan merupakan hasil konvesi tentang cara kita menghubungkan makna-makna dengan bunyi-bunyi tertentu (dalam Jorgensen dan Philips:16:2007). Dalam memperlakukan sistem tanda, Saussure, tanda (*sign*) terdiri atas dua sisi, bentuk (*signifiant*) dan isi (*signifie*), dan bahwa hubungan antara kedua itu sifatnya *arbitrer*.

Untuk membedakan bentuk pemahaman bahasa antara tradisi struktural dan post struktural, Saussure menggunakan “metaphora jaring ikan” . Struktur bahasa seperti jaring ikan, yakni setiap tanda memiliki tempatnya sendiri pada masing-masing mata jaring itu. Bila jaring itu ditebarkan , mata jaringnya tetap dalam posisi semula dengan jarak juga tepat dari mata-mata jaring yang lain, sama seperti halnya tanda yang jaraknya tetap dari tanda-tanda lain. Asumsi strukturalis bahwa hubungan-hubungan khusus tanda itu terkait satu sama lain, setiap tanda memiliki lokasi tertentu dalam jaring sehingga maknanya tetap. Sedang post strukturalis, tanda masih memperoleh maknanya karena perbedaanya dengan tanda-tanda yang lain itu bisa berubah sesuai dengan konteks penggunaan tanda itu sendiri.

Untuk itu Saussure membedakan struktur bahasa dalam dua tataran bahasa, yakni *language* dan *parole*. *Language* adalah struktur bahasa, yaitu jaringan tanda-tanda yang memberi makna satu sama lain dan struktur ini sifatnya tetap dan tak bisa diganti-ganti. Sebaliknya, *parole* merupakan penggunaan bahasa berdasarkan situasi, tanda yang benar-benar digunakan pemakai bahasa itu dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam pemahaman makna bahasa, *parole* harus berpedoman pada *language*, karena melalui *language* merupakan struktur bahasa yang memungkinkan bisa diciptakannya pernyataan-pernyataan khusus. Misalnya, kata “menangis” dalam struktur *language* adalah ungkapan kesedihan, untuk menemukan pengertian *parole*, maka situasi seperti apa menangis itu berlangsung. Pengertian bisa berbeda apabila menangis dalam situasi kegembiraan.

Kritik tajam lain terhadap pemaknaan terhadap bahasa dari tradisi struktural, seperti dinyatakan oleh Paul Ricouer (12:2008) yang berangkat dari seperangkat asumsi: *Pertama*, strukturalisme mengasumsikan bahwa bahasa merupakan obyek yang bisa di selidiki secara ilmiah,. *Kedua*, strukturalisme membedakan antara sains tentang keadaan di tingkat sistem (*states of system*) dan sains tentang perubahan serta menempatkan yang kedua di bawah yang pertama. *Ketiga*, model pendekatan kaum strukturalis mengasumsikan bahwa sistem dalam keadaan apa pun tidak memiliki keadaan absolut, akan tetapi hanya berhubungan saling ketergantungan, sehingga bahasa menjadi sebuah sistem tanda yang hanya ditentukan oleh perbedaan-perbedaannya. *Keempat*, strukturalisme memperlakukan himpunan tanda sebagai sistem ketergantungan internal yang padat dan otonom.

Berpijak pada pendapat dari Emile Benveniste yang menyatakan bahwa sebuah kalimat “bukan lagi sebuah unit dari bahasa (atau sistem), akan tetapi unit

ujaran atau diskursus. Peralihan kepada level diskursus memungkinkan terciptanya semantik kalimat yang orisinal dan berbeda dari semiotika tanda. Hanya pada level kalimat sebuah bahasa bisa merujuk kepada sesuatu, sehingga semesta tanda yang padu bisa dihubungkan dengan dunia diluar bahasa. (Ricoeur:15:2008).

Tetapi Ricoeur menekankan bahwa pada tahap awal pemaknaan harus struktural. Maksudnya, untuk memberi penjelasan tentang proses kreatif dan interpretasi yang dilakukan masyarakat dalam tata wicara. Pada awalnya, kata “menangis” merupakan ekspresi masyarakat untuk mengungkapkan kesedihan tetapi ketika terdapat fenomena karena sudah sekian tidak pernah berjumpa, dan ketika bertemu di ekspresikan dengan “menangis” juga, maka di sinilah letak proses kreatif masyarakat untuk memberi pemaksaan lain.

Untuk itu kata Ricoeur(16:2008), syarat utama dalam kreativitas berbahasa adalah polisemi kata, yaitu sebuah corak di mana satu kata dalam bahasa natural memiliki lebih dari satu arti, oleh karenanya penggunaan polisemi pada level praksis hanya bisa diketahui melalui semantik kalimat sehingga polisemi tergantung pada tindakan kontekstual yang menyisihkan beberapa kelebihan makna sehingga diskursus univokal (bermakna tunggal) bisa dihasilkan oleh kata yang polisemik.

Gagasan atau rumusan tujuan adalah produksi pesan, dalam kaca mata ilmu sosial masih berada dalam wilayah prateoritis atau belum terstruktur secara simbolis. Oleh karena cara bertindak dan berperilakunya belum terstruktur, jadi tak bisa diterima begitu saja sebagai benar apa adanya sebagaimana diinginkan oleh positivisme. Maka dunia kehidupan ini tak dapat diketahui melalui observasi seperti dalam metode -metode ilmu alam, melainkan cara khas tertentu. Yaitu pemahaman .

“Apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial itu terutama bukan kausalitas yang niscaya, melainkan makna. Oleh karena itu, tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya adalah memahami makna. Dalam hal ini seorang ilmuwan sosial tidak lebih tahu daripada para pelaku dalam dunia kehidupan itu. Oleh karena itu dengan cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia-kehidupan itu. Untuk menjelaskannya, ia harus memahami. Untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses menghasilkan dunia-kehidupan itu. Akhirnya partisipasi itu mengandalkan bahwa ia sudah termasuk ke dalam dunia kehidupan itu (Elvinaro dan Bambang:71:2007)

Hermeneutika menegaskan bahwa fenomena khas manusia adalah bahasa, dan karena itu memahami manusia dapat dimulai dari bahasa. Hal ini karena obyektivitas dari kesadaran manusia akan kenyataan. Bahasa mencerminkan realitas yang dialami si penutur, sekaligus apa yang dipikirkan oleh penutur itu.

Menurut Friedrich Agust Wolf, (dalam Poespoprodjo (21: 2004), hermeneutika di sebutnya sebagai “Ilmu tentang aturan-aturan untuk mengenali makna (*die Bedutung*) tanda-tanda, sedangkan tujuan hermeneutika adalah “menangkap pikiran-pikiran seorang. Dengan demikian, obyek hermeneutika tidak hanya teks, Semua hal yang tidak lagi secara langsung terbelang pada hidup kini harus ditafsirkan. Kesenian hukum, agama, filsafat dari masa lalu yang masih hadir pada zaman masa sekarang, dan masih bicara harus di tafsirkan agar diperoleh kembali artinya yang orisinal.

Gadamer menjelaskan bahwa memahami itu artinya memahami melalui bahasa. Inilah yang merupakan peran penting bahasa dalam proses “memahami”. Bahasa bukan dipandang sebagai sesuatu yang mengalami perubahan, melainkan sesuatu yang memiliki ketertujuan di dalam dirinya (Sumaryono, 1999:27). Maksudnya, kata-kata atau ungkapan tidak pernah tidak bermakna. Kata atau ungkapan penuh dengan makna.

2.2.3. Hermeneutika teks Paul Ricouer

Analisa bahasa untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena, terutama pemahaman akan penafsiran tindakan dan teks adalah dengan menggunakan Hermeneutika. Aristoteles dalam *Peri Hermeneias* menyatakan hermeneutika adalah kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita, dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Sebagaimana seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tulisan dengan orang lain, maka demikian pula ia tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapkan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman-pengalaman mentalnya yang di simbolkannya secara langsung itu adalah sama untuk semua orang, sebagaimana juga pengalaman pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu (Sumaryoto,24:2009). Sedangkan Heidegger dalam penjelasan filosofis mengenai hermenetika adalah “kata-kata dan bahasa bukanlah pembungkus di dalam mana segala sesuatu di simpan bagi keuntungan mereka yang menulis dan berbicara. Dalam kata-kata dan bahasalah segala sesuatu pertama-tama muncul dan ada (Little John:360:)

Penjelasan dari Heidegger setidaknya upaya pemahaman atau penafsiran yang dilakukan akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks. Mudjia Raharjdo (31:2009) menyatakan selain melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, sebuah aktivitas penafsiran sesungguhnya juga berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut di baca atau dipahami, sehingga sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam kegiatan penafsiran, yakni teks, konteks dan kontesktualisasi.

Sebuah teks menurut Ricoeur adalah otonom atau berdiri sendiri tidak tergantung pada maksud pengarang, pada situasi historis karya atau buku di mana teks tercantum dan pembaca-pembaca pertama. Kalau hermeneutika diterapkan pada teks maka sifat hermeneutika itu sendiri berubah. Hermeneutika tidak mencari makna tersembunyi dibalik teks, melainkan mengarahkan perhatiannya kepada makna obyektif dari teks, terlepas dari maksud subyektif pengarang ataupun orang lain. Menginterpretasikan sebuah teks bukannya mengatakan suatu relasi intersubyektif antara subyektivitas pengarang dan subyektivitas pembaca, melainkan hubungan antara dua diskursus teks dan diskursus interpretasi.

Menurut Ricouer (dalam Sumaryoto, 1999), interpretasi adalah usaha untuk “membongkar” makna-makna yang masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkat makna yang terkandung dalam lipatan-lipatan teks. Sedangkan teks sendiri menurut Ricouer (197:2008) adalah sebuah diskursus yang dibakukan lewat tulisan. Melalui diskursus ini teks bukan susunan tanda bahasa yang membentuk pengertian, tetapi diskursus yang berada pada level semantik kalimat dan berbeda dari semiotika tanda. Hanya pada level kalimat sebuah bahasa bisa merujuk pada sesuatu, sehingga semesta tanda yang bisa dihubungkan dengan dunia di luar bahasa.

Dalam penelitian untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman terhadap obyek yang diteliti, yaitu Sukarno dan konstruksi tentang kekuatan baru (nefo) adalah dengan metode analisa bahasa hermeneutika teks Paul Ricouer. Untuk mencapai pemahaman tersebut, Ricouer (Little John:1996:366) menyatakan tentang “lingkaran hermeneutik” yang terdiri dari penjelasan dan pemahaman.

Penjelasan atau “dekontekstualisasi” bersifat empiris dan analitis yang memberi penjelasan bagi peristiwa-peristiwa dalam pengertian pola-pola yang teramati di antara bagian-bagiannya, atau analisis secara struktural yang dilakukan terhadap suatu teks dengan tidak melihat hubungannya pada dunia yang ada diluar teks. Sedangkan pemahaman atau “konteksualisasi” merupakan analisis dengan melihat rujukan yang ada diluar teks yang disebut sebagai makna kontekstual. Pemahaman sepenuhnya diperantarai oleh seluruh prosedur penjelasan yang mendahului dan mengiringinya.

Mengenai bagaimana interpretasi teks dilakukan Ricouer (2008;220-221), menjelaskan:

Sementara interpretasi kita adalah interpretant pernyataan-pernyataan. Namun interpretan yang kita gunakan, yang dipindahkan dari unit-unit kecil pada unit-unit besar, betul-betul analog dengan pengalihan kaidah penataan dari unit-unit pada level di bawah kalimat kepada unit-unit dalam susunan di atas atau setara dengan kalimat. Dalam kasus strukturalisme struktur fonologis bahasa berfungsi sebagai model pengkodean bagi struktur artikulasi yang lebih tinggi. Sementara dalam kasus kita, unit-unit leksikal-lah yang di alihkan ke ranah pernyataan dan teks. Maka kalau kita betul-betul menyadari sifat analog pengalihan ini, maka kita akan berkata bahwa rangkaian interpretant-interpretant yang terbuka, yang dicangkokkan kepada hubungan tanda dengan obyek, pasti menjelaskan hubungan segitiga obyek-tanda-interpretant dan bahwa hubungan yang terakhir (tanda-interpretant) dapat berfungsi sebagai model bagi hubungan segitiga lainnya yang dibentuk pada level teks. Di dalam segitiga baru itu obyeknya adalah teks itu sendiri, tanda adalah semantic-dalam yang di singkap analisis structural; dan rangkaian interpretant adalah rangkaian interpretasi yang diciptakan oleh komunitas penafsir dan dimasukan ke dalam dinamika teks, sebagai karya makna atas dirinya. Di dalam rangkaian ini interpretant yang pertama berfungsi sebagai tradisi bagi interpretant terakhir, yang merupakan interpretasi dalam pengertian yang sebenarnya.

Dalam tahapan analisis structural, Ricouer merujuk pada semiotika tanda Peirce. Menurut Peirce (dalam Hoed:4:2008), sesuatu yang pertama yang “konkret”- adalah suatu perwakilan yang di sebut dengan representasi (atau *ground*), sedangkan

“sesuatu” yang ada di dalam kognisi di sebut object. Proses hubungan dari representamen ke obyek di sebut semiosis. Dalam pemaknaan proses semiosis belum lengkap karena kemudian ada satu proses lagi yang merupakan lanjutan yang di sebut interpretant. Dengan demikian pemaknaan suatu tanda terjadi dalam bentuk proses semiosis dari yang konkret ke dalam kognisi manusia yang hidup bermasyarakat, karena sifatnya yang mengkaitkan tiga segi, yakni representamen, obyek dan interpretant.

Kalau Peirce melakukan signifikasi tanda, sedangkan Ricoeur tanda-tanda di transformasikan dalam teks yang terdiri dari unit kalimat. Menurutnya, (Bleicher,2003:357), teks yang dipahami Hermeneutika adalah adanya otonomi teks, konteks sosio cultural dan alamat aslinya mengijinkan prakondisi bagi penjarakan interpretor dari teks. Dalam memahami teks, maka antara teks, pengarang dan pengkaji harus dihubungkan dengan realitas masyarakat yang kontemporer, jadi ketiga unsur tersebut harus bersinergi, meskipun ada pemutusan antara teks dan pengarangnya dalam hal subjeknya

Sebuah teks pada dasarnya bersifat otonom, untuk melakukan ‘dekontekstualisasi’, baik dari sudut pandang sosiologis, maupun psikologis, serta untuk melakukan ‘rekontekstualisasi’ secara berbeda didalam tindakan membaca (‘dekontekstualisasi’-proses ‘pembebasan’ diri dari konteks; ‘rekontekstualisasi’-proses masuk kembali kedalam konteks). Otonomi teks sendiri menurut Ricoeur ada tiga macam: intensi atau maksud pengarang, situasi kultural dan kondisi sosial pengadaaan teks, dan untuk siapa teks itu dimaksudkan. Atas dasar otonomi ini, maka yang dimaksudkan dengan “dekontekstualisasi” adalah bahwa materi teks “melepaskan diri” dari cakrawala intensi yang terbatas dari pengarangnya. Teks ini

membuka diri dari kemungkinan dibaca secara luas, dimana pembacanya selalu berbeda-beda. Inilah yang dimaksud ‘rekonstekstualisasi” sebagai contoh, karya ditulis dalam kerangka waktu khusus dan historis dimana pengarangnya hidup dan menulisnya. Maka tidak di ragukan lagi kalau penulis mengungkapkan hal-hal khusus dalam kebudayaan pada zamannya

Sebuah contoh dari interpretasi Riceur adalah studi oleh Barbara Warnic tentang Gettysburg Address (Little John:368:), Dalam penelitian teks, Warnic memberi kesimpulan bahwa cerita tersebut menyamai naratif Kristen, yang sangat menarik bagi orang-orang dalam masyarakat kita. Nilai-nilai lainya dari kebudayaan Amerika juga tertanan dalam teks tersebut. Dengan demikian, pemahaman Warnick secara keseluruhan tentang perkataan itu adalah bahwa ia mengungkapkan nilai-nilai yang merupakan bagian yang melampaui situasi sekarang, dan untuk alasan ini, teks itu relevan untuk generasi demi generasi orang Amerika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat tradisional, seperti yang dikatakan Weber kepemimpinan diperoleh melalui ketokohan karena pemimpin itu adalah orang yang kuat, besar, sakti dan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding dengan orang lain. Masyarakat atau pengikut menganggap bahwa mereka adalah titisan Tuhan yang juga berhak untuk mewariskan tahta kepemimpinan kepada keturunannya. Dalam konteks ini dalam sejarah dunia di kenal tokoh-tokoh penakluk dunia, seperti Alexander Agung, Julius Cesar, ataupun Jenghis Khan. Di samping di kenal dengan kekuatan fisik yang lebih di banding dengan yang lain, juga dikenal ahli dalam strategi peperangan. Kombinasi kekuatan yang dimiliki menjadikan sebagai pemimpin legendaris yang menghiasi sejarah dunia.

Dalam konteks modern, kepemimpinan timbul bukan karena ia orang besar dan kuat, ahli perang, melainkan orang yang mampu memobilisasi, mempengaruhi massa yang kemudian menetapkan berbagai tujuan dalam bentuk reformasi, atau bahkan mengadakan perubahan revolusioner. Keadaan demikian menuntut bahwa untuk menjadi pemimpin dibutuhkan keahlian, yaitu komunikasi. Melalui komunikasi ini, bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan berbagai obyek kemudian mengorganisir, memodifikasi menjadi makna yang di sampaikan dalam pesan-pesan persuasif

Nama-nama seperti, Sukarno, Hitler, Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, Lenin maupun Trotsky adalah contoh pemimpin politik dengan keterampilan komunikasi (retorika) mampu menggugah kesadaran massa untuk

ikut dalam mendukung ide ataupun gagasan sang pemimpin. Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi, seperti di jelaskan Dann Nimmo (1999:42), adalah kepemimpinan timbul dari komunikasi. Melalui Kepemimpinan timbul upaya untuk melakukan penyusunan bersama, pertukaran modifikasi, dan kepercayaan, nilai serta pengharapan bersama atas suatu realitas atau obyek melalui komunikasi.

Misalnya, retorika Lenin mampu membius kesadaran ribuan buruh untuk bergerak mengepung kota St. Petersburg dan mengakhiri kekuasaan Tsar. Atau, presiden Amerika Serikat, Roosevelt, kendati kaki kirinya pincang mampu membangkitkan semangat hidup rakyat Amerika keluar dari depresi sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Presiden John F. Kennedy pernah mengucapkan sebuah pernyataan, “Jangan pernah tanyakan apa yang akan berikan bangsa dan negara padamu, tapi tanyakan apa yang telah engkau berikan pada bangsa dan negaramu”. Pernyataan itu mampu menyihir rasa patriotisme ribuan pemuda Amerika Serikat untuk terlibat mengabdikan dirinya terjun dalam perang Vietnam.

Begitu pula dengan presiden Amerika Sarikat sekarang, Barack Obama, salah satu artikel di Jakarta Post tertulis judul besar, *Obama's oratory: Recalling the sway of Sukarno*. Artikel yang ditulis Al Makin seorang *visitor scholarship* pada Mc Gill University, Canada menyatakan bahwa pidato Obama dalam pelantikan sebagai Presiden Amerika Serikat mengingatkan kembali akan kehebatan retorika Sukano. Seperti Sukarno yang mengidentifikasikan sebagai “penyambung lidah rakyat”, Obama menyatakan bukan sekedar suara Amerika,

melainkan juga perwakilan dari suara dunia. *"We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus - and nonbelievers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this Earth."*

Pada awalnya, para pemimpin ini adalah karena posisinya yang dimiliki dalam struktur sosial atau organisasi. Legitimasi yang di dapat karena aturan-aturan yang telah diterapkan dalam struktur sosial. Di luar dari struktur sosial itu, pemimpin ini tidak mempunyai wewenang maupun otoritas yang mengikat, seperti kebanyakan yang merupakan orang biasa, oleh Nimmo (1999:46) di sebut sebagai pemimpin organisasi. Sedangkan Weber (dalam Haga Maran:2000) menyebut sebagai otoritas rasional, melalui pengaturan sistem politik memperoleh legitimasi dari seperangkat peraturan dan prosedur yang telah disepakati bersama. Misalnya, presiden yang terpilih melalui hasil pemilu. Presiden boleh berganti-ganti, tetapi, pemilu sebagai lembaga adalah ketentuan normatif yang tetap.

Berbeda dengan pemimpin kharismatik atau simbolik, kekuasaan yang di dapatkan bukan karena tradisi, melainkan karena daya tarik luar biasa dari seorang individu- suatu kualitas personal yang luar biasa hebat, yang secara populer dihubungkan dengan individu –individu tertentu. Para pengikut mereka mengerti pemimpin yang karismatik sebagai pribadi-pribadi yang ditakdirkan memiliki visi yang luar biasa. Pemimpin simbolik, menurut Klapp (dalam Nimmo,1999) adalah kepemimpinan simbolik bekerja pada massa dan khalayak sebelum, tanpa , dan tidak dapat dihalangi oleh organisasi.

Dengan kemampuan mengelola pesan terhadap suatu masalah atau isyu, pemimpin simbolik bertindak sebagai aktor dalam setting dramatik untuk menyederhanakan suatu fenomena yang semula rumit, kompleks dan mengawatirkan menjadi suatu yang mudah dipahami, memberi pemecahan terhadap suatu masalah dan menetapkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam keadaan tertentu, apabila fenomena yang berkembang bertentangan dengan cita-cita idealismenya, pemimpin simbolik melalui pengaruhnya membuka kepentingan-kepentingan tersembunyi dibalik suatu fenomena tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh Sukarno, sebagai pemimpin dalam mengkonstruksi gagasan, pesan atau simbol, membongkar struktur diskursif¹ yang dikembangkan oleh dunia barat. Misalnya, dalam pembangunan ekonomi yang dikembangkan oleh dunia barat, kenyataannya sarat dengan praktek-praktek hegemoni terhadap negara berkembang. Dalam kaitan ini, Sukarno pernah melontarkan slogan yang sangat terkenal, yaitu “*go to hell with your aid*”, sebagai bentuk penolakan terhadap bantuan luar negeri yang disertai dengan syarat-syarat tertentu.

Begitu pula dalam tatanan politik internasional, Bung Karno mengecam apa yang dituduhkan oleh Menteri luar negeri Amerika Serikat J.F. Dulles yang menyatakan “*Neutrality is immoral* “. Sebagai tanggapan terhadap tuduhan tersebut, dikatakannya, “bahwa pembagian dunia di dalam dua blok yang bertentangan tidak nanti akan membuka jalan buat persatuan umat manusia”

¹ Eriyanto, *Analisa Wacana*, LKIS, Yogyakarta, 2008.h.75

Pecahnya dua blok tersebut bermula, ketika berakhirnya perang dunia ke-II, praktis disusul dengan pembagian Eropa menjadi dua bagian. Bagian barat dibawah hegemoni Amerika dan sekutunya, bagian timur dibawah Uni Soviet. Sebagai akibat dari bipolarisasi dua kekuatan, masing-masing blok melakukan “politik pembendungan”. Untuk mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet di Eropa Barat, Amerika melancarkan program “*Marshal Plan*”. Melalui politik pembendungan itu Amerika Serikat menjalin persekutuan dengan sejumlah negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam membendung ekspansi komunis, di Eropa membentuk pakta pertahanan, yaitu NATO, di kawasan Asia Pasifik dengan SEATO.

Begitu pula dengan Uni Soviet, dalam menangkal pengaruh blok barat membentuk aliansi pertahanan yang dikenal dengan Pakta Warsawa, kemudian memberikan bantuan-bantuan kepada negara di kawasan Asia, seperti Korea Utara dan Vietnam.

Bentuk konfrontasi dari dua kekuatan dunia sangat mewarnai percaturan politik internasional pasca perang II. Namun ditengah situasi konfrontasi dua kekuatan itu, tumbuh gagasan baru untuk merubah sistem bipolarisasi tersebut yang dimanifestasikan dalam suatu kekuatan baru. Upaya untuk membangun kekuatan baru, Sukarno kemudian mengkonstruksi suatu gagasan yang dikenal dengan New Emerging Forces (NEFO) –kekuatan baru dunia.

Pada kenyataannya dunia memang terbagi dalam blok-blok kekuatan. Dalam sudut pandang ekonomi, China mengemukakan teori “tiga kekuatan”. Dalam teori tersebut di sebutkan bahwa dunia pertama mencerminkan hegemoni

Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan yang kedua terdiri dari negara-negara China, Eropa Barat, Jepang, Kanada dan Australia, dan kelompok ketiga disebut dengan negara yang sedang berkembang.

Dalam hal ini, Sukarno menolak teori tersebut dan mengemukakan “teori dua kekuatan” Seperti yang dikatakan dalam pidato kenegaraan tahun 1965: “Indonesia tidak menganut teori tiga kekuatan, karena republik Indonesia membagi dunia hanya dua kutub, yaitu kubu *NEFO*, *NEFO* yang revolusioner dan kubu *OLDEFO* yang reaksioner.

Nefo, *New Emerging Forcers* adalah kekuatan raksasa baru yang tumbuh sebagai suatu proses dialektika sejarah yang tak dapat dielakan, Sukarno menyatakan *NEFO* sebagai kekuatan raksasa yang terdiri dari bangsa –bangsa dan golongan-golongan progresif yang hendak membangun satu dunia baru. Dalam pengertian ini, sejarah bangsa bulan lagi milik dari kekuatan bangsa tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk mendominasi bangsa lain, melainkan berkembang dalam kesetaraan untuk saling menghargai satu sama lain.

Sukarno melihat, di satu sisi ada kekuatan lama yang masih bercokol dan ingin tetap mendominasi dunia dengan watak imperialis–kapitlistik dalam memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara yang baru dengan jalan mengadakan tekanan, campur tangan dan intervensi. Sedangkan kekuatan baru adalah negara-negara baru yang ingin mempertahankan kedaulatan dan ingin memperjuangkan keadilan sosial serta menentang penghisapan manusia oleh manusia atau bangsa oleh bangsa lainnya dalam bentuk apapun.

Kekuatan baru adalah negara-negara nasional baru yang lahir karena proses dialektika dari kontradiksi negara-negara kapitalis. Perdamaian dunia tidak terwujud apabila masih bercokol kekuatan-kekuatan lama yang berwatak neo-kolonialis. Dibutuhkan kekuatan baru dalam menghancurkan kekuatan lama. Dalam menggalang kekuatan baru tersebut, Sukarno merencanakan adanya Konferensi NEFO, dimaksudkan untuk mengadakan “*samenbundelling van alle internatyonale revolutionaire krachten*”, atau istilah lainnya adalah “Persatuan Internasional”, gabungan dari pada negara-negara dengan berbagai paham dalam skala dunia, untuk melumpuhkan kekuatan Neo-kolonialisme, kemudian di atasnya dibangun suatu tatanan baru yaitu dunia tanpa imperialisme dan tanpa eksploitasi.

Maka dalam membangun kekuatan NEFO itu, Sukarno mengadakan hubungan internasional secara aktif untuk menggalang kekuatan negara-negara baru, terutama Asia –Afrika dan Amerika Latin. Dalam upaya penggalangan itu, tercatat Sukarno mengandalkam kunjungan luar negeri sebanyak 14 kali, dengan tujuan utama untuk menarik sekutu dan simpatisan baru bagi konsepsi *The New Emerging Force*. Perjalanan ke luar negeri itulah yang dikenal dengan “Safari Berdikari”

Di samping itu dibangun sebuah komunike bersama dengan ditandai dengan berdirinya “poros Jakarta-Peking”, yang kemudian diteruskan dengan “poros Jakarta –Peking-Hanoi-Pyongyang-Pnompenh, yang merupakan poros anti imperiaais. Terbentuknya poros antar negara tersebut, akan memperkuat kedudukan NEFO, yang direncanakan pada tahun 1966 akan mengadakan

Konfeerensi di kenal dengan *Conference Emerging Forces (Conefo)*. Agenda yang terpenting dan monumental yang akan diputuskan dalam Conefo itu adalah “negara –negara yang tergabung dalam NEFO tidak akan membeli produk-produk negara imperilais-kapitalis. Kekuatan NEFO itu pula akan menempatkan Indonesia pada “ Pilar kekuatan ke empat dunia”, dimulai dari Amerika Serikat sebagai pilar pertama, Uni Soviet sebagai pilar kedua, RRT sebagai pilar ke tiga dan Indonesia sebagai pilar ke empat.

Apa yang dilakukan Sukarno adalah membongkar wacana-wacana yang dikembangkan dunia barat yang hegemonik dan cenderung mengekalkan dominasi kekuasaan terhadap negara berkembang. Realitas empirik yang berkembang dalam tatanan internasional adalah suatu tatanan yang tidak seimbang dimana dominasi yang kuat selalu mengendalikan yang kecil dan lemah.

Sukarno, sebagai pemimpin nasional melalui pidato terlibat dalam hubungan sosial bersama dengan massa rakyat untuk mendefinisikan realitas sosial tersebut untuk dimaknai bersama, sehingga terbentuk suatu citra maupun pengertian terhadap realitas tersebut. Strategi “kekuatan baru dunia” adalah simbolisme kondensasi (Nimmo:1999:54) yang dimaknai tidak sekedar ‘berdiri di kaki sendiri” melainkan lebih luas menyangkut eksistensi hidup bangsa dalam percaturan dunia internasional.

Meneliti pidato-pidato Bung Karno dalam mengkonstruksi simbol dalam memberi keyakinan tentang suatu cita-cita bangsa adalah suatu hal yang menarik, apalagi penciptaan itu sebagai perlawanan arus dari suatu *mainstream* kebudayaan yang hendak dimapankan oleh kekuatan yang hegemonik. Tujuan mengkonstruksi

simbol-simbol adalah merangsang orang untuk memberi tanggapan dengan cara tertentu, untuk memainkan peran tertentu, dan mengubah pikiran, perasaan dan pengharapan mereka, lambang politik signifikan memudahkan orang menanggapi. Penciptaan lambang atau simbol dalam komunikasi politik adalah suatu hal yang penting. Sebagaimana lambang signifikan dari pembicaraan politik, kata-kata, gambar dan tindakan komunikator politik merupakan petunjuk bagi orang-orang bahwa mereka dapat mengharapkan sesama warga negara menanggapi lambang-lambang itu dengan cara tertentu yang sudah diperkirakan.

Analisis mengenai komunikator politik dalam bagaimana proses penciptaan lambang ataupun simbol masih jarang dilakukan. Proses di sini diartikan sebagai rangkaian pemaknaan terhadap realitas yang berkembang dan faktor kepribadian komunikator. Oleh karena studi interpretatif tentang komunikator politik dalam penciptaan lambang atau simbol terhadap teks pidato Bung Karno tentang strategi berdikari sebagai langkah pencerahan bagi bangsa Indonesia yang saat ini di landa krisis multidimensional

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengambil fokus pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Sukarno berpengaruh dalam mengungkapkan gagasan-gagasan tentang konstruksi kekuatan dunia baru?
2. Bagaimana pandangan Sukarno tentang Indonesia baik dalam konteks historis secara tekstual dalam pidato-pidatonya.

3. Bagaimana pandangan Sukarno dalam membongkar dominasi Negara maju maju secara tekstual yang dikemukakan dalam pidatonya.

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Tujuannya untuk memperoleh gambaran dan penjelasan analitis dari teks pidato-pidato Bung Karno pada tahun 1959-1966 yang meliputi :

1. Pengaruh kehidupan Bung Karno pada masa kanak, masa muda, masa sebagai pemimpin nasional mempunyai keterkaitan dalam mengkreasikan konstruksi kekuatan dunia baru.
2. Gambaran secara deskriptif Bung Karno tentang konstruksi kekuatan dunia baru secara tekstual yang dikemukakan dalam pidato-pidatonya.
3. Pandangan Bung Karno tentang dunia barat (negara maju) secara tekstual yang dikemukakan dalam pidatonya.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu Komunikasi, yaitu pesan-pesan politik sebagai bagian dari pembentukan komunikasi politik, serta sebagai bukti bahwa suatu penelitian tentang pesan-pesan yang terdapat dalam teks memiliki hubungan dalam hal teori dan metodologi sebagai fenomena komunikasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana pencerahan bagi para pengambil kebijakan negara, hendaknya dalam merumuskan kebijakan ekonomi, politik maupun sosial berorientasi pada kekuatan sendiri, tanpa harus bergantung pada kekuatan luar.

E. Kajian Pustaka

Kajian terhadap komunikator politik, khususnya Bung Karno terhadap tulisan sampai saat ini belum ada, walaupun ada jumlahnya sangat minim. Untuk itu dalam penelitian hendak memberi perhatian terhadap peran komunikator politik dalam mengkonstruksi simbol ataupun lambang dalam mempengaruhi masa rakyat agar dapat mengikuti garis kebijakannya.

Dalam mengkonstruksi simbol, seorang komunikator politik, seperti yang dikatakan oleh Marx bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada ide atau gagasan individu dalam menciptakan dunia sosialnya. Demikian juga dengan Bung Karno, lingkungan masa kecil dan persentuhannya dengan dunia pergerakan mencapai Indonesia merdeka sangat berpengaruh terhadap bagaimana proses penciptaan simbol ataupun lambang politik. Demikian juga pula konstelasi internasional maupun nasional masa kepemimpinannya mempunyai andil bagaimana suatu simbol atau lambang diciptakan.

F. Kerangka Pemikiran dan Teori

Komunikasi politik sering dipahami sebagai jembatan antara komunikasi dengan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya antara komunikasi dan politik menjadi kajian tersendiri. Kalangan ilmuwan melihat bahwa komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki fungsi yang sangat istimewa karena

meletakkan basis untuk menganalisa permasalahan yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik.²

Secara formal obyek komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politik, di samping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat untuk berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik, maka obyek formal komunikasi politik adalah proses penciptaan pesan sehingga tercapai kesamaan makna tentang suatu fakta atau peristiwa politik.

Sebagai komunikator politik, Bung Karno berada pada posisi yang strategis untuk menciptakan pesan ataupun simbol dalam setting politik.

Menurut Dann Nimmo:

Komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika di rangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi³.

Mengkaji komunikasi politik yang dilakukan pemimpin politik, seperti Bung Karno adalah suatu hal yang menarik. Dikenal sebagai proklamator yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan bangsa dan dikenal sebagai orator ulung. Bung Karno seperti yang dikatakan Dann Nimmo tentang teori orang besar adalah orang yang memiliki keinginan, sifat dan kemampuan istimewa muncul sewaktu-waktu dalam sejarah dan ditakdirkan untuk melakukan hal-hal yang besar.

² Deddy Mulyana dan Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosda Karya, Bandung 2008, h.29

³ Dann Nimmo, *Op. Cit.* h. 72

Misalnya, pada saat gagasan tentang berdikari dilontarkan, negara maju sedang mendesak begitu masif suatu ideologi “pembangunan” yang harus dicontoh dan diterapkan terhadap negara berkembang. Bung Karno melakukan pembongkaran terhadap “proyek modernisasi” yang dikembangkan oleh negara barat. Upaya untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, maka strategi yang paling jitu dilakukan negara berkembang adalah dengan menerapkan strategi yang diterapkan oleh negara maju.

Untuk mempercepat laju “modernisasi” negara maju memberi bantuan atau pinjaman negara berkembang. Pada kenyataannya hubungan antara negara maju dengan negara berkembang adalah sebuah ketergantungan. Negara maju yang dipahami sebagai negara *center* akan selalu melakukan dominasi maupun hegemoni untuk mendapatkan keuntungan ekonomis maupun politis terhadap negara berkembang, yang di sebut sebagai negara *phery-phery*.

Dalam perspektif ini, Bung Karno membongkar agenda tersembunyi yang menyebut ideologi pembangunan yang dikembangkan ala barat sebagai *neo-kolonialisme* (penjajahan baru). Hal tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa akibat dari perang dunia II adalah lahirnya negara-negara nasional baru sebagai hasil kontradiksi dari kapitalisme. Di pihak lain, kapitalisme melakukan reformasi diri dalam bentuk-bentuk perbaikan sistem produksi, efisiensi cara kerja, perbaikan distribusi barang dan reorganisasi tenaga kerja serta propaganda yang lebih menarik. Reformasi kapitalisme ini menghasilkan imperium baru yang berbentuk “neo-kolonialisme”.

Kekuatan-kekuatan yang dimiliki korporasi secepat yang bergadangan tangan dengan lembaga keuangan dunia, seperti World Bank, maupun IMF pada ujungnya yang menyebabkan hegemoni, monopoli, bahkan kalau ada negara yang tidak mematuhi rejim kebijakan dari “*neo-kolonialisme*” maka tidak segan-segan, rejim itu akan mengintervensi kedaulatan negara tersebut secara tidak riil. Dengan cara, misalnya, melemahkan mata uang negara bersangkutan, atau mengganti penguasa lama dengan penguasa baru yang lebih mudah dikendalikan.

Hubungan antara pemimpin dengan pengikut di tandai dengan adanya komunikasi. Semua kepemimpinan – termasuk kepemimpinan dalam proses opini- adalah transaksi timbal balik dan sirkular di antara pemimpin dan pengikut⁴. Pemimpin dalam melontarkan gagasan, atau merumuskan suatu tujuan merupakan upaya untuk memperluas maupun memperkuat pengaruhnya di antara pengikut.

Gagasan atau rumusan tujuan adalah produksi pesan, dalam kaca mata ilmu sosial masih berada dalam wilayah prateoritis atau belum terstruktur secara simbolis.⁵ Oleh karena cara bertindak dan berperilakunya belum terstruktur, jadi tak bisa diterima begitu saja sebagai benar apa adanya sebagaimana diinginkan oleh positivisme. Maka dunia kehidupan ini tak dapat diketahui melalui observasi seperti dalam metode -metode ilmu alam, melainkan cara khas tertentu. Yaitu pemahaman.

⁴ *Ibid*, h.41

⁵ Elvinaro Ardianto & Bambang Q, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007, h.130

“Apa yang ingin ditemukan dalam dunia sosial itu terutama bukan kausalitas yang niscaya, melainkan makna. Oleh karena itu, tujuan ilmuwan sosial mendekati wilayah observasinya adalah memahami makna. Dalam hal ini seorang ilmuwan sosial tidak lebih tahu daripada para pelaku dalam dunia kehidupan itu. Oleh karena itu dengan cara tertentu ia harus masuk ke dalam dunia-kehidupan itu. Untuk menjelaskannya, ia harus memahami. Untuk memahaminya, ia harus dapat berpartisipasi ke dalam proses menghasilkan dunia-kehidupan itu. Akhirnya partisipasi itu mengandalkan bahwa ia sudah termasuk ke dalam dunia kehidupan itu⁶.

Hermeneutika menegaskan bahwa fenomena khas manusia adalah bahasa, dan karena itu memahami manusia dapat dimulai dari bahasa. Hal ini karena obyektivitas dari kesadaran manusia akan kenyataan. Bahasa mencerminkan realitas yang dialami si penutur, sekaligus apa yang dipikirkan oleh penutur itu.

Dalam komunikasi politik terdapat anggapan bahwa “politik adalah pembicaraan “. Pembicaraan tersebut menggunakan lambang-lambang tertentu demi tujuan dan kepentingan politik, baik lambang verbal ataupun lambang nonverbal.

Pidato Bung Karno adalah bahasa politik yang sarat dengan tujuan dan kepentingan yang disampaikan baik secara verbal maupun non verbal. Untuk itu perlu pemahaman secara terstruktur terhadap isi teks pidato Bung Karno sehingga didapatkan pemahaman secara menyeluruh, terpadu dan komprehensif.

G. Metodologi

a. Metode Penelitian

⁶ *Ibid*, h.34

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berparadigma holistik induktif, menggunakan strategi interpretatif dan teknik hermeneutika.

b. Subyek Penelitian

Bahan yang dikaji adalah dokumen yang berupa teks pidato Bung Karno mulai dari tahun 1959 sampai 1966, khususnya pidato kenegaraan yang di sampaikan pada saat perayaan proklamasi 17 Agustus .

c. Teknik Analisa Data

Data dianalisis dengan pendekatan interpretatif yang diadopsi dari tiga langkah yang dilakukan oleh Ricoeur yaitu yang berlangsung dari penghayatan atas simbol-simbol ke gagasan tentang “berpikir” dari simbol-simbol. Langkah pertama, langkah simbolik atau pemahaman dari simbol ke simbol, Langkah kedua, adalah pemberian makna oleh simbol serta ‘penggalian’ yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah yang benar-benar filosofis, yaitu berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya.

Hasil akhir penafsiran disajikan dalam bentuk konstruk-konstruk bahan bahasan. Pembahasan secara formal terhadap hasil penafsiran itu sendiri oleh karenanya lebih merupakan proses penjabaran pemahan hasil penafsiran terhadap konstruk-konstruk tipe pesan-pesan dari komunikasi politik.

Analisis untuk menjawab penyebab dari realitas tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Marx, bahwa sumber daya untuk kebutuhan hidup yang tersedia di dunia ini sangat terbatas, karena keterbatasan-keterbatasan itulah tumbuh penguasaan bagi yang kuat dengan jalan menjajah dan menghisap terhadap yang lemah.

Analisis untuk menjawab penyebab dari realitas tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Marx, bahwa sumber daya untuk kebutuhan hidup yang tersedia di dunia ini sangat terbatas, karena keterbatasan-keterbatasan itulah tumbuh penguasaan bagi yang kuat dengan jalan menjajah dan menghisap terhadap yang lemah.

Oleh Foucault, wacana tentang “pembangunan”, *development*, ataupun *modernisme* adalah struktur diskursif yang sengaja dibangun oleh negara –negara maju untuk terus melanjutkan dominasi maupun hegemoni mereka terhadap negara berkembang. Melalui struktur diskursif ini bagaimana kebudayaan berpikir di arahkan, dibentuk oleh suatu wacana, bahwa pembangunan harus dilakukan oleh negara berkembang untuk mengatasi berbagai keterbelakangan maupun kemiskinan .

tanpa Sebenarnya, pertarungan dua kekuatan itu kalau disederhanakan merupakan bentuk pertarungan dua pemikiran teoritis antara kubu Liberal dengan kubu Marxis

Bagi Bung Karno Pangkalan-pangkalan militer didirikan di pesisir Samudera Hindia sampai pedalaman di Jepang.

Istilah “pembangunan” atau *developments* yang diwacanakan oleh negara maju begitu menonjol setelah berakhirnya perang dunia II. Berakhirnya kolonialisasi, membuka peluang bagi negara berkembang yang baru merdeka untuk membenahi nasib dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan menjadi kata kunci untuk segera keluar dari ketertinggalannya untuk mengejar kemakmuran.

Tetapi dalam melaksanakan pembangunan, bagi negara berkembang merupakan suatu dilema. Di satu sisi, mengenai pilihan-pilihan strategi seperti apa yang akan diambil. Di sisi lain adalah keterbatasan akan modal, pengetahuan, teknologi maupun sumber daya manusia.

Untuk itu ditempuhlah kebijakan-kebijakan pragmatis yang menjadi pegangan negara berkembang untuk melakukan penerapan yang sama persis terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh negara maju. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk sesegera mungkin keluar dari bayang –bayang pahit kemiskinan akibat proses penjajahan yang begitu panjang.

Sebagai realisasi dari “proses peniruan”, maka konsep Rostow menjadi trend untuk diterapkan dalam model pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konsepnya, Rostow mengemukakan tahapan-tahapan pertumbuhan yang dilalui oleh negara-negara modern. Tahapan-tahapan tersebut adalah, masyarakat tradisional, prakondisi untuk tinggal landas, tinggal landas (*take off*), masa menjelang kedewasaan, dan abad konsumsi massa yang tinggi.

Konsep Rostow ini pada masa Orde Baru begitu trend, bahkan Presiden Soeharto pada waktu itu selalu menyebut tentang tahapan tinggal landas yang segera di lalui oleh bangsa Indonesia. Tinggal landas, seperti yang dikatakan Rostow adalah suatu interval dimana bagian yang lama dari sistem ekonomi dan hambatan terhadap pertumbuhan yang mantap akhirnya dapat di atasi, dan pertumbuhan suatu kondisi yang normal bagi seluruh masyarakat. Dalam tahap tinggal landas ini jelas terlihat bahwa masalah akumulasi modal yang dimungkinkan dengan peningkatan tabungan dan investasi adalah penting.

Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu dilakukan industrialisasi secara besar-besaran sebagai instrumen utama, sehingga dimana-mana digalakan pembangunan dalam skala besar, waduk-waduk hidroelektrik, paberik baja, paberik barang lainnya. Keterbatasan modal untuk membiayai proyek-proyek besar tersebut bukan masalah, karena negara-negara kaya siap untuk memberi bantuan atau pinjaman untuk menjaga kestabilan pertumbuhan yang mantap. Upaya itu pun terlihat, pada era-80-an, Indonesia tampil sebagai “macan

Asia” dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang memungkinkan adanya tabungan dan investasi yang tinggi

Di samping menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita, teori pembangunan ini juga mempunyai asumsi, bahwa kalau sudah terjadi peningkatan pada suatu sektor, selanjutnya akan terjadi apa yang disebut sebagai efek menetes ke bawah, atau *trickle down effect*.

Menurut Daniel Lerner menyebut “pembangunan “ sebagai suatu ideologi internasional bermula dari suatu komunikasi: yakni pidato Presiden Truman kepada Kongres AS. Dalam pidatonya, Truman, menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan melaksanakan suatu program baru yang tangguh berupa bantuan teknik dan keuangan bagi negara –negara miskin. Di kemudian hari, dunia mengenal apa yang disebut sebagai Marshal Plan yang merupakan program bantuan AS untuk kembali merevitalisasi Eropa yang hancur sebagai akibat perang dunia II. Kebijakan tersebut kemudian berlanjut yang diikuti oleh negara maju lainnya untuk membantu mengentaskan kemiskinan negara berkembang.

Kebijakan yang ditempuh negara maju terhadap negara berkembang bukan tanpa kritik yang dipelopori oleh para intelektual Amerika Latin, seperti Andre Gunder Frank, Furtado, Cardoso dan lain-lain mengedepankan apa yang dikenal dengan teori dependensi. Secara umum yang dimaksud dengan dependensia adalah keadaan dimana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi di negara berkembang , seperti keputusan

mengenai harga komoditas, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh institusi di luar negara bersangkutan.

Dalam perspektif lain, Sukarno, Presiden pertama RI melakukan pembongkaran terhadap selumbang-selumbang ideologis atas nama “pembangunan”. Bung Karno menyebut model pembangunan yang dikembangkan ala barat sebagai *neo-kolonialisme* (penjajahan baru).

Bung Karno sebagai seorang komunikator politik menggariskan suatu kebijaksanaan yang mengandalkan pada kekuatan sendiri, yang ia namakan sebagai strategi “berdikari”. Bahkan, ketika ada tawaran pinjaman atau bantuan dari negara lain, tetapi disertai dengan persyaratan-persyaratan yang memberatkan, Bung Karno dengan lantang meneriakan, “*go to hell with your aid*”.

Studi ini akan menggunakan paradigma interpretatif (fenomenologis), khususnya pendekatan hermeneutika terhadap teks-teks pidato Presiden Sukarno pada tahun 1959-1966. Sebagai seorang komunikator politik bagaimana pengelolaan pesan dilakukan dalam membongkar suatu paradigma, dan kemudian menawarkan alternatif paradigma baru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Struktural

Dalam penelitian akan di bahas secara umum dan mendalam bagaimana hasil penelitiannya yang dilakukan sekaligus penjelasannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa penelitian adalah studi interpretatif terhadap teks pidato Soekarno mengenai konstruksi "kekuatan baru". Untuk mendapatkan penjelasan dan pemahaman secara menyeluruh terhadap teks, metode yang digunakan adalah hermeneutika dengan model analisis bahasa Paul Ricoeur.

Dalam analisa tekstual Ricouer, terdapat dua tahapan penafsiran atau lingkaran hermeneutika), yaitu penjelasan dan pemahaman atau *dekontekstualisasi* dan *kontekstualisasi*. Hermeneutika sebagai metode pemahaman tidak mendekati data secara deduktif, yaitu suatu proses pemahaman dari kaidah/konsep ke empiric, atau sebaliknya secara induktif, yaitu proses pemahaman dari empiric ke kaidah/konsep atau generalisasi. Hermeneutika yang *open mindedness* sifatnya. (Sumaryoto:2009:142) mempunyai peluang untuk bisa masuk ke berbagai kajian penafsiran, sehingga dengan sendirinya, hermeneutika menawarkan metode pendekatan tersendiri yang di sebut dengan metode abduktif, yaitu suatu proses pemahaman yang bersifat dialogis antara obyek yang dikaji dengan pemerhati atau penafsir, dari dialog akan terbangun suatu pemahaman.

Melalui proses yang dialogis, penafsir dalam mendekati data atau teks berangkat dengan berbagai asumsi, prakonsepsi, prediposisi dan prasangka yang

melekat dalam diri penafsir. Kendati menempatkan subyektifitas penafsir sebagai suatu yang otonom, tetapi dalam menentukan asumsi, prakonsepsi, prediposisi dan prasangka tidak berangkat dari nol, melainkan berpijak pada seperangkat teori yang menjadi pemandu untuk membuat kategori-kategori, sehingga dapat ditentukan tema-tema kunci yang relevan dengan konteks penelitian.

Melalui pendekatan teori konstruksi social, dikaitkan dengan teks "Konstruksi Kekuatan Baru" Soekarno dan proses dialog yang intensif antara peneliti dengan obyek yang dikaji, maka dapat ditentukan kategori-kategori serta penentuan tema-tema kunci sebagai berikut:

Gambar IV **Kategori Dan Tema Konstruksi Kekuatan Baru**

Teori Konstruksi Berger & Luchamm Eskiernalisasi	Kategori	Tema
	a. Dinamika internal: - Biografi kehidupan Soekarno - Pandangan tentang Indonesia	- Biografi Soekarno - Persatuan nasional - Revolusi - Berdikari
	b. Dinamika eksternal : - Pandangan tentang tatanan politik internasional	- Neo kolonialisme/ Oldefo
Obyektivasi	Signifikasi	- New Emergi Forces (Nefo)
Internalisasi	Hasil kontruksi	- Tata Dunia Baru Pax Humanica

Pemilihan tema-tema kunci di atas, Persatuan Nasional, Revolusi, Berdikari, Neo-kolonialisme, New Emerging Forces, dan Pax humanica adalah seperangkat data yang merupakan prakonsepsi untuk merekonstruksi kembali teks sehingga di dapatkan suatu pemahaman utuh pemikiran Soekarno tentang konstruksi kekuatan baru.

Mengikuti hermeneutika interpretative Paul Ricoeur, dalam analisis awal atau yang di sebut dengan penjelasan (*dekontestualisasi*) harus menggunakan analisis structural, Berpijak pada analisis structural Ferdinand D. Sausurre, teks pidato Soekarno adalah struktur yang tidak statis, melainkan sesuatu yang dapat sesuatu yang dapat bertransformasi karena konsep struktur bukan hanya "terstruktur, suatu keadaan, tetapi "menstruktur", sesuatu yang berproses (Hoed:2008:27). Dengan demikian, sebuah struktur dapat berkembang baik dari dalam maupun akibat pengaruh dari luar. Berkembang dari dalam di sebut sebagai relasi intra struktur, dan realisi semacam ini disebut dengan relasi *sintagmatik*, sedangkan relasi antar komponen suatu struktur dengan entitas di luar struktur yang bersangkutan di sebut dengan *paradigmatic*.

Atau dengan kata lain , sintagmatik berarti makna *denotative*. Makna denotasi adalah makna yang wajar, yang asli, yang muncul pertama, yang diketahui para mulanya, makna sebagai adanya, makna sesuai dengan kenyataan. Hubungan sintagmatik adalah hubungan ujaran dalam suatu rangkaian dan bersifat *in praesentia*, yakni elemen-elemennya hadir secara factual dalam rangkaian ujaran itu. Sedangkan hubungan paradigmatic merupakan hubungan yang bersifat *in absentia*, yaitu hubungan berlangsung secara asosiatif atau konotatif. Makna konotasi adalah makna

denotative telah memperoleh tambahan perasaan tertentu, emosi tertentu, nilai tertentu dan rangsangan tertentu pula yang bervariasi dan tak terduga pula (Parera, 2005: 99). Konotasi dalam istilah Ricoeur (2008:18-245) adalah inovasi *semantic* yang merupakan bagian dari tatanan predikatif (kesesuaian baru) sekaligus tatanan leksikal (paradigmatic). Dengan demikian, metafora merupakan konstruksi imajinatif berbahasa dalam melahirkan makna baru.

Wilhelm Dilthey (dalam Palmer:2009:45) bahwa untuk menafsirkan ekspresi lidup manusia, apakah itu berkaitan dengan hukum, karya sastra, maupun kitab suci membutuhkan tindakan pemahaman historis. Untuk itu dalam rekonstruksi makna sebuah teks, istilah Ricoeur dengan reproduksi teks, maka perlu memahami hubungan antara teks itu dengan pemroduksi, yakni seluruh mentalitas dan perkembangan pemroduksi teks itu dalam perspektif historis. Maksudnya, untuk mengikuti alur pemikiran Soekarno tentang Konstruksi Kekuatan Baru, perlu penjelasan secara deskriptif historis sejarah kehidupan Soekarno serta suasana lingkungan yang melingkupi ketika produksi teks itu dilakukan, sehingga di dapatkan suatu kualitas pemahaman lebih komprehensif. Untuk itu sebelum di lakukan analisa structural terhadap teks, perlu penjelasan terhadap latar belakang kehidupan Soekarno:

4.2. Latar Kehidupan Soekarno

4.2.1. Masa Kanak-Kanak

Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Lawang Seketeng, Surabaya. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo, seorang yang berasal dari Jawa dan masih keturunan Sultan Kediri. Nenek dari Ibu Sukemi, adalah pejuang puteri pengikut Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Idayu Nyoman Rai, berasal dari

Bali, keturunan Kasta Brahmana. Selain itu ibunya juga masih memiliki darah bangsawan, karena Raja Buleleng adalah pamannya yang pernah mengobarkan perang *puputan* dengan Belanda.

Soekarno merupakan anak kedua dari pernikahan Sukemi Sosrodiharjo dengan Idayu Nyoman Rai. Anak pertama pasangan ini bernama Sukarmini, yang dua tahun lebih tua dari Soekarno. Nama kelahiran Soekarno, adalah Kusno. Akan tetapi karena pada usia kanak -- kanak sering sakit – sakitan namanya diganti menjadi Soekarno.

Pergantian nama dari Kusno menjadi Soekarno, tidak lepas dari kenyataan bahwa Sukemi, yang berlatar belakang theosof dan penggemar wayang, sangat kagum pada tokoh Karna dari kisah Mahabrata. Karna merupakan tokoh yang setia pada kawan – kawan dan setia kepada keyakinannya. Sehingga mengganti nama Kusno menjadi Karna. Sukemi berharap kelak anak lelakinya iri akan menjadi pahlawan yang setia kepada kawan – kawan dan keyakinannya, seperti tokoh Karna. (Cindy Adam:37:1988)

Secara kosmologis, ibu Idayu menandai puteranya yang lahir pada saat matahari terbit dengan sebutan Putra Sang Fajar. Menurut kepercayaan yang menjadi tradisi masyarakat Bali, yang diyakini oleh Ibu Idayu, bahwa bayi yang lahir pada terbitnya Fajar itu, akan menjadi Cahaya bagi bangsanya.

Tatkala Soekarno di Surabaya dan belajar di HBS, beliau kost di rumah Cokroaminoto yang ketua PSII, wajar senantiasa dikunjungi oleh tokoh – tokoh pergerakan, seperti Senaun, Darsono, Dr. Setiabudi selain tokoh – tokoh dari kalangan PSII sendiri. Soekarno berusaha turut mendengarkan pembicaraan tokoh – tokoh politik itu. Soekarno juga banyak membaca, termasuk buku – buku sosial

politik, selain buku pelajaran sekolah. Maka dapat dikatakan, selama tinggal di rumah Cokroaminoto, Soekarno menjalani beberapa tahap pengemblengan.

Soekarno merasa kesepian ketika kost di rumah Cokro. Sebagai kompensasinya Soekarno mencari cara lain, yang dirasa bisa membawa ketenangan jiwa. Rasa ketenangan itu ditemukannya dalam perpustakaan, dimana di dapat bertemu – dalam dunia pemikiran – dengan tokoh – tokoh dunia, melalui buku – buku mereka seperti :

...tapi berhadapan dengan Gladstone dari Britania, dengan Sidney dan Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris, aku berhadapan dengan Mazzini, Cavour dan Garibaldi dari Italia, aku berhadapan dengan Karl Marx, Friedrich Engels dan Lenin dari Rusia dan aku ngobrol dengan Jean Jacques Rousseau, Aristide Briand dan Jean Jaures ahli Pidato terbesar dalam sejarah Perancis."(Cindy Adam:54: 1988)

Sebagai pemuda yang tinggal di rumah tokoh pemimpin gerakan yang cukup berpengaruh di masa itu, Soekarno mempunyai kesempatan untuk bertemu dan mendengarkan para tokoh pergerakan nasional itu berdiskusi. Soekarno mendengarkan dan sekali – kali bisa berdialog dengan Alimin dan Muso yang beraliran Marxis. Soekarno juga bertemu dengan Dr. Setiabudi, seorang keturunan Indo – Belanda yang nasionalis. Perkenalan dengan para tamu Cokroaminoto dari berbagai aliran politik dan ikut mendengarkan mereka berdiskusi. Menyebabkan Soekarno dari sejak usia muda sudah merasa cinta tanah air. Setapak demi setapak rasa cinta tanah air menjiwai sikap hidupnya, dan berkobar menyala – nyala, walau menyadari bahwa tidak ada alasan bagi pemuda Indonesia menikmati kesenangan dengan melarikan diri kedalam dunia khayal. Apalagi mengingat penghinaan anak – anak Belanda yang pernah memanggilnya dengan sebutan *Inlander*.

Marxisme, bagi Soekarno, tidak dapat diandalkan untuk menjadi dasar pemersatu bangsa. Menurut Soekarno, Marxisme hanya dapat digunakan sebagai pisau analisa, tapi bukan sebagai azas suatu pergerakan. Sementara masyarakat Indonesia yang sangat religius, tidak akan dapat menerima falsafah Materialisme dan Marxisme. Walaupun pada saat itu (1918) Soekarno mungkin belum sampai kepada kesimpulan yang tegas mengenai imperialisme, namun Soekarno tidak mengetahui sejarah panjang imperialisme, terutama imperialisme Belanda di Nusantara. Perjalanan hidup Soekarno sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi rakyat Indonesia yang sangat menderita akibat penghisapan oleh sistem Imperialisme – kolonialisme Belanda.

Soekarno, yang sejak tahun 1918 sudah berdialog dengan tokoh – tokoh pergerakan kemudian merealisasikan gagasannya ke bentuk Tri Koro Darmo. Sebutan Tri Koro Darmo yang berarti ‘tiga tujuan suci’ dengan maksud: Kemerdekaan Politik, Kemerdekaan Ekonomi, Kemerdekaan Sosial. Pada dasarnya Tri Koro Darmo adalah Organisasi sosial bagi para pelajar seusia Soekarno.(Cindy Adam:57:1988) namun oleh Soekarno organisasi ini diberi isi untuk memerdekakan Indonesia. Perhatian Soekarno terhadap organisasi sangat besar, selain dia juga menulis di Koran “Sarekat Islam” yang bernama “Oetosan Hindia”, dengan nama samaran Bima.

Pada waktu berlangsungnya Kongres Yong Java tahun 1920 di Bandung, Soekarno hadir mewakili Yong Java Surabaya, dan untuk pertama kalinya beliau menemukan istilah ‘Indonesia’. Kata Indonesia tersebut digunakan sebagai nama Perusahaan Asuransi Milik Dr. Ratulangi, yang terletak di Jalan Braga.(Soekarno & Pemuda:202:1987)

Kelak bersama – sama mahasiswa “Perhimpunan Indonesia” yang belajar di Eropa, Soekarno merundingkan nama Indonesia sebagai Bahasa Politik, yaitu nama satu bangsa di wilayah Hindia Belanda. Konsep ini kemudian dimatangkan dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

4.2.2. Masa Muda

Soekarno telah lama menganalisa tentang keadaan dan kondisi umum Rakyat Indonesia. Hasil pembicaraannya dengan seorang petani bernama Marhaen di Cigareleng- Bandung, memperkuat keyakinannya bahwa hasil analisa yang telah berkali – kali dia lakukan itu mengandung kebenaran. Peristiwa Cigareleng di tahun 1921 itu. Merupakan penamaan dari hasil analisa Soekarno mengenai keadaan masyarakat.

Adanya perbedaan kondisi antara masyarakat Eropa dan Indonesia, dengan sendirinya menghasilkan struktur masyarakat yang berbeda. Kapitalisme di Eropa telah menumbuhkan struktur masyarakat yang liberal. Kapitalisme di Eropa telah menghasilkan pertentangan kelas antara kaum kapitalis dengan kaum buruh. Sistem produksi di Eropa telah membawa akibat terjadinya pemisahan antara produksi dengan buruh sebagai tenaga kerja. Sedangkan didalam masyarakat Indonesia sebagian besar rakyatnya – seperti yang diwakili oleh sosok Marhaen – adalah pemilik alat produksi. Akan tetapi tanah garapannya sebagai alat produksi – sangat sempit, sehingga produk yang dihasilkan lewat tanah garapan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Walau sebagai pemilik alat produksi, akan tetapi kadarnya sangat minima, maka umumnya rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Minimnya pemilikan atas tanah garapannya adalah karena sistem

penjajahan yang merampas tanah rakyat, dengan sisa yang amat sedikit. Akibat sistem penjajahan itu, maka pada masyarakat Indonesia, yang tampil sebagai perlawanan adalah Kesadaran kelas, dan bukannya Pertentangan kelas sesama rakyat.

Oleh karena itu, pidato Soekarno dinilai mempolitisir "issue Perang Pasifik" untuk menghasut rakyat, dan hasutan itu langsung melanggar Undang – undang Nomor 153 bis dan ter (undang – undang yang membenarkan penguasa menangkap seseorang yang dicurigai menghasut orang banyak).

Pada malam harinya, setelah rapat umum tersebut, Soekarno dan Gatot menginap di rumah Suyudi, Ketua PNI Yogyakarta. Rupanya pihak Belanda sudah membuntuti Soekarno, sekitar jam 4 pagi, tanggal 30 Desember, rumah Suyudi digedor oleh polisi, serta menggeledah seluruh ruangan, dan terdengar suara yang galak:

"Inikan ruman tempat pemimpin revolusioner meng..."

"Ya, inilah tempatnya," suara yang lain lebih garang.

"Kenung rumah ini!" suara yang pertama tadi, terdengar jelas oleh Soekarno yang menginap di sebuah kamar. (Cindy Adam: 129: 1988)

Ketika Soekarno sudah berhadapan dengan seorang Belanda, berpangkat inspektur, maka si Belanda itu berkata: "atas nama Sri Ratu, saya menahan tuan!".

Penangkapan terhadap Soekarno dan beberapa pimpinan PNI diketahui kemudian, bahwa itu sudah lama sebelumnya di persiapkan, bahkan dimana selnya akan dibikin, juga telah diatur. Beberapa bulan sebelum penangkapan itu, Soekarno juga sudah mendapat sinyal dari kawan – kawan seperjuangan di Eropa, bahwa pihak Belanda sudah mempersiapkan penangkapan terhadap dirinya. Peringatan dari kawan – kawan di Eropa itu memang disadari oleh Soekarno, dan dia juga sangat berterima kasih atas simpati dari kawan – kawan pecinta tanah air.

Selain dari Soekarno dan Gatot Mangkupraja, juga Maskun dan Supriadinata dan dimasukkan ke rumah penjara Banceuy. Mereka ditempatkan pada sel yang berlainan, sementara keadaan sel amat kotor, selain sempit dan tidak berjendela. Sel yang ditempati Soekarno No. 5 lebarnya hanya 1,5 meter dan panjangnya 2 meter. Memang rumah tahanan Banceuy dikhususkan untuk tahanan kriminal kelas berat dan tahanan politik. Khusus untuk tahanan politik disediakan velbed untuk tempat tidur. (Sel No. 5 Soekarno di Banceuy masih tersisa sampai sekarang, walau bahagian lain dari penjara itu sudah menjadi pertokoan).

Empat puluh hari lamanya Soekarno di asingkan secara keras, tidak boleh dikunjungi siapapun, termasuk tidak boleh dikunjungi oleh istrinya, ibu Inggit. Kesepian dalam sel selama 40 hari itu, menyebabkan Soekarno berupaya menguasai diri agar tidak sampai terkena sakit jiwa. Cara Soekarno mengatasi siksaan dari keterpencilan itu, berupaya berkontemplasi, selain juga memahamkan alam – semesta dan alam – kecil, serta keberadaan makhluk ciptaan Tuhan, dari yang berbentuk manusia sampai kepada bentuk nyamuk, semut, cecak, dan lainnya. Di tempat pengasingan inilah Soekarno mengulang kaji apa yang pernah diajarkan oleh Pak Sukemi – bapaknya - tentang *Tat Twan Asi*. Soekarno coba memahami cecak, mempelajari perilakunya dan coba mendengar suara cecak, untuk memahami apa arti suara itu. Pada waktu di malam larut, pada saat orang tertidur pulas, Soekarno membuka telinga – hatinya dan mendengar suara burung perkutut diatas atap penjara. Padahal penjara Banceuy terletak di tengah kota yang tidak ada burung perkutut di sekitarnya. Namun Soekarno sering mendengar bunyi burung perkutut itu.

Pada satu malam, di puncak kesepian yang sangat menyiksa, Soekarno (Cindy Adams,135:1988).merasakan ada satu perasaan ganjil yang menyusup ke dalam

dirinya. Seakan – akan tangan kanannya membesar, semakin besar, malah lebih besar dari selnya sendiri. Tapi kemudian perlahan – lahan menyusut lagi dan kemudian menjadi normal kembali. Tangan kanan adalah lambang kekuatan, namun pada saat itu Soekarno tidak mengerti apakah ini pertanda untuk hari depannya.

Berita tentang akan diadilinya Soekarno, telah tersebar luas, sejak Pidato Gubernur Jenderal di pembukaan sidang Dewan Rakyat (Volks Raad) pada pertengahan bulan Juni 1930. Dalam pidato itu, Gubernur Jenderal telah menetapkan kesalahan Soekarno, sebagai penjahat politik. Berita tentang akan diadili Soekarno ternyata jauh lebih meluas, dari apa yang diperkirakan sebelumnya.

Berkaitan dengan akan adanya sidang pengadilan tersebut, Soekarno pun mempersiapkan pembelaannya. Terutama di bidang politik, Soekarno siap mengadakan pembelaan. Namun untuk hal – hal yang berkaitan dengan hukum, maka Soekarno meminta beberapa pengacara. Mr. Suyudi dari Yogyakarta – tuan rumah pada saat Soekarno di tangkap – dipilih menjadi pembela di bidang hukum, sebagai pengacara pertama. Selain itu, Soekarno juga memilih Mr. Sartono, rekan Soekarno sejak Algemene Studi Club yang lama, dan yang belakangan jadi wakil ketua PNI Pusat yang mengurus keuangan Partai. Yang ketiga adalah Sastromulyono, seorang pengacara bersemangat patriotis dari Bandung, dan yang keempat ialah R. Ipek Prawiradiputra. Keempat pembela Soekarno ini menjalankan tugasnya tanpa di bayar, dan mereka semua membiayai sendiri pengeluaran mereka masing – masing.

Selama satu setengah bulan Soekarno Menyiapkan Pembelaan yang kemudian terkenal dengan nama “Indonesia Menggugat”, yang dalam bahasa Belanda disebut “*Indonesische Klaag Aan*” Dalam pembelaan tersebut Soekarno menyajikan praktek –

praktek Kolonialisme yang memelaratkan Rakyat Indonesia. Dalam pledoi yang dibacakan di depan pengadilan kolonial itu,

Dengan pasal – pasal yang sudah dipersiapkan Belanda yang bernama *Landraad* itu pada tanggal 22 Desember 1930 menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada Soekarno. Dan setelah vonis dijatuhkan, Soekarno tidak lagi kembali ke rumah tahanan Banceuy, melainkan langsung dibawa ke rumah penjara Sukamiskin.

Rumah penjara Sukamiskin memberi pengalaman dan pelajaran yang lain bagi Soekarno. Kesan pertamanya di Sukamiskin tidak ada lagi perlakuan yang kejam dari kalangan petugas penjara. Tapi Kemudian Soekarno sadar, bahwa pihak rumah penjara memperlakukan cara yang khusus untuk menyiksa Soekarno, dengan memisahkan Soekarno dengan para tahanan lainnya. Ketika para tahanan lainnya tidak ada lagi di halaman, barulah Soekarno disuruh ke halaman selama setengah jam. Di Izinkannya Soekarno selama setengah jam di halaman, setelah para tahanan lainnya sudah kembali mauk ke ruang tahanan masing – masing, sehingga Soekarno hanya sendirian berada di halaman penjara. Ini memang sengaja oleh pihak penjara, supaya tidak terjadi kontak antara orang – orang tahanan lainnya dengan Soekarno.

Di Penjara Sukamiskin, seperti umumnya narapidana, Soekarno juga diberi pekerjaan. Namun pekerjaan yang diberikan kepada Soekarno, berlainan dengan pekerjaan narapidana yang lainnya. Soekarno diberi pekerjaan tukang cetak dan mensortir kertas, yang ruangan kerjanya berjauhan dengan lokasi kerja para narapidana lainnya. Lokasi percetakan berdekatan dengan kantor kepala penjara, dan pada kerja cetak mencetak ini yang dipekerjakan hanyalah narapidana orang – orang Belanda. Jadi di tempat bekerjanya itu, hanyalah Soekarno sendiri yang bukan orang Belanda. Penempatan Soekarno dipercetakan dan bersama dengan orang – orang

Belanda, diperkirakan oleh pemimpin rumah penjara, agar supaya Soekarno tidak mempengaruhi para narapidana untuk menjadi patriot. Tapi Soekarno, Walau rekan sekerjanya orang Belanda, dengan bangga menjelaskan bahwa ia masuk penjara, bukan karena aksi kriminal biasa, melainkan karena aksi politik.

Soekarno menggunakan berbagai cara untuk bisa mengetahui keadaan diluar penjara. Kiriman nasi yang biasa diantar oleh Bu Inggit, diatur dengan kode – kode tertentu, yang dari setiap kode mengandung arti tersendiri. Dengan cara begini, Pemeriksaan yang ketat dari petugas penjara, dapat diterobos . kode – kode rahasia ini juga di kirim melalui Al Qur'an. Misalnya jika ada terdapat lipatan pada satu halaman sekian, maka artinya angka itu mempunyai makna tersendiri. Ada juga buku lain yang boleh di bawa ke penjara, asal tidak bersifat politik.

Memang Soekarno Memanfaatkan secara maksimal, keterasingan di Penjara Sukamiskin ini dengan membaca buku sebanyak – banyaknya, selain belajar secara alami keadaan pada suasana hening, tanpa siapapun kawan bicara. Di penjara ini pula Soekarno berkesempatan mempelajari Islam secara khusuk, dan bisa memahami pemikiran Nabi Muhammad SAW. Dari mempelajari Islam lewat Buku – buku itu. Di penjara Sukamiskin ini pulalah Soekarno merasa menemukan Tuhan.(Cindy Adam: 158:1988)

Di rumah penjara Sukamiskin ini, Soekarno berkontemplasi menyelami dirinya dan hubungannya dengan dunia, lalu mengambil kesimpulan:

“Aku membiasakan diriku untuk menyadari bahwa cita – cita yang besar datangnya pada saat – saat yang sepi, lalu aku mencoba membuktikan kebenaran dari kata – kata mutiara ‘CITA – CITA YANG BESAR DAPAT MEMBELAH DINDING PENJARA.’ Ketika membangkitkan diri secara mental, aku tidak saja menjadi biasa dengan keadaanku. akan tetapi juga kupergunakan keadaan itu untuk menyusun rencana – rencana dimasa yang akan datang. Aku bahkan dapat berkata, bahwa aku

berkembang dalam penjara. Ketetapan hatiku semakin kuat. Ruang penjara adalah sekolahku."Cindy Adam: 155:1983)

Tatkala Soekarno berjalan melalui pintu gerbang penjara, ia melihat sebuah catatan di gerbang yang berbunyi: "Saya memulai kehidupan baru." Direktur rumah penjara yang mengiringi Soekarno keluar dari rumah penjara Suakmiskin, menanyakan bagaimana pendapat Soekarno tentang kebenaran dari kalimat tersebut. Soalnya, menurut perkiraan Direktur Rumah Penjara, Soekarno akan memulai hidup baru dengan meninggalkan kegiatan seperti masa lalu, yang menyebabkan dia masuk penjara. Namun jawaban Soekarno atas bunyi tulisan yang ditunjuk oleh direktur Penjara amat berlainan. Soekarno dengan suara tegas berkata "Seorang Pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan dan saya meninggalkan penjara dengan pikiran yang sama.(Cindy Adam:159:1988)

Sekeluanya dari penjara, Soekarno bertekad untuk membenahi PNI serta menggalang persatuan kembali. Sayangnya, pada waktu Soekarno keluar dari penjara itu, PNI sudah dibubarkan, dan dinyatakan sebagai partai terlarang oleh penguasa Belanda. Setelah bubar dan dinyatakan 'terlarang', maka oleh Sartono dan kawan-kawan yang lain, yang berada di luar penjara, membentuk partai baru, yang di beri nama "Partai Indonesia", dengan singkatan Partindo. Walaupun program Partindo bersifat revolusioner dengan sikap non-koperasi, akan tetapi partai ini tidak dapat berkembang maju, karena tidak ada tokoh yang menjadi lambang pergerakan.

Walau Soekarno sadar bahwa tugasnya membangkitkan semangat rakyat adalah "Kemauan Tuhan", namun semakin ketatnya pengawasan PID terhadapnya, mengharuskan Soekarno berusaha menghindarinya. Beliau pergi ke sebuah desa

bernama pengalengan di Jawa Barat Selatan, yaitu sekitar bulan Maret Tahun 1933, dimana Soekarno konsentrasi menulis risalah yang beliau sebut judulnya "Mencapai Indonesia Merdeka" (MIM). Isi pokok dari risalah MIM ini adalah, bagaimana cara – cara yang paling mungkin untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan watak penjajahan sebagai thesa, dan watak Rakyat Indonesia sebagai anti – thesa melawan penjajah itu.

Risalah MIM oleh pihak Belanda dianggap sangat mengganggu kekuasaan mereka, sehingga pemerintah Belanda menyatakan "Terlarang atas peredaran buku MIM." Risalah tersebut dicari kemana saja, baik oleh pengikut – pengikut Soekarno, maupun oleh pihak Belanda. Jika orang Indonesia yang ingin mendapatkan buku MIM, karena ingin mengetahui apa isinya, sedangkan pihak Belanda ingin menemukannya untuk dimusnahkan. Dari pihak Belanda mengerahkan pasukan PID-nya menggeledah rumah – rumah penduduk, dan apabila buku itu kedapatan pada seseorang, maka kepala keluarga dari rumah bersangkutan ditahan, untuk dimintai keterangan. Seorang pemuda Indonesia, yang kelak menjadi Menteri RI, mengisahkan bagaimana ibunya menyembunyikan risalah tersebut, pada saat kampung mereka di geledah oleh aparat kolonial. Ternyata Ibunya demikian rapi menyembunyikan risalah tersebut dengan meletakkan buku tersebut dalam kukusan, antara dalam lapisan tutup pisang. Dengan begitu, tatkala polisi menggeledah seisi rumah kukusan yang diatas tungku itu, tidak dibuka...(Zuhri:76:1987)

Pada suasana seperti inilah, Soekarno mengadakan sebuah pertemuan di rumah M. Husni Thamrin pada tanggal 1 Agustus 1933, di Jakarta.

"Pertemuan itu selesai sudah lewat tengah malam. Ketika aku turun rumah menuju jalan raya, disana sudah berdiri seorang Komisaris Polisi, menungguku dengan tenang di depan rumah. Kejadian ini adalah

pengulangan kembali dari penangkapan yang terdahulu. Dia mengucapkan kata – kata yang sama: “Tuan Soekarno, atas nama Sri Ratu saya menangkap tuan.”(Cindy Adam: 169: 1988)

Polisi langsung membawa Soekarno ke Kantor Hopbiro (Kadapol), (yang pada waktu itu teletak di lapangan Monas sekarang) sebelum terjadi tanya jawab, pihak polisi membiarkan Soekarno duduk di ruang depan, dikawal oleh polisi bersenjata lengkap.

Setelah delapan bulan dikurung dalam sel, pihak rumah penjara mulai melakukan pemeriksaan. Soekarno dihujani dengan ribuan pertanyaan, padahal Gubernur Jenderal cukup hanya dengan keputusan sendiri, memerintahkan ‘pembuangan untuk Soekarno’. Tanpa diadili terlebih dahulu, hukuman sudah dijatuhkan, dan Soekarno dibuang ke tempat yang jauh. Secara rahasia, Soekarno dikeluarkan dari rumah Penjara Sukamiskin, dimasukkan ke dalam gerbong khusus pada kereta api ekspres menuju Surabaya. Tujuan akhir adalah pulau Bunga, di Flores. Dalam Gerbong kereta lain, ternyata istrinya Inggit, ikut disertai mertuanya Ibu Asmi dan anak angkat Ratna Juami. Sesampai di Surabaya, Soekarno dimasukkan dalam sel, sedang keluarganya di tempatkan di Hotel. Dalam sel penjara itulah orang tua Soekarno, yaitu Pak Sukemi dan Ibu Idayu sempat menjenguk Soekarno. Sukemi yang mengharapkan putranya Soekarno menjadi seorang Pahlawan seperti dalam Mahabarata, menangis tersedu menyaksikan puteranya itu.

Soekarno juga memahami, mengapa Belanda menginternirnya di sebuah pulau terpencil dan tidak menggabungkannya dengan tahanan politik di Digul. Soalnya, di Digul ada 2600 orang buangan. Jika dibawa kesana, jiwanya bersenyawa dengan para tahanan lainnya, dimana Soekarno dikhawatirkan akan membentuk kekuatan riil.

Soekarno yakin, "Aku akan mengubah muka negeri Belanda dari New Guinea yang terpencil itu."(Cindy Adam:177: 1988)

Perhitungan bahwa Soekarno akan membahayakan Hindia Belanda, juga ada dari laporan rahasia Jaksa Agung Belanda tanggal 25 Nopember 1933, yang mengkhawatirkan Soekarno akan dapat menggerakkan tawanan – tawanan Digul melakukan makar. Berdasarkan pertimbangan itu, maka Soekarno diasingkan ke tempat terpencil, Ende, Pulau Bunga, Februari 1934. (Ingelson:245:1982)

Didepan rumah Soekarno tumbuh setuah pohon kluwih. Ia sering duduk di bawah pohon itu. Tetapi kemudian Soekarno menemukan pohon sukun yang berada diatas bukit kecil yang menghadap ke laut. Dari tempat itu Soekarno memperhatikan samudera dengan hempasan gelombang yang memukul pantai secara berirama. Pasang naik dan turun tidak pernah berhenti, dan terus bergelora secara abadi. Keadaan itu melahirkan tafsiran Soekarno dalam Ingelson(245:1982), Revolusi Indonesia juga akan berjalan seperti itu.

"Revolusi kami seperti juga samudera luas, adalah hasil ciptaan satu-satunya Maha Penyebab dan Maha Pencipta. Dan aku tahu waktu itu... aku harus tahu sekarang... bahwa semua ciptaan Yang Maha Esa, termasuk diriku sendiri, dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Maha Kuasa."

Dari tempat pengasingan ini, Soekarno juga tetap mencari hubungan dengan kawan – kawan di Jawa. Yang paling utama dihubungi Soekarno adalah kawan – kawan yang dapat mencarikan buku. Khususnya dengan A. Hasan dan Moh. Natsir, Soekarno minta dikirim buku-buku tentang agama Islam. Soekarno merasa. Dari sekian banyak buku-buku yang sudah dipelajari, serta diskusi-diskusi yang sudah dilakukan, tetapi pemahamannya mengenai ajaran Islam, dirasakan masih kurang. Lalu kemudian Soekarno menyampaikan pikiran-pikiran melalui tulisan mengenai

agama Islam, khususnya mengenai hubungan masyarakat dengan Islam. Tulisan – tulisan Soekarno itu kemudian oleh A. Hasan dimuat dalam surat kabar yang kemudian juga dimuat dalam buku “Dibawah Bendera Revolusi” dengan judul “Surat–Surat Islam dari Endeh”.

Setelah hampir lima tahun di Endeh, terdengar kabar Soekarno akan dipindahkan dari Pulau Bunga itu. Alasan pemindahan itu, karena muncul protes dari MH. Thamrin kepada Pemerintah Kolonial Belanda, karena di Endeh itu Soekarno terserang penyakit Malaria. Tempat yang menggantikan Endeh, adalah Bengkulu, yang berada di daerah Sumatera Selatan.

Memang benar juga, pada tahun 1938, artinya setelah empat tahun di Endeh, Soekarno dan keluarga di pindahkan ke Bengkulu. Dalam rombongan Soekarno turut juga Dharma dan Riwu, yang berstatus ‘keluarga’ dengan Soekarno, hingga pihak Belanda mengizinkan kedua orang Endeh ini turut ikut dengan Soekarno.

Bung menggambarkan Bengkulu sebagai Negeri yang bergunung – gunung yang dilingkupi bukit barisan, merupakan kota pedagang kecil dan pemilik perkebunan kecil–kecil. Pada mulanya masyarakat Bengkulu tidak bersahabat dengan Soekarno, sama dengan pengalaman hari – hari pertama di Endeh. Bengkulu juga disebut sebagai daerah “Benteng Islam” dengan para wanitanya menutupi tubuh dengan ketat.

Pada kali pertama Soekarno menghadiri ‘perhelatan’ keluarga di Bengkulu, ia menyaksikan adanya kain tabir yang memisahkan yang memisahkan jamaah laki – laki dan perempuan. Soekarno menanyakan apa dalilnya tabir tersebut, namun tidak seorangpun daapt menjawab. Lalu tabir itu ditarik oleh Soekarno.

Pada kesempatan lain, ketika Soekarno menawarkan untuk memperbaiki Masjid daerah itu yang sudah tua dan kotor, orang – orang disitu menolak, karena mereka bertahan kepada sikap 'tidak perlu ada perubahan'. Akibatnya Soekarno mendapat kritikan yang tidak enak dan mengarah kepada dimusuhi oleh jamaah masjid itu. (Cindy Adam: 193:1988)

Orang pertama yang menaruh simpati kepada Soekarno adalah Hasan Din. Dia juga termasuk pengurus Muhammadiyah, yang sudah membaca tulisan Soekarno. Hasan Din adalah ayah dari Fatmawati. Fatmawati yang kelak menjadi Istri Soekarno. Hasan Din menawarkan kepada Soekarno, untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Tawaran itu dengan senang hati diterima oleh Soekarno, karena dia memang ingin berkomunikasi dengan masyarakat Bengkulu. Akan tetapi, oleh Hasan Din diberikan syarat untuk bisa mengajar, ialah agar Soekarno tidak mengajarkan Politik di sekolah itu. Tawaran itu bisa dimaklumi oleh Soekarno, dan dia dapat menerimanya.

Pada tahun 1941, Soekarno bisa menggunakan nama sendiri dalam menulis di Surat Kabar. Dan dia juga sudah menjadi penulis tetap di Surat Kabar asuhan Anwar Cokroaminoto, dan kemudian menjadi pembantu tetap dalam surat kabar "Pemandangan". Melalui tulisannya Soekarno menyinggung masalah fasisme baik oleh Jerman Nazi maupun oleh Jepang sebagai cara akhir dalam mempertahankan Kapitalisme. Dalam rangkaian itu, Soekarno kembali menyinggung akan terlibatnya Jepang dalam perang dunia ke – 2, yang pada tahun 1941 itu sudah berkobar di Eropah. Soekarno mengingatkan rakyat Indonesia dan rakyat – rakyat Asia betapa bahayanya perang pasifik itu, yang pasti akan melibatkan negara Barat berhadapan dengan Jepang, dan dampaknya bagi rakyat Jajahan

Memang tentara Jepang dalam tempo singkat dapat mengalahkan pasukan Belanda, dan pada tanggal 7 Maret 1942 seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Sebelum tanggal 16 Februari Jepang sudah menduduki Palembang, dan oleh pihak Belanda, Soekarno yang berada di Bengkulu segera di pindahkan ke Padang, melalui jalan darat. Dua orang polisi mengawal Soekarno ke Padang, dengan penjelasan bahwa di Padang sudah ada dua kapal yang akan mengangkut para pengungsi Belanda, termasuk Soekarno ke Australia. Hari pertama perjalanan, menggunakan mobil dan bergerak sejauh 240 km, mencapai kota kecil bernama Muko – muko. Tetapi dari Muko – muko ke Padang, perjalanan dialihkan dari jalan umum ke jalan perkampungan, dan ditempuh dengan berjalan kaki, dengan jarak perjalanan lebih kurang 300 km. Barang – barang di masukkan dalam gerobak sapi. Daerah – daerah yang di lalui benar – benar terasing dari jalan raya, dan masuk jalan dusun yang tidak pernah dilewati kendaraan bermotor. Setelah tiga hari berjalan, rombongan ini tiba di satu gubuk kecil di tengah hutan, dan mereka bertiga menginap di gubuk itu, satu malam. Sejak menginap di hutan ini maka diantara Soekarno dan kedua polisi pengawalnya, sudah tidak ada lagi batas. Tidak ada lagi yang menawan, kecuali keadaan hutan yang tidak bersahabat. Pada perjalanan hari keempat, barulah rombongan ini terlepas dari hutan dan mencapai jalan raya, dimana ada kendaraan yang bisa ditumpangi menuju kota.

Bertepatan dengan hari tibanya Soekarno di Padang, kapal yang rencananya mengangkut Soekarno ke Australia, meledak kena bom Jepang. Direncanakan alternatif lain, yaitu pesawat terbang, tetapi juga sudah dipakai dan sisanya dalam keadaan rusak.

Soekarno, setibanya di Padang, dan ditinggalkan oleh kedua pengawalnya, untuk hari pertama menginap di Hotel, untuk tempat tinggal Inggit dan keluarga lainnya. Setelah itu Soekarno pergi keluar mencari sahabat lamanya Waworuntu, kebetulan tidak begitu sulit mencari rumah sahabat lama ini, dan Waworuntu dengan senang hati menerima kehadiran Soekarno dan keluarga mondok di rumahnya.

Satu hari setelah Jepang masuk kota Padang itu, Kapten Sakaguci, sebagai wakil pemerintah Jepang, menemui Soekarno di rumah Waworuntu. Kapten Sakaguci mengajak Soekarno bicara – bicara dalam bahasa Perancis, dan pembicaraan hanya sekedar bicara – bicara saja, tanpa ada satu perintah yang dia bawa, seakan berkenalan saja. Akan tetapi setelah terjadi ‘larangan mengibarkan Bendera Merah Putih’ dari tentara Jepang, Soekarno menemui Sakaguci di kantor Sendenbu, atau kantor bidang propaganda Jepang. Dari pembicaraan itu, dicapai kesepakatan bahwa larangan itu tidak akan mengakibatkan Vonis (hukuman) asal saja rakyat dengan sukarela mencabut bendera merah putih, dan mengibarkan bendera Jepang. Dengan sangat arif, lewat jamaah Masjid, Soekarno minta para Ulama membujuk rakyat memenuhi perintah Jepang. Dan memang, rakyat setia memenuhi permintaan para ulama.

Dalam perjalanan ke Jakarta, Soekarno dan keluarganya harus melewati Palembang. Para perwira militer Jepang di Palembang hampir saja tidak mengijinkan Soekarno pergi ke Jakarta, seandainya Soekarno tidak mengeluarkan Surat Keterangan (bertuliskan huruf kanji Jepang) dari Fujiyama. Walau demikian, pemimpin militer Jepang di Palembang tetap meminta bantuan Soekarno, untuk mengendalikan rakyat yang bersikap memusuhi Jepang. Soekarno mempelajari latar belakang sikap permusuhan warga terhadap Jepang, dan mengetahui bahwa sikap permusuhan itu adalah akibat perlakuan tentara Jepang yang sangat kasar, dan suka

mengganggu kaum wanita, sementara kepada ketua-ketua adat setempat, Soekarno meminta agar lebih bijaksana menghadapi orang Jepang.

Hampir satu bulan lamanya Soekarno tertahan di Palembang, barulah kemudian dapat meneruskan perjalanan ke Jakarta. Akan tetapi Jepang di Palembang hanya mempunyai sebuah kapal, yaitu perahu motor bermesin (carter-pilar). Perahu tersebut sangat rawan untuk digunakan mengarungi lautan. Soekarno masih berusaha mendapatkan kapal yang lebih besar, yang berarti harus menunggu lagi beberapa lama. Akhirnya Soekarno dan Keluarga setuju naik perahu berukuran kecil (8 meter panjangnya). Diperahu inilah Soekarno dan keluarga, selama empat hari, empat malam mengarungi lautan. Pelayaran tersebut jauh dari menyenangkan mereka harus menghadapi semua tantangan alam, termasuk hujan, badai, gelombang, ombak, selain di waktu siang hari panasnya sinar matahari yang menyengat. Kapal yang diawaki seorang Kapten dan dua orang prajurit itu ditumpangi Soekarno, Inggit, Riwu dan Sukarti menjalani pelayaran dengan ketabahan. Semua itu bisa dihadapi karena semangat yang menyala – nyala, untuk segera pulang dan melanjutkan perjuangan (Cindy Adam:268:)

Tanggal 1 April 1945, tentara sekutu mendarat di Okinawa, Jepang. Kemudian tanggal 29 april, Kaisar Hirohito mengisyaratkan untuk berdirinya badan penyelidik bagi kemerdekaan Indonesia. Menyerahnya Jerman kepada Sekutu tanggal 7 Mei 1945, mendorong Pemerintah Jepang melantik Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) atau disebut dalam bahasa Jepang "*Dokoritsu Jumbi Cosakai*". Pada tanggal 29 Mei 1945 pelantikan itu dilakukan sekaligus dilangsungkan sidang pertama di bawah ketuanya KRT. Dr. Rajiman Wedyodiningrat.

Peserta sidang BPUPK sejak mulai bersidang tanggal 29 Mei 1945, telah merasakan suasana kemerdekaan, sehingga dalam pembicaraan dan pada pidato, tidak lagi merasa tertekan oleh pihak Jepang, dan dapat mengutarakan pikiran secara bebas. Sebenarnya dari pihak Jepang diharapkan agar sidang BPUPK itu berjalan dengan debat-debat yang bertele-tele, dengan maksud sidang itu bisa memakan waktu sehari-hari, tidak berhasil!. Kharisma Soekarno dan daya kepemimpinannya yang rasional dapat mempercepat perdebatan pada penyelesaian yang baik, karena ide-ide sintetis yang senantiasa di kemukakan.

Sebagai ketua sidang, Dr. Rajiman mengajukan Thema utama tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang ditanggapi oleh para anggota BPUPK dengan berbagai pendapat. Ada diantaranya melontarkan konsep dari negara – negara Eropa dengan berbagai contoh, selain ada juga yang mengemukakan konsep negara Islam.

Setelah tiga hari sidang berjalan, pada hari keempat, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945, tiba giliran Soekarno dapat menyampaikan pemikirannya. Tapi sebelum itu, Soekarno menyampaikan kritik kepada orang-orang yang sebelumnya. Sebab menurut Soekarno, belum ada diantara mereka yang menjawab masalah pokok yang diajukan ketua sidang, yaitu mengenai Dasar Negara. Pidato Soekarno pada hari itu, kemudian dikenal sebagai pidato “Lahirnya Pancasila”.

Pidato Soekarno itu diterima secara aklamasi oleh sidang. Kemudian dibentuklah Panitia 1 Juni, yang bertugas merumuskan Pidato Soekarno menjadi preambule bagi Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 21 Juni 1945 dibentuk “Panitia Sembilan” yang diketuai oleh Soekarno, dan keesokan harinya tanggal 22 Juni 1945, berhasil menyusun “Piagam Jakarta”. Persiapan kemerdekaan dengan demikian dinyatakan telah mencapai tingkat sempurna.

Soekarno dan Bung Hatta tiba kembali di Jakarta tanggal 14 Agustus 1945, itu hari sebelum Kaisar Hirohito menyatakan "Menyerah Kalah Kepada Sekutu". Setiba di rumahnya, Jl. Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi) telah berkumpul beberapa orang pemuda, dan menanyakan apa instruksi dari Soekarno.

Tetapi keesokan malamnya, tanggal 15 Agustus, sejumlah pemuda datang lagi, dan mendesak Soekarno, supaya memproklamsikan kemerdekaan Indonesia malam itu juga. Chaerul Saleh, Sukarni (belakangan dikenal sebagai anggota Partai Murba) mendesak Soekarno supaya tidak menunda-nunda lagi. Menjawab desakan Pemuda itu, Soekarno menyatakan, bahwa di Saigon ia telah menetapkan tanggal Proklamasi itu 17 Agustus 1945. Soekarno yakin tanggal 17 Agustus 1945 itu, adalah hari keramat. Ia jatuh pada hari Jum'at legi. Alqur'an diturunkan 17 Ramadhan. Orang Islam shalat 17 rakaat. (Cindy Adams:326:1988)

Ternyata pada malam itu juga, sekitar pukul tiga menjelang subuh, para pemuda itu datang lagi, dengan Sukarni sebagai pemimpinnya, memaksa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur (yang baru berusia kurang lebih sembilan bulan) naik mobil, sedang di sebuah mobil lainnya, Bung Hatta sudah tertawan di sana. Soekarno - Bung Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, dimana ada pasukan Peta bertugas.

Akan tetapi tindakan pemuda Sukarni ds itu tidak sinkron dengan rencana pemuda lainnya. Pada sore hari tanggal 16 Agustus 1945, sehabis buka puasa, muncul Ahmad Subardjo ke tempat penculikan Soekarno Hatta. Subardjo menceritakan bahwa di Jakarta, tidak terjadi apa - apa, seperti 'Gertakan' para pemuda, bahwa di Jakarta sudah terjadi revolusi.

Seharusnya tanggal 15 pagi, sidang PPPKI dilaksanakan, untuk menyusun naskah proklamasi. Para anggota PPKI tidak dapat menyelesaikan naskah itu, karena Soekarno belum hadir. Oleh karena itu anggota PPPKI mendorong Ahmad Subardjo supaya mencari Soekarno-Bung Hatta. Dan memang benar-benar Soekarno - Bung Hatta sore hari tanggal 16 Agustus sudah tiba kembali di Jakarta, atas bantuan Laksmana Maeda.

Untuk penyusunan naskah Proklamasi, Laksmana Maeda memberi jaminan, bahwa para anggota PPKI bisa bersidang di rumahnya, asal tidak di luar halaman. Soekarno sempat pula menghubungi Nishimura, ajudan gunseikan (penguasa tertinggi Jepang di Jakarta). Dan Soekarno juga menerima penjelasan dari Nishimura, bahwa Jepang tidak membenarkan terjadinya perubahan di Indonesia, dan tidak membenarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kendati demikian, Panitia Kemerdekaan Indonesia pada malam tanggal 16 Agustus 1945 itu mempersiapkan teks Proklamasi. Konsep yang dipakai adalah apa yang ditulis tangan oleh Soekarno, disertai adanya coretan - coretan. Dan para pemuda serta anggota PPKI yang hadir, mengusulkan agar teks proklamasi cukup di tanda -- tangai oleh Soekarno - Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia, dan besoknya tanggal 17 Agustus 1945 dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Usul itu disepakati oleh Anggota PPKI.

Selesai menyusun teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Malik itu, Soekarno pulang ke rumahnya. Ia tidak langsung tidur, walau malarianya sudah mulai kambuh lagi. Soekarno menulis berpuluh-puluh surat yang ditujukan kepada kawan-kawannya sepergerakan, memberi nasihat dan petunjuk, apa yang harus dilakukan setelah proklamasi dilaksanakan. Ada yang mendapat tugas di bidang pertahanan, ada

4. 6. Pandangan Sukarno Tentang Indonesia

Untuk menjelaskan bagaimana pemaknaan referensial tentang pandangan Suakrno terhadap Indonsia , dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.6.1. Persatuan Nasional

Secara tekstual tentang persatuan nasional, Sukarno melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak sekedar kesatuan politis, dalam bentuk yang bersifat geografis melainkan meluas dalam kesatuan lain yang menuju pada kesatuan yang utuh. Proses menuju kesatuan yang utuh ini harus terus hidup, seperti dinyatakan dalam pernyataan Sukarno yang metaforis, “Ia adalah satu kesatuan cita-cita social yang hidup laksana api unggun, - satu *entity of social consciousness like a burning fire*”.

Wacana “persatuan” telah begitu berrsenyawa dengan kehidupan dan pandangan hidup Sukarno. Dari sudut genetis, Sukarno adalah wujud persatuan Jawa dengan Bali. Tidak cukup itu saja dalam rangka pergaulan untuk proses pematangan diri, ia bersentuhan dengan berbagai kalangan dengan beragam pemikiran. Pada saat mondok di rumah HOS Cokroaminto, bertemu dengan tokoh pergerakan nasional, seperti H. Agus Salim dan sering berdiskusi dengan teman sepemondokan, seperti Alimin, Semaun, Muso, serta belakangan dengan Kartosuwiryo. Mengenai hal ini, Benhard Dahm (187:1987) mengatakan, “kekuatan yang menggerakkan Sukarno adalah gagasan persatuan...Gagasan itu telah

memungkinkan untuk terus- menerus berusaha ke arah sintesis dari segala sesuatu yang bisa di integrasikan ke dalam tatanan pribumi”.

Soekarno kemudian merumuskan apa yang dianalisa dan apa yang ditemukannya di Cigareleng dalam tulisan “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Dalam tulisan tersebut Soekarno meyakini bahwa seluruh aliran politik yang ada di Indonesia dapat dipersatukan. Setelah menyelesaikan studinya, Soekarno benar – benar membulatkan tekad untuk terjun langsung ke dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Pertumbuhan organisasi politik Soekarno di mulai dengan mendirikan *Algemeene Studie Club* yang didirikan di Bandung. Perkumpulan studi ini berkembang dan mempunyai cabang di beberapa kota di Jawa. Perkumpulan ini juga menerbitkan Majalah “Suluh Indonesia Muda” sebagai media pertukaran fikiran antar anggota organisasi, selain untuk menyampaikan pemikiran terhadap rakyat banyak.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Pada saat ini dimulailah realisasi pemikiran – pemikiran Soekarno ke dalam satu pergerakan yang nyata. Sejak awal berdirinya, PNI mengambil sikap politik ‘Non – Kooperatif’ secara mendasar terhadap Pemerintah Belanda. Sesuai dengan keputusan kongres PNI pertama pada bulan Mei tahun 1928, PNI yang semula bernama Perserikatan Nasional Indonesia, diganti dan menjadi Partai Nasional Indonesia. Salah satu program strategis PNI ialah “Indonesia Merdeka Sekarang”, sebagai tujuan untuk diperjuangkan dengan segala cara. Program PNI dengan tujuan Indonesia Merdeka sekarang juga itu, menyebabkan Pemerintah

Kolonial sangat marah, dan berupaya dengan segala cara untuk menghancurkan Soekarno dan membubarkan PNI. Pihak keamanan Belanda mengerahkan aparat PID-nya (*Politieke Inlichtings Dienst*) untuk mematai – matai Soekarno, bahkan menguntitnya sampai ke desa – desa, yang selalu didatangi Soekarno untuk menyampaikan pidatonya kepada Rakyat.

Soekarno dalam usahanya menyadarkan rakyat, menggunakan bahasa yang sederhana, yang gampang dicerna oleh rakyat lapisan bawah, dengan gaya yang amat menarik, yang belakangan disebut orang ‘Retorik’. Ia sendiri tidak pernah mengumbar title insinyurnya, walau di tahun 1927 itu gelar Insinyur sudah disandang, lulusan THS (*Technische Hooge School*). Dalam pembicaraan antara kawan, sesama pimpinan partai, Soekarno biasa dipanggil dengan sebutan “BUNG” oleh orang seperti Sartono, atau oleh Gatot, seperti juga Soekarno memanggil kawan – kawan seperjuangan itu dengan sebutan “Bung”. Panggilan ‘Bung’ ini sudah mulai dicetuskan di tahun 1926, yaitu setelah Soekarno selesai dengan kuliahnya. Dalam salah satu pidatonya di tahun 1926 itu Soekarno berkata:

.....” sampai sekarang”, kataku “ bahasa Indonesia hanya dipakai kaum ningrat. Tidak oleh rakyat biasa. Nah, mulai dari hari ini, menit ini, mari kita berbicara dalam Bahasa Indonesia.” Hendaknya rakyat Marhaen dan orang bangsawan berbicara dalam bahasa yang sama. Hendaknya seorang dari satu pulau dapat berhubungan dengan saudara – saudaranya di pulau lainnya dalam bahasa yang sama. Kalau kita beranak pinak seperti kelinci akan menjadi satu masyarakat satu bangsa, kita harus mempunyai satu ‘BAHASA PERSATUAN’. Bahasa dari Indonesia Baru“.....

“Ketika aku memaklumkan Bahasa Indonesia, kami memerlukan suatu rangkaian sebutan lengkap ... disaat itulah kami mengembangkan sebutan

Pak, atau Bapak, Bu atau Ibu dan Bung yang berarti saudara. Di jaman Revolusi Kebudayaan inilah aku mulai dikenal sebagai Bung Karno.

Jiwa “persatuan” yang melekat dalam jiwa Sukarno, akhirnya termanifestasi dalam pikiran dan tindakannya. Pada masa pergerakan nasional, ia melihat ada berbagai aliran ideology politik berkembang dalam menentang kolonialisme. Pada tahun 1926, menulis di Suluh Indonesia Muda dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, dalam tulisan itu menekankan pada persatuan dari ketiga aliran politik tersebut untuk mencapai kemerdekaan. Kendati masing-masing aliran mempunyai karakter yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama. Dalam tulisannya (DBR I: 3:1964), di jelaskan:

“Memepeladjari, mentjahari hubungan antara ketiga sifat itu membuktikan , bahwa tiga haluan ini dalam satu negeri djajahan, tak guna berseteruan....

Entah bagaimana tertjapainya persatuan itu...akan tetapi tetaplah, bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu jalah kapal Persatuan adanya!

Begitu juga dalam organisasi perjuangan, seperti dikatakannya (DBR: :)

“Sekarang tinggal menetapkan sahadja organisasinya, bagaimana Persatuan itu bisa berdiri, tinggal mentjari organisatornya sahadja, jang mendjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu Indonesia itu tak mempunyai pula Putera jang bisa mendjadi Kampium Persatuan ?

Kita harus bisa menerima, tetapi djuga harus bisa memberi inilah rahasianya Persatuan”

Melalui Persatuan Partai Politik Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tahun 1928 merupakan upaya untuk menghimpun berbagai kekuatan organisasi politik dalam satu wadah. Upaya persatuan ini gagal, ketika Sukarno mulai di buang oleh pemerintah kolonial. Kendati tidak berhasil, Sukarno tetap konsisten pada pendiriannya. Hal ini terlihat pada saat memilih strategi perjuangan, apakah mengutamakan persatuan nasional (*klassenbewuzt*) atau pertentangan kelas (*klassenstryd*)? Dengan tegas menjelaskan bahwa karakteristik perjuangan adalah persatuan nasional. Walaupun menggunakan Marxisme sebagai pisau analisa dalam melihat realitas social, Sukarno tidak memilih pertentangan kelas (*klassenstryd*) dalam perjuangan revolusionernya, karena yang di hadapi adalah sistem kolonial, bukan pemilik modal. Hal ini lah yang kemudian mendefinisikan rakyat Indonesia bukan sebagai proletar-buruh, melainkan kaum Marhaen. Entah petani, buruh, pedagang atau pun pengusaha, pada prinsipnya semua rakyat Indonesia adalah Marhaen.

Begitu pula pada saat awal kemerdekaan, Sukarno bertemu dengan kawan lama yang berhaluan komunis. Kawan itu bertanya. “ Mengapa Bung Karno tidak memilih pertentangan kelas, mengapa harus perjuangan nasional ?” Dalam pandangan Sukarno yang berlangsung sekarang bukanlah kontradiksi antara kita dengan kita, melainkan kontradiksi pokok antara kita dengan sistem kolonial, maka strategi perjuangannya adalah persatuan nasional.

Pada masa pemerintahannya, Sukarno membentuk persatuan yang ia beri dengan nama Front Nasional, yang merupakan persatuan dari organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat. Tujuan dibentuknya Front Nasional adalah menjadikan rakyat sebagai insan politik untuk mendukung revolusi. Seperti di jelaskan pada pidato peringatan Proklamasi 17 Agustus 1963, sebagai berikut:

“Front nasional adalah suatu alat revolusi, oleh karena Front nasional harus menampung segala kegiatan politik daripada massa, baik yang tergabung dalam organisasi-organisasi politik, maupun yang tergabung dalam organisasi-organisasi karya, agar supaya menjadi satu kegiatan simultan pembantu revolusi. Ia harus golongan-golongan baru, agar *funds and forces* dapat ikut serta dalam kegiatan politik guna kelancaran revolusi. (Revolusi Sosialisme IV, h.96)

Bahkan demi kecintaan terhadap persatuan, Sukarno berani mengorbankan kekuasaan sebagai Presiden demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa ini berlangsung ketika pasca G. 30 S PKI 1965, suasana politik Jakarta dalam keadaan panas, dimana kesatuan aksi yang menyebut dirinya “Angkatan 66” menggerayangi Ibukota dengan sasaran “jatuhkan Sukarno”, sedang di barisan seberang ada pendukung dari “barisan Sukarno” yang merupakan kekuatan pendukung Sukarno. Kemudian, Jenderal Hartono, Panglima KKO/Korps Komando Militer (mariner) menemui Sukarno serta meminta ijin agar barisan Sukarno diperkenankan membela Sukarno menghadapi mereka yang menyebut dirinya angkatan 66. Akan tetapi jawaban Sukarno terhadap situasi tersebut, menyatakan”
Tunggu komandoku”.

Sehingga kekuatan “barisan Sukarno” patuh menunggu komando, dengan demikian konflik fisik antara barisan Sukarno dengan pendukung orde baru dapat di cegah, sehingga perpecahan bangsa dapat di hindarkan. Dalam *Memoirs* Amir Mahmud (Memoirs:292: 1982), yang pada tahun 1966 menjabat sebagai Pangdam Jaya memberi kesaksian, “ Pada waktu itu di Jakarta terdapat 40 batalyon pasukan bersenjata. Kalau diadakan perbandingan kekuatan, maka pasukan yang mendukung Presiden Sukarno lebih besar dari pasukan yang mendukung Orde baru”.

Dalam pemaknaan kontekstual, persatuan sebagai suatu yang alamiah atau sudah kodrat hidup manusia. Sebagai makhluk social memberi penjelasan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan eksistensi peradabannya. Maksudnya, peradaban sebagai buahnya kebudayaan akan terus hidup dan berlanjut, apabila manusia di dalamnya melakukan relasi dengan yang lain.

Pengertian hakiki tentang persatuan, seperti di terangkan dalam Surat Yasin ayat 36 menyebutkan “ bahwa segala sesuatu itu berpasang-pasangan”. Tersirat ayat itu menjelaskan bahwa segala fenomena di alam semesta di ciptakan oleh Tuhan tidak lah tunggal, melainkan selalu ada pasangannya, seperti laki-laki –perempuan, siang-malam dan seterusnya. Kendati pasangan itu bersifat oposisi tetapi menunjukkan relasi satu sama lain dan saling melengkapi.

Dalam konteks sosiologis, persatuan yang menempatkan manusia dalam kelompok, masyarakat maupun bangsa menjadi pilar utama terbentuknya kebudayaan. Merujuk pada Blumer dalam Ritzer dan Goodman (373:2009), teori interaksi simbolik menempatkan manusia sebagai aktor utama pembentuk kebudayaan. Fenomena sosial adalah suatu yang obyektif, menjadi subyektif dan mempunyai makna karena manusia melakukan respon dan interaksi untuk mendefinisikan berbagai fenomena sosial yang berlangsung di sekitarnya. Melalui persatuan manusia dalam satu wilayah geografis yang luas seperti Indonesia memberi ruang terjadinya interaksi, yang kemudian melahirkan simbol-simbol baru, pengertian-pengertian baru, bahkan kebudayaan-kebudayaan baru. Sebab, dalam interaksi simbolik, perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di sekeliling mereka melalui interaksi.

Selaras dengan hal itu, Nicklas Luchman (Ritzer & Goodman:35:2009), persatuan adalah masyarakat dengan system *outopoietic*, yaitu masyarakat menghasilkan unsure dasarnya sendiri, menciptakan batas dan strukturnya sendiri, merujuk pada dirinya sendiri dan tertutup. Luchman menambahkan bahwa unsur pembentuk masyarakat adalah komunikasi. Individu dapat mempunyai arti dan relevan bagi masyarakat sejauh ia mengambil peran dalam komunikasi, dan dari bentuk itu timbulah makna.

Mengenai bagaimana makna terbentuk, Luchman (Ritzer & Goodman:36:2009) menjelaskan bahwa makna tampil bukan karena adanya

persamaan, justru karena adanya perbedaan, karena makna tindakan tertentu (obyek) adalah perbedaan dengan kemungkinan tindakan (obyek) lain. Apabila tidak ada kemungkinan berbeda tidak akan ada makna. Sebagai suatu contoh, pakaian jadi bermakna karena kita dapat memilih memakai pakaian yang lain.

Dalam pandangan Habermas (Hardiman:xxii:1993) bentuk masyarakat seperti yang digambarkan oleh Luchman adalah sebagai masyarakat komunikatif. Menurutnya, masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan lewat argumentasi. Melalui komunikasi, perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat di mungkinkan terus berlanjut.

Dalam kaitan ini, Sukarno, dalam pidato Pancasila 1 Juni 1945, menjelaskan:

Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya, jangan dikira di Turki tidak ada perjuangan. Jangan dikira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. *Allah Subhanahu wa Ta'ala* memberi pikiran kepada kita agar supaya di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan menumbuk, membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya.

Dari penegasan itu, Sukarno memberi pengertian bahwa melalui persatuan memberi pijakan terhadap masing-masing individu untuk saling berinteraksi, berkomunikasi dengan berbagai argumentasi yang merepresentasikan adanya pergulatan pemikiran. Hasil dari proses tersebut, kalau Luchman menyebut sebagai

makna, sedangkan Habermas menyebut sebagai konsensus. Melalui makna ataupun konsensus terbentuklah system yang menjadi anutan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan persatuan yang terus berproses menuju pada "*ideological entity*" diharapkan tumbuh peradaban-peradaban baru yang menjadi pertanda eksistensi hidup bangsa terus berlanjut. Untuk itu dalam menjaga persatuan bangsa, Sukarno mengibaratkan seperti nyala api yang terus hidup, kendati mengalami tranformasi, bentuk yang di harapkan adalah peningkatan dinamik dari persatuan geografis menuju pada persatuan ideology. Seperti kutipan pernyataan, "Ia adalah satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis, satu "*ideological entity*" yang amat dinamis".

4.6.2. Revolusi

Revolusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sukarno. Wacana ini selalu ada dalam tulisan maupun ucapannya. Revolusi, baginya adalah “menjebol dan membangun”, menjebol tatanan lama, kemudian diganti dengan membangun tatanan baru. Proklamasi 17 Agustus 1945, dikatakannya sebagai permulaan Revolusi Indonesia. Hal ini dikarenakan, peristiwa itu menandai adanya zaman baru, tatanan baru. Seperti dikatakannya, “merdekanya sesuatu bangsa jajahan adalah satu peristiwa dalam proses revolusi kemerdekaan seluruh kemanusiaan” (Kepada Bangsa:376:1964).

Melacak bagaimana perjuangan revolusi dilakukan, dapat dilihat dalam pledoi pembelaan di muka pengadilan kolonial yang ia beri judul “Indonesia Menggugat”(183:1985). Dalam pembelaannya, dikatakan:

“Untuk mencapai kemerdekaan itu. PNI tidak bermaksud pedang-pedangan atau golok-golokan atau bom-boman tidak pula bermaksud menyindir atau memujikan pengerusakan keamanan umum. Caranya tak lain dari mengadakan rapat-rapat umum di mana-mana untuk mempengaruhi, menggugahkan, membangkitkan pendapat umum,... Menggerakkan kami punya kekuasaan secara halal.PNI adalah “revolusioner” oleh karena PNI ingin mengadakan perubahan yang lekas dan radikal”

Inilah penegasan Sukarno mengenai bagaimana perjuangan harus dilakukan. Yaitu bekerja untuk mencapai perubahan yang mendasar , radikal dalam waktu yang cepat, dengan mempengaruhi pendapat umum secara legal. Usaha untuk

mempengaruhi itu bisa saja melalui rapat umum, melalui kursus kader, melalui tulisan, melalui sandiwara, lagu-lagu, sampai kesedian untuk berkorban dalam perjuangan.

Makna penggunaan kekuatan seperti di atas, yaitu kekuatan moral dengan jalan membentuk pendapat umum atau *opinion public* (Bagin:128:2004), pada masa itu memang belum banyak dikenal atau dipahami oleh banyak pemimpin pergerakan. Kekuatan moral yang berupa pendapat umum, pada saat itu belum diyakini sebagai sesuatu yang bisa menggugurkan system kolonialisme-imperialisme. Strategi perjuangan tersebut di nilai sesuatu yang tidak kongkrit, abstrak dan tidak bisa mencapai tujuan.

Pemikiran tentang penggunaan kekuatan yang di ambil dari Karl Kautsky ini, pernah di pahami secara keliru oleh PKI yang mengadakan pembontakan terhadap pemerintahan colonial pada tahun 1926. Menurutnya, kontradiksi pokok yang berlangsung harus diselesaikan dengan cara konfrontasi fisik untuk memggugurkan kekuasaan yang mapan. Begitu pula terhadap kalangan yang menyebut dirinya moderat yang menyatakan untuk *kooperatif* terhadap pihak kolonial yang menempuh cara berjuang dengan masuk dalam parlemen (*volkraads*). Sedangkan, strategi perjuangan dengan konfrontasi terhadap penjajah dengan merebut pengaruh melalui pembentukan pendapat umum atau *opinion public* belum menjadi pola bagi kaum pergerakan. Perbedaan paham tentang strategi perjuangan berlanjut hingga masa

kemerdekaan. Perbedaannya adalah bagaimana strategi yang harus ditempuh dalam mengisi kemerdekaan.

Misalnya, seperti Mohamad Hatta dan Sutan Syahrir bahwa setelah berakhirnya revolusi fisik 1945-1949 yang berarti revolusi Indonesia sudah berakhir. Mohamad Hatta dalam bukunya “Demokrasi Kita” menulis, “Presiden mendasarkan segala tindakannya itu atas pendapat bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur belum selesai..... Demokrasi dipimpin Sukarno menjadi suatu diktatur yang di dukung oleh golongan-golongan yang tertentu...(Hatta:5-6:1960).

Demikian pendapat Hatta, bahwa revolusi di pahami hanya sebatas pada periode revolusi fisik Bagi Sukarno, haruslah bersifat nasional dan di lakukan dengan tahapan-tahapan. Dalam bukunya “Sarinah” Sukarno (98.1998), menjelaskan tahapan-tahapan revolusi,

“...revolusi adalah satu proses yang bertingkat-tingkatan. Kita dapat meneruskan tingkatan revolusi yang satu kepada tingkatan revolusi yang lain... tetapi kita tidak dapat melangkahi tingkatan revolusi yang satu dan terus melompat ke tingkat yang lain, atau memborong tingkatan yang satu berbarengan-barengan. Untuk itu revolusi di mulai dengan *revolusi nasional* terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan *revolusi nasional demokratis*, kemudian *revolusi sosialis*, dan tahapan terakhir adalah dengan *revolusi social-demokratis*. Dengan demikian, revolusi tidak sekedar perjuangan pada revolusi fisik semata, melainkan terus berkembang sesuai dengan tuntutan dinamika perkembangan masyarakat.

Dalam menjalankan revolusi, yang utama adalah pelaku-pelaku revolusi haruslah diceraikan dulu dengan jiwa merdeka. Hal ini seperti dikatakan Sukarno,

“dengan membuang pikiran kuno”. Maksudnya, menanggalkan alam pikiran kolonialisme dan feodalisme, kemudian mengisi dengan pikiran maupun tindakan baru yang bebas dari tekanan dan penindasan. Revolusi tidak bisa dijalankan dengan mengoper revolusi lain, atau istilah Sukarno dijalankan dengan *textbook* orang lain, melainkan di jalankan dengan kekuatan sendiri, Penegasan dengan metafora “*textbook-textbook* yang kontra-revolusioner”, merupakan jawaban terhadap kritik pemimpin nasional lain, yaitu kelompok liberalis yang berpendapat bahwa “revolusi sudah selesai”.

Bagi Sukarno “revolusi belum selesai” karena revolusi mempunyai tahapan-tahapan untuk menuju pada tatanan masyarakat yang adil dan makmur, dan harus berpijak pada kekuatan sendiri. Periode panjang dalam kekuasaan kolonialisme, berakibat pada hancurnya sendi-sendi tatanan social masyarakat. Karakter superior yang di perlihatkan dalam zaman keemasan Sriwijaya dan Mojopahit terbelenggu dalam karakter inferior yang feodalistik dan kolonial. Itu sebabnya, sebuah perubahan revolusioner tidak cukup hanya lepasnya dari belenggu penjajahan kolonial, melainkan juga pada tatanan yang mendasar, yaitu mental-revolusi multi kompleks, bahkan tidak sekedar itu, revolusi harus bergaung ke seluruh dunia yang ia sebut sebagai revolusi kemanusiaan, yaitu lepasnya manusia dari penindasan dan penghisapan.

Dalam analisis Crane Brinton dalam Hamid Abdulah (4:1989), dalam karyannya “*The Anatomy of Revolution*”, memberi gambaran tentang makna sebuah

revolusi bagi kehidupan umat manusia dalam usahanya melakukan pembaharuan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan bernegara, tentang munculnya kelompok baru di masyarakat yang menjadi sponsor dari revolusi, atau lahirnya kelompok elite baru dalam revolusi, tentang aspirasi kelompok revolusioner, tentang pemerintahan teror selama revolusi berlangsung, tentang pergeseran kekuasaan di kalangan pemimpin revolusi, tentang penyelewengan-penyelewengan politik yang terjadi dalam negara yang sedang di alnda revolusi, dan sebagainya.

Kajian revolusi yang dilakukan di belahan dunia, akhirnya Crane Brinton pada kesimpulannya, bahwa revolusi yang berlangsung akan di sertai dengan pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi secara dratis, maka system nilai yang tadinya telah "*established*", atau telah mapan, mengalami perubahan yang bersifat kontradiktif dengan nilai baru yang muncul selama revolusi berlangsung. Berkaitan dengan Crane Brinton, maka tepatlah apa yang di akatakan oleh Neil Smelser (1967), yang menyatakan, bahwa setiap revolusi juga bermakna suatu pergeseran nilai dan setiap revolusi harus disertai oleh perubahan social. Seperti, perubahan tingkah laku, perubahan pemikiran, perubahan sikap dalam menghadapi realitas cenderung selalu berubah selama revolusi berlangsung.

Pergeseran nilai yang terjadi dalam revolusi adalah peristiwa yang biasa. Pergeseran itu berlangsung secara tiba-tiba dan kadang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Ia merombak dalam waktu singkat terhadap tatanan yang telah hidup lama begitu lama di masyarakat, sehingga tidak kelompok social manapun yang

terhindar dari pergeseran tersebut. Itulah sebabnya, setiap pergeseran atau perubahan yang berlangsung dalam setiap revolusi adalah perubahan yang bersifat “structural”. Karena ia merobak seluruh bangunan kekuasaan lama di ganti dengan bangunan kekuasaan baru yang di sesuaikan dengan keinginan aktor revolusi.

Dalam kaitan dengan revolusi lain, teori revolusi yang dikemukakan oleh Lenin ini menjelaskan, bahwa bila diperlukan untuk memberikan pengertian sesingkat mungkin tentang imperialisme adalah tahap monopoli dari pada kapitalisme. Apabila penghisapan kapitalisme telah tumbuh mekar menjadi mendunia, yang berlandaskan rangkaian panjang basis militer dan politik di seluruh dunia, maka revolusi harus menyerang rangkaian itu pada mata rantai yang paling lemah. Penjelasan dari Lenin ini tidak lain dari penjabaran tentang revolusi dunia dari Marx dan Engels yang menyatakan bahwa suatu revolusi komunis, untuk dapat berhasil harus melampaui perbatasan-perbatasan nasional, revolusi seperti itu mesti pecah secara serentak di mana konflik kelas di antara borjuasi dan proletariat telah cukup matang.

Dalam teks-teks politik, pemahaman tentang revolusi dengan metode pembentukan pendapat umum atau *opini public* jarang dibahas atau bahkan belum ada sama sekali. Sebagai gambaran, seperti yang di tulis oleh W.F. Wertheim dalam bukunya “*Gelombang Pasang Emansipasi*”, anatomi revolusi yang di bahas mengedepankan pada bentuk konfrontasi fisik pada penguasa yang mapan. Contoh-contoh revolusi yang berlangsung di Perancis abad 19, revolusi 17 Oktober di Rusia

ataupun revolusi Tiongkok melegitimasi bahwa revolusi harus dijalankan dengan konfrontasi fisik yang radikal.

Pembentukan pendapat umum atau *opinion public* adalah bagian dalam kajian studi komunikasi politik. Pada masa demokrasi sekarang, *opinion public* menjadi kajian penting bagaimana sebuah kekuatan massa itu terbentuk, sehingga dalam system kekuasaan politik, *opini public* merupakan kekuatan keempat, di samping kekuasaan lain, seperti eksekutif, legislative dan yudikatif.

Perjuangan revolusi melalui pembentukan opini ini dilakukan Sukarno di karenakan masifnya mesin-mesin politik penjajah dalam mengkonstruksi rakyat Indonesia merasa rendah, tidak percaya diri kepada diri sendiri, sebaliknya supaya rakyat di tanamkan bahwa bangsa kulit putih adalah bangsa yang unggul. Di tanamkan pula, bahwa kalau ikut Belanda adalah mulia, sedangkan kalau melawan adalah hina. Seperti yang digambarkan dalam novel "Siti Nurbaya". Begitu pula, dalam pelajaran Sekolah Dasar, di tanamkan bahwa Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol adalah pemberontak yang melawan Belanda. Berpijak pada kenyataan itu, Sukarno menggerakkan perjuangan revolusioner dengan pembentukan pendapat umum, bahwa adanya kaum sini dan kaum sana, kaum sini adalah rakyat yang tertindas, sedang kaum sana yang menindas.

4.8.2. Pax Humanica

Tujuan Soekarno dengan kontruksi “kekuatan baru” -New Emerging Forces adalah ingin membawa dunia dalam tatanan baru yang mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Suatu dunia yang penuh dengan perdamaian tanpa penindasan dan penghisapan. Sebelumnya, Soekarno melihat, bahwa dunia berada dalam hegemoni kekuatan lama yang selalu melakukan penjajahan dan penindasan. Kekuatan lama inilah melalui praktek penjajahan mengakibatkan penderitaan panjang dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan terhadap rakyat Asia dan Afrika maupun Amerika Latin.

Pandangan akan cinta sesama (kemanusiaan) yang diperolehnya pada masa kecil sangat berpengaruh terhadap Soekarno dalam tindakan dan pandangan politiknya. Bahkan, ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk kepentingan orang lain, kendati hanya untuk nyawa satu orang. Seperti di kisahkan dalam otbiografinya:

“...ketika seorang perempuan yang wajahnya seperti ibuku berlalri-lari dating meratp-ratap dengan latah, mengatakan bahwa anaknya yang tercinta telah di tawan. Dia menunjuk arah kemana orang Inggris membawa anaknya itu. Aku memasuki daerah lawan. Dengan pelahan akan tetapi awas. Aku tidak berkata apa-apa. Aku tidak memegang bendera putih. Tetap berjalan langsung memasuki kamp musuh. Sendirian, tak seorangpun ikut denganku.

Aku berada jarak tembakan dekat dari sebuah sarang senapan mesin yang di ahdapkan tepay jantungku, ketika suara seorang Indonesia, entah dari mana berteriak dalam bahasa Inggeris, “Hei semua...djangan menembak....itu Presiden Soekarno, jangan tembak....!”

...aku berjalan di dalam semak-semak dan dengan segala wibawa yang ada padaku, ku minta bertemu dengan komandannya, menuntut pembebasan dari

anak itu dan kemudian keluar lagi bersama-sama dengan anak itu. Orang Inggris semua seakan-akan terpaku dan mengabdikan permintaannya.

.... Apa sebab seseorang di satu waktu mempunyai keberanian dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang bisa dia kerjakan hanya Tuhan yang tahu. Aku tidak tahu....(Cindy Adam:351:1988)

Sebagai Presiden pada saat itu bukan merupakan beban untuk melayani permintaan Ibu yang ia tidak kenal sama sekali. Dengan kedudukannya, sebenarnya bisa memerintahkan pejabat local untuk membebaskan tawanan pemuda yang di tawan. Akan tetapi rasa kemanusiaan yang bersenyawa dalam diri Soekarno meninggalkan pertimbangan rasional dan kedudukannya sebagai seorang Presiden. Rasa kemanusiaan itulah yang mendorong masuk ke pangkalan musuh dengan resiko bisa di tembak sebagai musuh. Seperti di akui Soekarno sendiri, bahwa pekerjaan itu dilakukan, dalam suasana ketidaktahuan, kecuali penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian dalam melaksanakan pekerjaan kemanusiaan, Soekarno senantiasa menyatukan diri pada Tuhan.

Begitu juga pandangan Soekarno terhadap makhluk yang lebih rendah, mengutip salah satu dari hadis Rasulullah yang isinya:

“Pada satu hari ada seorang wanita melihat seekor anjing melet-melet ia punya lidah karena dahaga. Wanita itu menaruh belas kasihan kepada anjing itu... Air di negeri Arab. Lho saudara-saudara. Sebagian daripada airnya oleh wanita ini di berikan kepada anjing yang sedang melet-melet dahaga. Nabi berkata, Masya Allah, saya melihat wanita itu masuk surga, oleh karena ia merasakan benar bahwa ada hubungan antara dua makhluk itu(Sukarno, Pancasila Dasar Negara:87:1984)

Rasa cita sesama ternyata tidak sekedar dalam kehidupan pribadi, melainkan juga di transformasikan dalam landasan ideology yang di masukan dalam teori dan

program perjuangannya (Bagin:37:2004). Ada hubungan yang erat antara cinta sesama dengan pandangan politiknya tentang kemerdekaan seluruh umat manusia.

Pada tahun 1960 dalam sidang PBB, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai Piagam PBB. Maksud dari usulan itu adalah Soekarno hendak meletakkan landasan ideologis bagaimana tatanan dunia baru di bentuk, yaitu mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Yang menjadi pangkal persoalan ketegangan/konflik dunai bukan karena masalah pertentangan karena agama, ideology ataupun ras, melainkan tidak terakomodirnya nilai-nilai kemanusiaan. Ada sekelompok kaum atau bangsa yang merasa dirinya kuat dan berhak untuk menguasai segalanya, sedang kaum yang lemah adalah kelompok yang terhisap dan tertindas. Nafsu penguasaan yang berlebihan itu karena telah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dengan cinta sesama-kemanusiaan yang hidup subur di tengah pergaulan warga dunia, maka perdamaian dunia dapat di wujudkan.

Dalam masalah cinta tanah air pun, Sukarno menekankan nilai-nilai kemanusiaan, yang ia sebut dengan "*my nationalist is humanity*". Hal ini menolak pandangan dari Toynbee-sejarawan Inggris yang menyatakan bahwa nasionalisme sebagai berhala modern. Pandangan ini bertolak dari praktek Hitler dengan Nazi yang menganggap ras Arya adalah bangsa yang paling unggul dan mempraktekan cinta tanah air secara berlebihan sehingga berkembang ke arah *chuvinistik*, suatu sikap kebangsaan yang menganggap bangsanya adalah bangsa yang paling unggul dan berhak untuk menguasai bangsa lain.

Untuk itu agar rasa cinta tanah air tidak terjebak dalam bentuk yang *chauvinistic*, Soekarno dalam pidato Pancasila I Juni 1945 menyatakan nasionalisme yang berperikemanusiaan. Nasionalisme yang hidup untuk berdampingan dengan bangsa lain, saling menghargai dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Tatanan itu yang ia gambarkan secara metaforis dalam satu ungkapan, “*Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme*”. Ungkapan itu memberi pengertian bahwa tatanan dunia yang terbentuk adalah persaudaraan antar bangsa, saling menghargai satu sama lain dan memberi tempat bagi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tidak sekedar persatuan bangsa melainkan persatuan umat manusia- *pax humanica*.

Saat sekarang dengan fenomena globalisasi yang berorientasi pada pasar dunia, tidak lagi berada dalam ketegangan seperti pada era perang dingin dulu, hubungan internasional antar bangsa lebih banyak ditekan pada masalah kerjasama ekonomi untuk mengejar kesejahteraan. Sebelumnya, kerjasama ditekankan pada pembentukan aliansi pertahanan militer, seperti NATO, Pakta Warsawa, SEATO. Sekarang, dunia di warnai dengan berbagai pembentukan blok-blok ekonomi, seperti WTO, APEC maupun CAFTA.

Tetapi dalam perspektif Soekarno, liberalisasi ekonomi dunia adalah tahap lebih lanjut dari system kapitalisme. Dalam pandangannya, ada sifat ekstrem dari kapitalisme yang tidak mengajarkan pada nilai-nilai keadilan sosial, yang ujungnya

meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu perjuangan membangun tata dunia baru yang bersendikan pada nilai-nilai kemanusiaan masih relevan untuk dikedepankan.

4.6.3. Berdikari

Pemahaman kontekstual terhadap strategi berdikari berkaitan dengan keadaan bangsa Indonesia dengan wilayah yang besar yang didukung dengan sumber daya alam yang melimpah, persoalan tinggal bagaimana cara mengloala. Apa yang tercantum Pasal 33 UUD '45, dengan jelas bagaiman cara pengloalan dan pemanfaatan sumber –sumber kekayaan alam yang menguasai hidup orang banyak dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk untuk itu tinggal mencari model pembangunan yang tepat untuk pengloalan itu. Dalam melaksanakan amanat sesuai dengan pasal UUD'45 itu, Sukarno menerapkan strategi “Berdikari” dalam pembangunan ekonomi. Pada pidato 17 Agustus 1965, menyatakan:

“Berdikari dalam ekonomi. Apa yang lebih kokoh daripada ini Saudara-Saudara? Seperti kukatakan di depan MPRS tempo hari, kita harsu bersandar pada dana dan tenaga yang memang sudah di tangan kita-kita dan menggunakan semaksimal-maksimalnya. Pepatah lama “ayam mati dalam lumbung harus kita akhiri, sekali dan buat selama-lamanya. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk memecahkan masalah sandang pangan”

Secara tekstual, kutipan memberikan makna bahwa tujuan berdikari adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Ungkapan “Ayam mati dalam dilumbung harus kita akhiri” adalah sebuah ungkapan paradox untuk mengingatkan apabila pembangunan tidak dilaksanakan dengan kekuatan sendiri. Apa yang dikatakannya bukan hal yang kosong. Dalam kenyataan sejarah pun demikian, kepulauan Nusantara dari zaman dulu adalah pemasok rempah-rempah untuk masyarakat Eropa. Melalui *jalur sutera*, rempah-rempah di angkut ke selat

Bosporus, oleh kapal Eropa menuju kota pelabuhan Venesia (Italia), yang pada saat itu kota perdagangan abad pertengahan. Jatuhnya Kostantinopel di tangan Turki, dan sejak itu pula Turki menutup selat Bosporus sebagai lalu lintas perdagangan.

Akibat tertutupnya Selat Bosporus, barang-barang kebutuhan pokok Eropatertahan, mengakibatkan petualng-petualang Eropa coba-coba mencari jalan lain ke Asia. Para petualang itu mencoba menyakinkan diri, sesuai apa yang di dalilkan Corpenicus bahwa bumi ini bundar. Mereka berlayar ke bagian selatan Benua Afrika hingga menemukan sebuah tanjung yang merka sebut Tanjung Harapan. Dari belahan selatan Afrika mereka melayarkan kapal;nya ker utara mengikuti Pantai Afrika dan dari sebelah Timur Arabia sampai ke lautan Hindia, mencapai Kolombo. Mereka melanjutkan pelayarannya sampai ke Perairan Indonesia, di mana barang yang di impi-impikannya, yaitu rempah-rempah bisa ditemukan. Bahkan Columbus, penemu benua Amerika, seperti yang di ceritakan John Perkin (12:2006), sebelum terdampar di kepulauan Amerika, tanah yang di cari sebenarnya adalah kepulauan Nusantara yang sudah masyur sebagai penghasil rempah-rempah.

Dengan demikian strategi “Berdikari” menjadi pilihan yang tidak bisa di tawar lagi. Dengan strategi ini, di harapkan, rakyat bisa berdaulat terhadap persolan-persoalan ekonomi. Untuk memecahkan persoalan ekonomi, Sukarno memberi perbandingan, seperti, “Perasaan dan pikiran saya mengenai ekonomi adalah sederhana, amat sederhana sekali. Boleh dirumuskan sebagai berikut: Kalau bangsa-

bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persoalan ekonominya, kenapa kita tidak?”.(Amanat Proklamasi IV:99)

Pernyataan itu memberi penjelasan bahwa dengan wilayah yang luas dan sumber kekayaan alam melimpah, cukup untuk memberi kemakmuran. Untuk itu dalam mempertegas arah pembangunan ekonomi pada tahun 1963 menggariskan yang di sebut dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dekon ini berisi 34 penjelasan tentang strategi dasar ekonomi Indonesia yang harus dijalankan. Untuk merealisasi strategi tersebut, di tempuh langkah-langkah yang progresif, di antaranya adalah: 1). Landreform¹, 2) Pembentukan Dewan Perusahaan², 3) Pembangunan Semesta Berencana³, 4) Nasionalisasi Perusahaan Asing.⁴

Langkah-langkah tersebut merupakan upaya Sukarno mengembalikan kedudukan rakyat sebagai kekuatan ekonomi. Menurutnya, rakyat adalah pemilik alat produksi sehingga kedaulatan ekonomi harus ditanganya yang selama masa kolonial di kuasai oleh para capital (pengusaha) dan kaum feodal. Kemerdekaan menjadi momen untuk mengembalikan sistem produksi ke tangan rakyat. Berbeda dengan system komunis yang menekankan pada pengambil-alihan dari sistem

¹ Tanggal 30 september 1960 di syahkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) NO.5 dan Undang-undang Pokok Bagi hasil (UUPBH) No.2 tahun 1960.

² Dewan Perusahaan adalah penempatan wakil-wakil buruh dalam Dewan direksi yang keputusan perusahaan harus mendapat persetujuan Dewan Direksi termasuk persetujuan wakil buruh.

³ Prioritas pembangunan dengan 8 bidang pembangunan, 1. *Mental dan rohani*, 2. Penelitian, 3. Kesejahteraan , 4. Pemerintahan, 5. Keamanan/Pertahanan, 6. Produksi, 7. Distribusi, 8. Keuangan. *Pembangunan Mental dan Rochani* menempati prioritas pertama.

⁴ Nasionalisasi adalah pengambil-alihan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, pada tahun 1957 di ambil perusahaan Belanda, tahun 1962 di ambil alih perusahaan Inggris, rencana pada tahun 1965 di ambil alih perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.

produksi capital ke tangan proletar dengan membentuk sistem *diktatur proletariat*. Pemilikan produksi di tangan rakyat, yang ia sebut dengan kaum marhaen, tidak hanya petani, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan.

Untuk itu dalam menjaga konsistensi terhadap kekuatan sendiri, Sukarno selektif terhadap bantuan/pinjaman modal dari luar, bahkan apabila tawaran bantuan/pinjaman modal mengandung persyaratan-persyaratan atau terlalu campur tangan terhadap kedaulatan Indonesai. Dalam suatu kesempatan Sukarno pernah berseru, “*go to hell with your aid*”. Membiarkan pinjaman luar masuk dengan segala persyaratan untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri sama halnya mengadaikan kedaulatan Indonesia di tangan asing. Dalam hal ini Sukarno berprinsip,

Di Amerika tempo hari saya katakan: lebih baik tiada bertraktor dan tiada berbuldozer daripada mengorbankan sebagaimana kecilpun daripada kedaulatan kita dan cita-cita kita, lebih baik kita membuka hutan dan menggaruk tanah kita dengan jari sepuluh dan kuku kita ini, daripada menjual serambut pun daripada kemerdekaan kita ini untuk dollar atau untuk rubbel, dan apa yang saya maksudkan dengan kata-kata itu niscaya tak mungkin berupa satu kenyataan, bila tidak dipikul oleh satu jiwa rakyat Indonesia yang benar-benar jiwa proklamasi”(DBR II:257)

Dari kutipan di atas, menunjukkan sikap waspada terhadap segala bentuk bantuan atau hutang yang sengaja di tawarkan yang sebenarnya maksud dibalik itu adalah untuk menguasai kembali kekayaan alam Indonesia. Pernyataan “menggaruk tanah kita dengan sepuluh jari dan kuku kita” adalah merupakan ungkapan metaforik akan bahayanya hutang luar negeri apabila tidak di sikapi secara hati-hati.

Dalam hubungan antara negara donor dan negara peminjam berlaku hubungan yang disebut dengan *the carrot stick theory*. Negara peminjam mendapatkan dana sesuai dengan keinginannya, tetapi dengan catatan bahwa negara peminjam dalam menjalankan proyek pembangunan di sesuaikan dengan kepentingan negara donor, seperti pembangunan jalan tol, jembatan, pelabuhan, pelistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan kebutuhan konsumsi produk industri negara donor (mobil, televisi, dll). Sebaliknya, sewaktu-waktu kepentingan negara donor tidak terpenuhi, misalnya, perencanaan pembangunan industri dasar atau pemberian subsidi terhadap rakyat kecil maka *the carrot* berubah menjadi “tongkat pemukul” memaksa negara peminjam memenuhi keinginan negara donor. Hubungan tersebut jelas menjauhkan suatu negara untuk berdiri di kaki sendiri, ketika negara sudah mengikatkan diri pada kepentingan negara donor. Kondisi demikian yang oleh Sukarno di sebut sebagai praktek-praktek neo-kolonialisme⁵.

Indonesia mempunyai pengalaman terhadap pinjaman yang disertai dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Pada periode 1950-1956 (Higgins:1957), pembuatan utang selalau di ikuti dengan adanya intervensi dari pemberi utang. Peristiwa pertama, intervensi asing dalam pemberian utang ini terjadi pada tahun 1950, ketika pemerintah AS bersedia memberikan pinjaman sebesar US\$ 100 juta (Ransom:2:2006). Melalui pemberian utang tersebut, pemerintrah Amerika Serikat (AS) menekan Indonesia untuk mengakui keberadaan pemerintah Bao Dai di

⁵Akan di bahas dalam sub bab Neokolonialisme

Vietnam. Karena tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi, pemberian pinjaman itu akhirnya tertunda pencairannya (Weinstein,210:1976)

Peristiwa kedua terjadi pada tahun 1952, setelah menyatakan komitmennya untuk memberikan pinjaman, pemerintah AS kemudian mengajukan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengembargo pengiriman bahan-bahan mentah strategis ke China. Sebagai negara produsen karet dan anggota PBB secara tidak langsung tuntutan tersebut “terpaksa” dipenuhi Indonesia.

Peristiwa yang paling dramatis terjadi pada tahun 1964, menyusul keterlibatan Inggris dalam konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal itu dengan menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi kedua yang dilakukan Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1956, dan rencana pada tahun 1965, menasionalisasi perusahaan Amerika Serikat.

Melalui berbagai pengalaman itu Soekarno bukan berarti anti terhadap pinjaman, melainkan kalau pinjaman itu disertai dengan berbagai persyaratan, ini berarti akan mengurangi kedaulatan Indonesia. Tercatat hutang Indonesia antara 1950 sampai 1956 sebesar \$33 miliar US.

Hal serupa pernah juga dilakukan oleh Pemimpin RRT MaoTse Tung, seperti yang diceritakan Yoesoef Isack dalam pengantar buku Zhou Enlai (xvii:2008). Pada saat Khrushchev, pemimpin Uni Soviet berkunjung ke Beijing pada tahun 1958 bertemu Mao dan Zhou Enlai. Demi “persahabatan abadi” Khrushchev membujuk Mao

membangun Pakta Pertahanan Bersama, dan ia juga tawarkan mendatangkan para ahli Uni Soviet guna memasang instalasi nuklir di Tiongkok. Mao menolak tawaran menarik itu sambil bertanya, “Jari siapa yang siap di atas tombol peluncuran? Berapa tahun kemudian baru terungkap kata-kata pedas kedua pemimpin itu. Mao konon mengatakan dengan rasa percaya diri: “Walaupun harus pakai celana kolor, Tiongkok mandiri akan membangun instalasi nuklirnya sendiri, dan juga oleh ahli-ahli Tiongkok sendiri”, dan Krushev menimpali, “Ah, petani Cina, celana kolor pun tak punya!”

Pada dasawarsa 1960-an, barat dan sekutunya secara masif mengkampanyekan tentang proyek ‘modernisasi’ yang mengedepankan pada paradigma pembangunan sebagai suatu perspektif yang tunggal arah (*unilinear*) (Nasution:37:2002). Dalam prakteknya, ternyata modernisasi berkembang dalam bentuk *westernisasi* dalam arti, negara berkembang harus mengikuti dan menyalin sepenuhnya model pembangunan dari Barat.

Untuk kasus di Indonesia, melalui corongnya yang di sebut dengan “mafia barkley”, seperti Emil Salim, Widjojo Nitisastro. Sadli menyatakan bahwa menjalin kontak dengan negara maju (barat) pada dasarnya memberikan keuntungan bagi negara berkembang, seperti Indonesia (Budiman:xi:84). Alhasil, pada rezim orde baru berkuasa, konsep Rostow di “*copy paste*” habis untuk diterapkan di Indonesia. Istilah-istilah, seperti prakondisi tinggal landas, tinggal landas (*take off*), masa menjelang kedewasaan adalah istilah konsep pertumbuhan ekonomi Rostow yang

selalu didengungkan oleh penguasa Rezim Orde Baru untuk mengejar kemodernan seperti negara maju. Keyakinan itu ternyata hanyalah “pepesan kosong”, Indonesia luluh lantak di terjang badai krisis moneter pada tahun 1997, dan hutang luar negeri yang menggunung.

Kritik terhadap Rostow, seperti yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank (25:1984), menyatakan, “pendekatan Rostow mengabaikan kenyataan bahwa melalui hubungan –hubungan itu (imperialisme) negara-negara yang sekarang sudah maju telah menghancurkan sama sekali struktur yang pernah ada di masyarakat-masyarakat itu (apakah itu “tradisional atau tidak). Dari kritik itu, kemudian Frank(xiv:84) menjelaskan tentang teori depedensia, bahwa ketergantungan lebih merupakan akibat dari imperialisme ekonomi negara-negara maju yang sudah berhasil menciptakan suatu struktur ekonomi dependen di negara-negara berkembang.

Seiring dengan perjalanan waktu, imperialisme ekonomi akhirnya menggurita dalam suatu rezim globalisasi. Dengan mengusung “*free fight liberalism*”, dunia adalah pasar bebas dengan meminimalisir peran negara dalam urusan kesejahteraan rakyat. Jelasnya, seperti yang dikatakan Margareth Thatcher, PM Inggris dalam Setiawan(2002:2), yang menyatakan, prioritas pasar bebas adalah kompetisi-kompetisi di antara negara, di antara wilayah, di antara perusahaan-perusahaan, dan tentunya di antara individu, karena itu kompetisi dalam pasar bebas itu baik dan bijaksana. Dalam kompetisi mendalilkan bahwa yang besar dan kuat menjadi pemenang. Besar dan kuat ini adalah milik negara-negara maju, negara berkembang,

seperti Indonesia tak lain hanyalah sub ordinat bagi kekuasaan pasar bebas. Seperti yang di tulis oleh Moh Bedjoui (80:1989), “Negara-negaraa dominan tidak hanya menyadari masalah politik yang sedang dipertaruhkan, tetapi juga konsekuensi ekonomi dekolonialisasi, selain itu di usahakan pula sejauh mungkin membatasinya dengan hanya memberikan kemerdekaan yang nominal dan gadungan”.

Mekanisme pasar bebas yang berada dalam payung ideologi *neo liberal* mengusung tiga prinsip dasar: pasar bebas dalam barang dan jasa, perputaran modal yang bebas dan kebebasan investasi. Ketiga poin inilah yang menjadi *kredo* para elite ekonomi Indonesia dalam merumuskan kebijakan pembangunan, maka tak mengherankan apabila dalam kebijakan ekonomi terdengar istilah-istilah populer, seperti *deregulasi, privatisasi, liberalisasi*.

Dengan kenyataan tersebut, berdikari apabila dimaknai dalam perspektif neo liberal sebagai sesuatu hal yang berbanding terbalik. Berdikari merumuskan bahwa snegara sebagai pemegang komando ekonomi, seperti di ataur dalam pasal 33 UUD’45, kemudian susunan ekonomi nasional yang bebas dari kekuasaan modal asing, dan melenyapkan susunan ekonomi yang bersifat kolonial,. Serta dalam pembangunan memberikan priorotas kepada modal sendiri dan bahwa jika diperlukan modal dari luar, mengutamakan kredit dari pada penanaman modal asing.

4.7. Pandangan Sukarno Tentang Konstelasi Politik Internasional

Untuk pemaknaan referensial tentang pandangan Sukarno terhadap konstelasi politik internasional dapat di jelaskan sebagai berikut:

4.7.1. Neo Kolonialisme

Dalam pemaknaan tesktual yang dimaksud dengan neo kolonialisme adalah bentuk penjajahan baru. Penjajahan ini berbeda dengan penjajahan model lama, bahwa suatu bangsa menguasai langsung terhadap negara jajahan, seperti Inggris yang menguasai India dan kawasan Asia lainnya, serta Belanda menguasai Indonesia. Untuk membedakan bagaimana tipologi jajahan, Sukarno membedakan antara “*finanz capital* “ dan “*handelz capital*”. Untuk tipologi pertama, negara jajahan adalah tempat pengambilan sumber-sumber alam untuk keperluan industri negara penjajah, dan tempat pemasaran hasil industry. Tipologi ini dipraktekan Belanda terhadap negara jajahan Indonesia. Sedangkan pda “*handelz capital*” , negara jajahan hanya sebagai tempat pemasaran hasil industri, hal ini dipraktekan Inggris dengan negara jajahannya.

Kolonialisme yang berakar dari kapitalisme adalah nafsu penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi, Pada masa penjelajahan pada abad 15, bangsa Eropa memandang bangsa di luar dirinya adalah “*savage*” , oleh karena itu sudah menjadi tugas suci (*mission sacree*) untuk melakukan “*civilization*”-mengadabkan mereka. Seperti pengklasifikasian yang di lakukan von Liszt dalam Bedjaoui (48-51:1987),

“masyarakat terbagi dalam beradab, setengah beradab dan tidak beradab. Setiap negara beradab dapat tercakup di dalam kesatuan masyarakat internasional apabila segala sesuatunya di atur dan di akui oleh negara-negara Eropa. Dengan dalih “*civilization*”, mereka melakukan penguasaan atas wilayah Asia dan Afrika.

Berakhirnya perang dunia ke II, yang kemudian di ikuti dengan merdekasnya bangsa Asia-Afrika, tidak menyurutkan langkah negara barat untuk melakukan penguasaan. Melalui isu “*development*” ataupun “modernisasi menjadi dalih bagaimana penguasaan itu di lanjutkan tetapi tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui serangkaian program pembangunan yang berupa bantuan atau pinjaman. Menanggapi hal tersebut, Sukarno melontarkan apa yang di sebut dengan “Neo kolonialisme”, yang diungkapkan pada pidato Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung. Yaitu, suatu penjajahan baru yang dilakukan dalam serangkaian penguasaan secara tidak langsung terhadap sumber materiil maupun penguasaan intelektual terhadap suatu negeri. Robert Cribb dan Kahin (294:2004) mendefinisikan neo kolonialisme sebagai, “*to describe what he saw as the major international enemies of the indonesian people and reflecting his understanding that formal independence did not necessarily mean an end to imperialist control*”

Ronald H. Chilote (57:1982) juga berpendapat bahwa neo kolonialisme adalah suatu strategi dalam tahapan imperialism setelah berakhirnya Perang Dunia II. Ciri-cirinya adalah monopoli dan munculnya suatu system internasional korporasi. Sedangkan tujuan dari korporasi sejagat, seperti yang dikatakan oleh Aurelio Peccel),

seorang organisator Club Roma dalam Barnett(2:1983), menyatakan “Korporasi sejagat adalah agen paling kuat bagi internasionalisasi masyarakat ...Korporasi sejagat sedang menghantarkan suatu perekonomian dunia yang sejati dalam sebuah pusat perbelanjaan dunia”.

Sejalan dengan pendapat di atas, untuk mendorong adanya perluasan pasar bebas (liberalisasi) atau globalisasi isu yang dikembangkan pun berubah tidak sekedar “modernisasi” tetapi meluas dalam beragam isu, seperti demokratisasi, hak azasi manusia (HAM), penegakan hukum (*law enforcement*), pemerintahan yang bersih (*good government*), dan lingkungan hidup (*environment*). Isu-isu tersebut menjadi alat untuk memaksakan kehendak terhadap negara berkembang. Apabila, suatu rezim menentang atau tidak mematuhi, maka tidak segan-segan kekuatan neo kolonialis akan mengganti suatu rezim sebelumnya dengan rezim yang baru, baik langsung ataupun tidak langsung.

Sukarno sendiri merupakan korban dari kekuatan neo kolonialisme, dengan di dahului huru-hara politik peristiwa G. 30. S. PKI. Hal ini dapat di lihat dari Memorandum dari Staf Dewan Keamanan Nasional, Michael V. Forrestal untuk Asisten Khusus Presiden Urusan Keamanan Nasional (Bundy), tanggal 6 Januari 1964, salah satu bagian dari memo itu menyatakan, “Sementara itu, menurut saya kita harus menjiwai kembali upaya diplomatic yang lebih kuat dan sungguh-sungguh untuk mengecilkan (mengebiri) kekuasaan Sukarno, dengan menggunakan pengaruh apapun

yang masih ada pada kita saat ini terkait dengan program bantuan di Indonesia.”

(Dokumen CIA:13:2002)

Masalah penguasaan material- sumber ekonomi, yang kemudian menghasilkan penindasan dan penghisapan terhadap manusia. Marx mendalilkan bahwa sejarah manusia selalu berlangsung penindasan dan penghisapan sebagai akibat dari sistem produksi ekonomi di karenakan jumlah yang tersedia amat terbatas. Di satu sisi, adanya pihak yang kuat menginginkan penguasaan secara berlebih dan berlangsung terus-menerus, sementara di sisi lain adanya pihak yang selalu tereksploitasi dari sumber ekonominya. Dalam hal ini, Marx hanya menitik beratkan pada hubungan yang spesifik, yaitu penjajahan berlangsung hanya antara manusia dengan manusia- pemilik modal dengan proletar (buruh).

Sedangkan, penindasan dan penghisapan bisa juga berlangsung meluas melewati batas-batas negara. Seperti yang di tegaskan Sukarno (DBR I:1), “Kekurangan rezeki itulah yang menjadi sebab rakyat-rakyat Eropa mencari rezeki di negeri lain. Itulah pula yang menjadi sebab rakyat-rakyat itu menjajah negeri-negeri, dimana mereka bisa mendapat rezeki itu”. Dalam pandangannya, Sukarno mengadakan pergeseran level bahwa tidak sekedar penindasan berlangsung antara pemilik modal dengan buruh, melainkan penindasan itu berlangsung antara bangsa dengan bangsa lain,-penindasan yang dilakukan oleh bangsa penjajah dengan bangsa yang terjajah. Melalui risalah “Indonesia Menggugat”, Sukarno menelanjangi praktek kapitalisme yang dilakukan oleh kolonialisme Belanda dengan mengangkut

kekayaan Indonesia sebesar 1.500.000.000 gulden per tahun, sebaliknya rakyat Indonesia hanya mendapat 4-5 sen sehari, padahal ia membutuhkan 300 sen.

Dalam level yang lebih lanjut, Sukarno melihat bahwa yang namanya penjajahan bisa dilakukan dalam bentuk dan cara yang baru. Penjajahan dengan cara penguasaan langsung terhadap suatu bangsa di anggap sudah kuno. Adanya penjajahan dalam bentuk lain, yaitu penguasaan tidak langsung terhadap suatu bangsa yang ia sebut sebagai penjajahan “*by proxy*”, penjajahan “*by remote control*” atau yang di sebut juga dengan neokolonialisme. Praktek dari penjajahan ini di samping penguasaan sistem ekonomi yang disesuaikan dengan kepentingan penjajah, juga penguasaan dalam bentuk intelektual, gaya hidup, maupun kultural. Menurutnya, praktek penjajahan seperti ini lebih berbahaya daripada penjajahan langsung karena ia berada dan hidup di tengah masyarakat. Contohnya, seperti yang di wacanakan para pakar ekonomi yang berhaluan neo liberal, untuk mendorong integrasi pada mekanisme ekonomi pasar, para pakar ekonomi tadi mendorong supaya dilakukan privatisasi perusahaan-perusahaan negara supaya mempunyai daya saing ditengah kompetisi global, dan juga paket kebijakan lain yang ujungnya adalah liberalisasi ekonomi. Sukarno menyebut “pakar’ tersebut sebagai intelektual “*textbook thinking*” atau “*Holland denken*”, yang selalu melakukan *copy paste* dari luar untuk di terapkan di Indonesia.

Untuk bisa lebih memahami wacana ini, baiknya coba melihat apa yang dikembangkan oleh Mazhab kritis. Titik perhatian dari mazhab ini, pada sebuah

bentuk rasionalitas-teknologi modern. Salah satu pemikirnya, Herbert Marcuse dalam Ritzer dan Goodman(303:2009, mengkritik bahwa teknologi modern, paling tidak sebagaimana yang dijalankan dibawah system kapitalisme. Ia melihat bahwa teknologi di masyarakat kapitalis modern mengarah pada totaliterisme. Ia melihatnya mengarah pada metode kontrol eksternal terhadap individu yang baru, lebih efektif dan bahkan lebih “menyenangkan “. Marcuse menolak gagasan bahwa teknologi bersifat netral di dunia modern dan justru sarana untuk mendominasi rakyat.

Begitu pula dengan Foucault (Foucault:1966), pemikir post strukturalis menjelaskan tentang geneologi kekuasaan, bahwa ada hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, bagaimana orang mengatur diri dan orang lain melalui produksi kekuasaan. Di antaranya ia melihat pengetahuan membangun kekuasaan dengan menjadikan orang sebagai subyek dan selanjutnya mengatur subyek dengan pengetahuan. Foucault tertarik pada teknik, teknologi yang berasal dari pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan oleh berbagai institusi untuk menjalankan kekuasaan atas orang. Contoh kongkretnya, ketika di perempatan jalan raya menjumpai tanda lalu lintas yang menyala merah, seketika itu pengguna jalan lantas berhenti, tetapi ketika menyala hijau maka akan melanjutkan perjalanannya lagi para pengguna jalan tadi patuh terhadap rambu tersebut tanpa di awasi petugas. Pelanggaran dari rambu itu bisa berakibat fatal.

Berpijak pada Marcuse dan Foucault dapat dipahami bagaimana dominasi kekuasaan, kalau Sukarno menyebutnya dengan penjajahan itu dilakukan melalui

pengetahuan. Kendati, keduanya tidak menyebut negara atau bangsa sebagai subyek pemegang kuasa, tapi mereka sepakat bahwa subyek yang menjalankan kekuasaan adalah sistem kapitalisme.

Dalam prakteknya, kapitalisme sebagai sistem bisa beroperasi dimana saja, apakah itu orang, organisasi ataupun negara. Kapitalisme adalah nafsu untuk melakukan akumulasi modal, tetapi dalam proses akumulasi menyebabkan penyengsaraan terhadap buruh, karena adanya nilai lebih yang harusnya dibayarkan pada buruh tetapi di ambil oleh pemilik modal. Sistem ini ketika berintegrasi dengan negara, maka berkembang nafsu perluasan wilayah untuk memasarkan hasil industri, dan sekarang tatanan dunia dengan mekanisme pasar bebas adalah manifestasi tahap lebih lanjut dari kapitalisme untuk terus melakukan dominasi. Walaupun dominasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, misalnya melalui pengetahuan-teknologi, pada ujungnya adalah bagaimana dominasi sumber ekonomi tetap berlangsung.

Dari perspektif tersebut, Sukarno telah melakukan pergeseran dari asumsi teoritiknya Marx, bahwa dominasi bukan sekedar relasi antara pemilik modal dengan proletar, melainkan antara bangsa dengan bangsa. Dalam tatanan modal, ketika semangat dominasi untuk memapankan system kapitalisme terhadap bangsa-bangsa yang baru merdeka (negara berkembang) berlanjut, maka Sukarno menandai fenomena itu sebagai neo kolonialisme, atau juga di sebut sebuah kekuatan lama yang mapan- *Old Established Forces* (Oldefo).

4.8. Kontekstualisasi, Relevansi Konstruksi Kekuatan Baru

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap konstruksi kekuatan baru dapat di jelaskan sebagai berikut:

4.8.1. New Emerging Forces (NEFO)

Neo kolonialisme adalah tahapan lanjut dari imperialisme sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme hegemoni. Di dalam neo kolonialisme terkandung proses –proses *verelendung*(penyengsaraan) yang meminggirkan nilai-nilai kemanusiaan. Menghimpun kekuatan dalam rangka melenyapkan imperialisme, Indonesia membangun hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tujuannya adalah perdamaian dunia yang adil tanpa penghisapan dan penjajahan. Menurut Sukarno, perdamaian dunia tidak akan tercapai kalau masih bercokol tirani dalam bentuk kolonialisme imperialisme. Kendati sudah terbentuk pakta-pakta perdamaian, seperti Pax Britanica, pax Nederlanica, Paz Americana. Dalam prakteknya, bentuk persatuan itu masih menjalankan aksi penguasaan atau penjajahan, maka sehingga upaya untuk menciptakan perdamaian dunia tidak akan tercapai. Dunia membutuhkan pax Humanica, perdamaian bagi seluruh umat manusia di bumi, dalam pengertian yang sebenarnya.

Tentang Pax Humanica ini, Sukarno menjelaskan, “ tiga tahun yang lalu saya mengajurkan Pax Humanica, manusai itu di mana-mana sama. Mankind is one. Hati nurani kemanusiaan, the Social Conscience of man, menyerapi jiwa semua makhluk

di seluruh muka bumi”. Untuk melaksanakan gagasan *pax humanica*, pada tahun 1955 Indonesia mensponsori Asia-Afrika di Bandung. Konferensi terbesar yang pertama di dunia setelah Perang Dunia II itu menjadi pijakan baru dalam menentukan kedaulatan negara-negara yang baru merdeka. Konferensi ini juga menjadi tenaga baru dalam mengubah polarisasi kekuatan dunia, karena pasca perang dunia ke II arah dunia hanya ditentukan dua kekuatan, yaitu Washington dan Moscow (Holsty:89:1982).

Seperti halnya juga di kemukakan oleh Sukarno (DBR:II:269), “bahwa di samping Washington dan Moscow, orang sekarang harus memperhitungkan adanya pool-pool baru seperti Cairo, New Delhi, dan... Jakarta!” Fenomena, dunia Timur sedang bangkit menarik perhatian dari seorang pakar komunikasi politk, Walter Lippman(Harsono:185:1985), menggambarkan, “ Air bah sedang menggulung mulai dari Maroko ke Tunisia, melalui Timur Tengah ke Iran, Ceylon, Singapura ke Indonesia, dan mungkin ke Taiwan dan Jepang.... kita harus mulai mengajukan kepada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang berangkali tidak dapat segera kita bisa jawab. Satu hubungan anatra Dunia Timur yang Merdeka dan Barat yang demokratis harus ditemukan”.

Penjelasan Lippman tersebut merupakan pengakuan terhadap eksistensi dari dunia Timur, dan memberi satu alternative hubungan yang harmonis di antara keduanya. Kendati demikian, dunia Barat sendiri begitu skeptis akan perkembangan yang berlangsung di dunia Timur, dan bahkan kenyataan yang muncul adalah

bagaimana menghalangi, kalau tidak di katakan sebagai sabotase. Amerika Serikat melalui Menlu Dulles membujuk Presiden Gamal Abdul Nasser untuk tidak menghadiri KAA di Bandung. Mesir merupakan pintu gerbang Timur Tengah, dan Afrika, ketidakhadiran Mesir mempengaruhi kesuksesan KAA. Begitu pula ketika rencana KAA ke II di Aljazahir, Nasser mengusulkan supaya Uni Soviet menjadi peserta Konferensi KAA ke II, karena negara itu banyak menyumbang bagi perjuangan rakyat Afro-Afrika, tetapi Tiongkok menolak yang di jawab oleh Zhou Enlai(303:2008), PM Tiongkok, dengan mengatakan, “Uni Soviet bukan bangsa Asia, dan bukan bangsa Afrika”. Persoalan sebenarnya, Mesir sebenarnya takut terhadap pinjaman yang telah diberikan Uni Soviet.

Tiongkok dan Indonesia sangat bernafsu untuk di selenggarakan Konferensi Asia Afrika ke II, dan tentu saja Amerika Latin termasuk peserta konferensi ini. Tujuannya adalah untuk menghadapi hegemoni global yang diperankan kekuatan lama, yaitu AS dan Uni Soviet, seperti yang di katakana Zhou Enlai (302:2008), “Kita meruntuhkan tembok-tembok yang hendak dibangun dua negara adidaya yang mengelilingi kita. Kita harus tampil keluar untuk dilihat dan di dengar”. Untuk melaksanakan rencana itu, Enlai mengadakan lawatan ke sejumlah negara Asia dan Afrika, dan ketika tiba di Mesir, Enlai membujuk Nasser menjadi sponsor untuk di adakan KAA ke II. Sedang, Sukarno juga melakukan hal yang sama yang ia juluki sebagai “Safari Berdikari”.

Konferensi itu gagal dilaksanakan, karena menjelang pelaksanaan terjadi kudeta politik di Aljazair dengan digulingkan Presiden Ben Bella dengan penguasa baru Boumedine. Selang beberapa bulan kemudian di Jakarta, tepatnya bulan September 1965 terjadi huru-hara politik yang menjadi awal jatuhnya kekuasaan Sukarno. Yang terjadi kemudian proyek ini di tunda untuk sementara waktu.

Untuk terbentuknya komunisme bersama membendung kekuatan neo kolonialisme, dan menghindarkan negara Asia dan Afrika terjebak pada pertarungan politik kepentingan negara adidaya, Indonesia mensponsori adanya Konferensi Tingkat Tinggi, yaitu Gerakan Non Blok. Konferensi pertama diadakan pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia, dan KTT Non Blok ke II di Kairo, Mesir tahun 1964

Begitu pula dalam meletakkan dasar ideologis bagi terbentuknya tatanan dunia baru yang penuh dengan perdamaian, Sukarno pada sidang PBB tahun 1960, menyatakan tentang "*To Build The World A New*"- membangun tata dunia baru. Dalam pernyataan pidato, ia mengusulkan Pancasila supaya menjadi Piagam PBB, karena tercantumnya Pancasila maka tatanan dunia akan penuh dengan perdamaian dan meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga yang namanya penjajahan dan penindasan akan lenyap di muka bumi. Sebelum menyampaikan hal itu, terlebih dahulu Sukarno mengoreksi apa yang pernah disampaikan oleh Bertrand Russell yang berpendapat, bahwa dunia ini hanya ada dua kekuatan besar, yaitu *Declaration of Independence* dan *Manifesto Communist*. Menurutnya, masing-masing ideologi tersebut mempunyai kekurangan fundamental, bahwa *Declaration of Independence*

tidak pernah mengajarkan adanya nilai-nilai keadilan sosial, sedang *Manifesto Communis* terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya nilai-nilai Ketuhanan. Karena kekurangan itu, Pancasila merupakan sublimasi dari kedua ideology tersebut, karena di dalamnya memuat adanya nilai-nilai keadilan sosial dan ketuhanan.

Untuk mempertegas garis pemisah antara kaum sini dengan kaum sana, antara yang di dominasi dengan yang mendominasi. Sukarno memformulir tentang suatu kekuatan baru untuk melawan kekuatan lama, yang is sebut dengan New Emerging Forces (NEFO) dengan Old Established Forces (OLDEFO) . Sebelumnya, ia mengkoreksi teori “tiga kekuatan” dari Mao Zhe Dong yang membagi dunia dalam tiga kekuatan, dunia pertama mencerminkan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Soviet, kekuatan kedua, Eropa Barat, RRT, Jepang dan Australia, dan kekuatan ketiga adalah negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian, Sukarno mencetuskan apa yang di sebut dengan “teori dua kekuatan” yaitu kubu Nefo dengan kubu Oldefo. Seperti yang di ungkapkan dalam pidatonya, “Adapun RI sendiri, Ri tidak dikenal dunia tidak menganut “teori tiga kekuatan”, karena RI membagi dunia hanya dalam dua kubu, yaitu kubu Nefo, Nefo revolusioner dan kubunya Oldefo reaksioner. Itu adalah analisis yang obyektif dan kontelasi dunia dewasa ini (Amanat Proklamasi IV:81:1985).

Pada akhir tahun 1964 dan awal tahun 1965, suhu anti – Nekolim (Neokolonialisme, Neoimperialisme) sudah sampai ke ubun – ubun, sehingga amat

wajar jika pihak nekolim juga memaksimalkan upaya penyingkiran terhadap Bung Karno sebagai satu – satunya cara membatalkan CONEFO.

Pelaksanaan CONEFO itu direncanakan berlangsung di Jakarta. Untuk itu telah dipersiapkan sebuah gedung di jalan Gatot Subroto, yang sekarang menjadi gedung DPR – MPR. Garis Harsono, seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri) dalam bukunya menulis sebagai berikut :

“Pada minggu kedua bulan Oktober 1964 saya harus mendampingi Menlu Subandrio pergi ke istana Bogor. Seminggu sebelumnya saya diminta menlu menyiapkan sebuah daftar mengenai semua kebutuhan untuk membangun gedung konperensi modern seperti markas besar PBB. Daftar itu dibacakan presiden kepada tujuh orang arsitek muda di bawah pimpinan Ir.Sutami...Presiden berkata,”Nah, sebagaimana saudara – saudara lihat , banyak pekerjaan yang harus kita lakukan... sanggupkah saudara – saudara menyelesaikan pekerjaan raksasa ini dalam waktu dua puluh tiga bulan.”

Apabila dihitung sejak hari pertemuan ditambah dengan 23 bulan, maka CONEFO itu kira – kira akan berlangsung pada bulan September 1966. Sementara dalam pidato 15 Juni 1965, Bung Karno mengatakan bahwa CONEFO itu akan dilangsungkan pada 17 Agustus 1966.

Dalam pandangannya, Nefo—*New Emerging Forces*, adalah kekuatan raksasa baru yang tumbuh di dalam suatu proses dialektika sejarah yang tak dapat di elakan. Nefo sebagai kekuatan raksasa yang terdiri dari bangsa-bangsa dan golongan progresif yang hendak membangun satu dunia baru. Sejarah bangsa bukan lagi milik kekuatan bangsa tertentu yang mempunyai kekuasaan untuk mendominasi bangsa

lain, melainkan berkembang dalam kesetaraan untuk saling menghargai satu sama lain, melainkan berkembang dalam satu kesetaraan.

Berdasarkan ‘pembagian’ Nefo-Oldefo”, Sukarno merencanakan suatu kebijakan internasional baru. Setelah Konferensi Asia –Afrika, KTT Non Blok, kemudian akan di selenggarakan negara-negara Nefo yang rencananya akan di selenggarakan di Jakarta, tepatnya sekitar bulan Agustus 1966. Konferensi ini dimaksudkan sebagai “*Samenbudeling van alle International Revolutionaire krachten*” sebagai upaya untuk mematahkan dominasi kekuatan neo kolonialisme. Agenda penting yang akan di putuskan dalam Konferensi itu adalah memutus garis hidup neo kolonialisme dengan cara negara-negara yang tergabung dalam Nefo tidak akan membeli produk industri mereka. Dalam penjelasannya, Sukarno, menyatakan”

“aku tahu bahwa tak pernah imperialisme itu menyerah dengan sukarela . Mereka hanya menyerah , jika mereka di paksa... dengan *machtsvorming* dan *machtsaanwending*, nasional dan internasional. Di sinilah letak pentingnya Conefo, karena melalui Conefo kita akan menggalang *Samenbudeling van alle International Revolutionaire krachten* “. (Amanat Proklamasi IV:185)

Penyebutan kata ”*machtsvorming* dan *machtsaanwending*” dalam pembentukan Nefo adalah metode atau cara bagi Sukarno untuk melaksanakan apa yang dimaksud dengan revolusi dunia. Melalui penggalangan internasional melawan kekuatan yang ingin mendominasi dan menghegemoni bangsa lain. Kinginan untuk mendudukan Pancasila sebagai Piagam PBB, setidaknya Sukarno hendak memberi landasan ideologi bagaimana *machtvoorming* itu dilakukan. Seperti yang di katakannya, “ Pancasila adalah-seperti kukatakan,- satu *hogrere optreking* dari pada

Declaration of Independence dan *Manifesto Komunis* bahkan lebih jauh lagi dari pada itu saya telah sering berkata: revolusi Indonesia adalah satu “*verbeterde editie*”, dan Insya Allah satu “*laste editie*” daripada revolusi-revolusi di dunia sekarang itu”(Amanat Proklamasi IV:208) .

Dalam pandangannya, sejarah dunia selalu berlangsung penaklukan antara bangsa satu dengan bangsa lain, yang berakibat pada tercerabutnya nilai-nilai kemanusiaan. Seperti tertulis dalam sejarah dunia yang pernah dilakukan para megalomaniak, seperti Jenghis Khan, Alexander Agung ataupun Imperium Romawi atau juga Eropa dalam masa penjelajahan menguasai Asia-Afrika maupun Amerika Latin. Penguasaan seperti harus di akhiri, dan dunia harus menuju suatu tatanan dunia baru yang saling menghormati, memberi tempat yang tinggi pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian dalam tatanan internasional terbentuk suatu hubungan yang saling menghargai dan menghormati, seperti yang di gambarkan Sukarno pada pidato Pancasila 1 Juni 1945, “ Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dsalam taman sarinya internasionalisme”.

Berpijak pada perspektif teori tentang hubungan internasional, seperti teori realis, yang menyatakan institusi internasional memungkinkan negara meninggalkan keuntungan jangka pendek untuk meraih keuntungan jangka panjang, para realis seperti, Joseph Grieco dan Stephen Krasner menyatakan bahwa sistem yang anarkis memaksa negara untuk memperhatikan secara bersamaan: 1) *absolute gains* dari

kerjasama dan; 2) aturan main dalam distribusi keuntungan di antara partisipan. Logikanya adalah, jika sebuah negara mendapatkan keuntungan lebih besar dari yang lain maka ia secara gradual akan semakin kuat. Sementara negara yang lain akan semakin rentan (vulnerable)¹. Teori ini berpedoman pada realisme politik dari H.J. Morgenthau yang berpendapat bahwa, “politik internasional sebagaimana semua politik adalah perjuangan kekuatan”..

Begitu juga dalam aliran liberal-ekonomik berpendapat bahwa “globalisasi” pasar dunia, kemunculan jaringan transnasional dan NGO dan penyebaran yang cepat teknologi komunikasi global mengurangi power dari negara-negara dan mengubah perhatian dunia dari persoalan keamanan militer ke persoalan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Sedangkan kalangan Marxis, menjelaskan teori bahwa bila diperlukan untuk memberikan pengertian sesingkat mungkin tentang imperialisme adalah tahap monopoli dari kapitalisme. Apabila penghisapan kapitalisme telah tumbuh mekar menjadi mendunia yang berlandaskan rangkaian panjang basis militer dan politik di seluruh dunia, maka revolusi harus menyerang rangkaian itu pada mata rantai yang paling lemah. Penjelasan dari Lenin ini tidak lain merupakan pengembangan dari “revolusi dunia” dari Marx dan Engels yang menyatakan bahwa suatu revolusi komunis untuk dapat berhasil harus melampaui perbatasan-perbatasan nasional, revolusi seperti itu mesti pecah secara serentak di mana konflik kelas di antara

¹ <http://suicunesoul.blogspot.com/2008/12/teori-teori-dalam-hubungan.html>

borjuasi dan proletariat telah cukup matang. Dalam hal ini, Lenin akhirnya meletakkan dasar tentang “revolusi tidak terputus-putus”.

Dalam perspektif teori, Nefo berbeda dengan teori realisme dan liberalisme berfokus pada faktor-faktor yang bersifat material seperti power dan perdagangan maka seperti halnya dengan teori konstruktivis, Nefo berfokus pada ide. Dalam teori konstruktivis memberikan perhatiannya pada kepentingan dan identitas negara sebagai produk yang dapat dibentuk dari proses sejarah yang khusus, dan juga memberi perhatian pada wacana umum yang ada ditengah masyarakat karena wacana merefleksikan dan membentuk keyakinan dan kepentingan, dan mempertahankan norma-norma yang menjadi landasan bertindak masyarakat. Bagi Soekarno, fenomena neo kolonialisme yang merupakan transformasi dari kekuatan Oldefo yang ingin tetap mendominasi, memberi pijakan sejarah untuk mengkonsolidasi kekuatan negara –negara yang baru merdeka menentang dominasi kekuatan Oldefo. Dengan demikian, Nefo, memberi perhatian, bagaimana perubahan tatanan dunia itu berlangsung.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Wacana melalui teks pidato tidak dapat diinterpretasikan dengan cara yang sama ketika teks itu diproduksi. Interpretasi tekstual justru berlangsung ketika produsen teks tidak ada di tempat, dan teks sudah menjelma dalam bentuk dokumen-dokumen historis. Oleh karena, pengalaman manusia (konstruksi) yang diungkapkannya dalam bentuk bahasa tampak asing bagi pembaca berikutnya maka perlulah untuk di tafsirkan secara benar. Untuk itu, studi interpretatif tentang komunikator politik dalam penciptaan konstruksi terhadap realitas sosial bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh terhadap suatu konstruksi melalui sebuah teks. Dengan demikian, bahwa setiap interpretasi adalah usaha untuk "membongkar" makna-makna yang masih terselubung atau usaha membuka lipatan-lipatan dari tingkat makna yang terkandung dalam makna teks.

Dalam analisa tekstual Ricouer, terdapat dua tahapan penafsiran atau lingkaran hermeneutika), yaitu penjelasan dan pemahaman atau dekontekstualisasi dan kontekstualisasi. Untuk melakukan pemahaman terhadap suatu konstruksi sehingga di dapatkan suatu pemaknaan. Peneliti tidak berangkat dari nol, melainkan berpijak pada seperangkat teori yang menjadi pemandu untuk membuat kategori-kategori, sehingga dapat ditentukan tema-tema kunci yang relevan dengan konteks penelitian.

Dengan pendekatan terhadap teori konstruksi social Berger & Luchmaan tentang "*moment dialektis*", menjelaskan bahwa dalam masyarakat berlangsung dialektika, dan dialektika berlangsung dalam 3 (tiga) moment secara simultan. *Pertama*, eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. *Kedua*, obyektivasi, yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Sedangkan ketiga, internalisasi, yaitu proses dimana individu mengidentifikasi dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

Melalui pendekatan teori konstruksi social, dikaitkan dengan teks "Konstruksi Kekuatan Baru" Soekarno, maka dapat ditentukan kategori-kategori, seperti yang dinyatakan dalam rumusan masalah penelitian ini, yaitu latar kehidupan Sukarno, pandangan Sukarno tentang Indonesia, pandangan Sukarno terhadap realitas politik internasional, dan kontekstualisasi dan relevansi konstruksi kekuatan baru. Berdasarkan pada pengkategorian tersebut, ditentukan tema-tema kunci, seperti persatuan nasional, revolusi, berdikari, neo kolonialisme, nefe, dan pax humanica.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam interpretasi terhadap teks pidato Soekarno tentang "Kontruksi Kekuatan Baru", di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang kehidupan Soekarno sangat berpengaruh terhadap pembentukan "Kontruksi Kekuatan Baru". Ini terlihat dengan di kenalkanya istilah "Twat Ansi" oleh ayahnya, masa kecil yang serba kekurangan, keluar masuk penjara pada masa pergerakan melawan kolonial memberi pengaruh terhadap cara berpikir

dan bertindak Soekarno untuk membangun tatanan sosial yang bebas dari penindasan dan penghisapan. Konstruksi yang dibangun pemerintah kolonial untuk membenarkan tindakannya, dalam konstruksi Berger & Luchmann sebagai "momen eksternalisasi" tidak dipahami secara obyektif untuk larut dalam politik kolonial, melainkan secara subyektif oleh Soekarno untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, yang oleh Berger & Luchmann disebut sebagai penyimpangan selama konstruksi. Konsistensi untuk melakukan perlawanan terhadap segala praktek penindasan dan penghisapan terus berlanjut ketika Soekarno berada dalam masa *machtanwending* sebagai pemimpin nasional yang di formulasikan dalam pembentukan "kekuatan baru atau Nefo".

2. Dalam pandangan Soekarno, Indonesia adalah negara besar dalam pengertian, besar dalam kewilayahan, keragaman etnis dan budaya, dengan persatuan nasional yang di manifestasikan dalam kesatuan ideologis di harapkan dapat di capai kesamaan tujuan membangun Indonesia. Melalui persatuan merupakan tempat bagi proses interaksi dari elemen yang berbeda sehingga tumbuh benih-benih kebudayaan yang menjadi tiang bagi peradaban Indonesia.

Eegitu juga dalam menuju Indonesia yang besar peradabanya, harus di jalankan dengan revolusi, yaitu dengan membongkar tatanan lama, kemudian membangun tatanan baru, dan revolusi tidak di jalankan hanya sekali, melainkan di lakukan dengan berbagai tahapan. Revolusi tidak sekedar membangun peradaban Indonesia, melainkan juga menyeluruh ke belahan dunia, yang ia sebut dengan revolusi kemanusiaan.

Untuk melaksanakan revolusi harus dijalankan dengan berdikari-berdiri di kaki sendiri. Karena dengan kekuatan sendiri, di hindarkan dari campur tangan kekuatan luar yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia.

3. Dalam pandangan Soekarno, dalam tatan politik internasional masih terdapat kekuatan lama yang masih bercokol dan ingin tetap mendominasi dunia dengan watak imperialis-kapitalistik dalam memaksakan kehendaknya terhadap negara-negara yang baru dengan jalan mengadakan tekanan, campur tangan dan intervensi, bahkan kalau bisa mengadakan penguasaan secara tidak langsung. Oleh Soekarno, praktek semacam itu di beri label sebagai "neo kolonialisme". Tatanan yang tidak seimbang itu, menggerakkan Soekarno untuk mengkonsolidir kekuatan dengan cara menggorganisir negara-negara baru yang ia sebut sebagai *New Emerging Forces* (NEFO), yang mempunyai tujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan ingin memperjuangkan keadilan sosial serta menentang penghisapan manusia oleh manusia atau bangsa oleh bangsa lainnya dalam bentuk apapun.

Dalam perspektif teori, Nefo berbeda dengan teori realisme dan liberalisme berfokus pada faktor-faktor yang bersifat material seperti power dan perdagangan maka seperti halnya dengan teori konstruktivis, Nefo berfokus pada ide. Dalam teori konstruktivis memberikan perhatiannya pada kepentingan dan identitas negara sebagai produk yang dapat dibentuk dari proses sejarah yang khusus, dan juga memberi perhatian pada wacana umum yang ada ditengah masyarakat karena wacana merefleksikan dan membentuk keyakinan dan kepentingan, dan mempertahankan norma-norma yang menjadi landasan bertindak masyarakat.

Bagi Soekarno, fenomena neo kolonialisme yang merupakan transformasi dari kekuatan Oldefo yang ingin tetap mendominasi, memberi pijakan sejarah untuk mengkonsolidasi kekuatan negara –negara yang baru merdeka menentang dominasi kekuatan Oldefo. Dengan demikian, Nefo, memberi perhatian, bagaimana perubahan tatanan dunia itu berlangsung.

4. Kekuatan Oldefo adalah kekuatan yang dipersepsikan sebagai kekuatan hegemoni yang meminggirkan kedaulatan bangsa maupun nilai-nilai kemanusiaan. Praktek politik Oldefo tak ubahnya sebagai penjajahan baru atau neo kolonialisme. Melalui “kekuatan baru-Nefo”, Soekarno hendak membangunkan kesadaran bahwa merdeka adalah hak setiap bangsa, adalah hak setiap manusia. Tiap-tiap insan ciptaan Tuhan mempunyai hak yang sama di atas bumi, oleh karena itu pula memperoleh hak yang sama untuk memiliki dunia secara bersama, memiliki hak atas diri sendiri, memiliki hak azasi.

Keadaan sekarang, wajah dunia yang masih di warnai dengan berbagai konflik internasional yang silih berganti dengan berbagai sebab dan kepentingan, begitu juga dengan ideology liberal dengan mekanisme pasar bebas secara tidak langsung melahirkan berbagai ketimpangan-ketimpangan ekonomi, maka ide Soekarno tentang *Pax humanica* –persatuan umat manusia adalah *social conscience of man*-budi nurani manusia yang memberi pijakan terhadap keluhuran hak manusia untuk hidup sederajat dengan yang lain tanpa penindasan dan penghisapan.

memperioritaskan pada kedaulatan bangsa dan tatanan dunia yang lebih mengatualkan pada nilai-nilai kemanusiaan.

5.2. Saran-Saran

1. Kajian hermeneutika dalam penelitian ilmu komunikasi memberikan pemahaman bahwa komunikasi itu tidak terbatas, bisa hadir di mana saja menembus ruang dan waktu menyesuaikan dengan konteks dan kontekstualitas dengan perkembangan zaman. Dokumen-Dokumen arkeologis tidak sekedar hanya sebagai fosil yang berfungsi pengingat keberadaan masa lalu, melainkan akan bernilai dan mempunyai *spirit* untuk generasi berikutnya melalui pemahaman dan penafsiran. Tidak sekedar itu, hermeneutika juga memberi petunjuk bagaimana suatu komunitas masyarakat melakukan transformasi simbol-simbol sebagai reaksi terhadap fenomena-fenomena yang hadir dalam bentuk teks.

Peran bahasa menjadi sentral dalam hermeneutika, sebab bahasa menjadi penghantar bagaimana proses pemahaman dan penafsiran itu dilakukan. Dengan demikian, ilmu bahasa, bahkan antropologi menjadi pijakan dalam pendekatan komunikasi, seperti pendekatan yang sudah mapan lain, yaitu, sosiologi, psikologi maupun politik.

Untuk itu perlunya aplikasi hermeneutika dalam penelitian komunikasi dengan menerapkan berbagai variasi teori-teori hermeneutika. Dengan demikian dapat membuka cakrawala bahwa ilmu komunikasi sebagai "ladang yang luas" yang mempunyai manfaat terhadap kehidupan manusia.

2. Dalam pembuatan kebijakan, khususnya dalam hubungan internasional hendaknya bertitik tolak dari kepentingan nasional, yaitu terbentuknya kesejahteraan masyarakat, sehingga bentuk bentuk kerjasama internasional yang dilakukan

Daftar Pustaka

- Adam, Cindy, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1988
- Anderson, Ben, *Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang Dan Perlawanan Di Jawa, 1944-1946*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1988
- Ardianto, Elvinaro & Bambang Q-Anees, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2007
- Barnet, J. Richard, *Menjangkau Dunia*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Berger, Peter L & Thomas Luchmman, *The Social Construction Of Reality*, NY: A Double Day Anchor Book, 1967
- Benhard, Dahm, *Sukarno Dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, 1987
- Bedjoui, Muhamad, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta, 2008
- Chilote, H, Richard, *Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme*, Sahe Study, Jakarta, 1999
- Danusmoro, Winoto, *Perjalanan Sukarno Ke Amerika dan Eropa*, Grafica, Jakarta, 1956
- De Vito, Joseph, *Komunikasi Antar Manusia*, Profesional Book, Jakarta, 1997
- Djajasudarma, T. Fatimah, *Semantik I: Pengantar Ke Arah Ilmu Makna*, Refika, Jakarta, 1999

Djajasudarma, T. Fatimah, *Semantik II: Pengantar Ke Arah Ilmu Makna*, Refika, Jakarta, 1999

Doktrin Revolusi Indonesia, Djawatan Penerangan, Propinsi Jawa Timur, Surabaya, 1965

Feith, L. Castel, Herbert, *Pemikiran Politik Indonesia, 1945-1965*, LP3ES, Jakarta, 1989

Fiske, John, *Cultural And Communication*, Jalasutera, Yogyakarta, 1990

Gadamer, Hans Georg, *Hermeneutika Filosofis*, Arr Ruzz Media Group, Yogyakarta, 2008

Gunder Frank, Andree, *Sosiologi Pembangunan Dan Keterbelakangan Sosiologi*, Yayasan Ilmu Sosial, Jakarta, 1984

Green, Marshal, *Dari Sukarno ke Suharto*, Grafitti, Jakarta, 1995

Grondin, Jean, *Sejarah Hermeneutika*, Arr Ruszz Media Group, Yogyakarta, 2007

Harsono, Ganis, *Cakrawala Politik Era Suakrno*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1985

Habermas, Jurgen, *Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat Jilid I*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007

-----, *Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat Jilid II*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007

Howard, Roy J, *Hermeneutika: Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, Penerbit Nuansa, Jakarta, 2001

Hamad. Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit. Jakarta, 2004

Hatta, Mohamad, *Memoirs*, Tintamas, 1982, Jakarta

-----, *Mendnyung Di antara Dua Karang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977

-----, *Demokrasi Kita*, Panji Masyarakat, Jakarta, 1960

Hoed, Benny H., *Semiotik Dan Dinamika Sosial Budaya*, FIB UI Depok., Jakarta, 2008

Hikam, Moehamad AS, *Negara Dan Civil Society*, *Refleksi Atas Pemikiran Gus Dur*, Dalam Achmad Fathoni Rodli dan Fahrudin Salim (eds. Berguru Pada Bapak Bangsa: Kumpulan Esai Menelusuri Jejak Pemikiran KH. Abdurahman Wahid, Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor

Jorgensen, Marianne W dan Phillips Lousi J, *Analisis Wacana*, Teori dan Metode, Pustaka, pelajar, Jakarta, 2007

Kaeian, *Filsafat Bahasa*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2002

Kahin, George Mc Turner, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*, Grafiti Press, Jakarta, 1984

Kurzweil, Edith, *Jaring Kuasa Strukturalisme*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2004

Krech, David, Richard Crutchild, and Egerton L. Ballachey, 1983. *Individual in Society*, Auckland: Mc Grew-Hill International Book Company.

Littlejohn, Stephen W. *Theories of Communication Studies*, California Wadworth Publishing Company, 1999.

-----, *Theories of Communication Studies ed:9*, Salemba Humanika, Jakarta, 2009

- Nimmo, Dann, *Komunikasi Politik*, Rodakarya, Bandung, 2003
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2008
- Mulyana, Deddy & Solatun, *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosdakarya, Bandung, 2008
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Noti, W, *Handbook of Semiotic*, Bloomington/Indianapolis, Indiana University Press, 1995
- Oetomo, Dede, *Pelahiran Dan Perkembangan Analisis Wacana*, dalam Bambang Kaswanti Purwo (ed), *Pelba-Analisi Wacana*, Pengajaran Bahasa, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKIS, 2007
- Leech, Geoffrey, *Prinsip-Prinsip Pragmatik*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 2003
- Nasution, Zulkarimen, *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1990
- Poespoprodjo, *Hermeneutika*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Raharjo, Mudjia, *Dasar-Dasar Hermeneutika*, Arr-Ruz Media, Yogyakarta, 2008
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Kreasi Wacana Yogyakarta, 2008

- Ricouer, Paul, *Filsafat Wacana, Membelah Makna Dalam Anatomi Bahasa*, IRCISOD, Yogyakarta, 2002.
- , *Hermeneutika Ilmu Sosial, Kreasi Wacana*, Yagyakarta, 2008.
- Salim, Agus, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, 2006
- Sastromodjojo, Ali, *Tonggak-Tonggak Perjalanan Hidupku*, PT. Kinta, Jakarta, 1974
- Severin, Werner J & James W. Tankar, Jr, *Teori Komunikasi. Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa, edisi Kelima*, Kencana, Jakarta, 2008
- Sihombing, Frans Bona, *Ilmu Politik Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Jakartaq, 1986
- Sibarani, Robert, *Hakikat Bahasa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Sillars Harvey, Barbara, PERMESTA, *Pemberontakan Setengah Hati*, Grafiti Pers, Jakarta, 1989
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisa Semiotika, dan Analisa Framing*, PT. Rosda karya, Bandung, 2001.
- , *Semiotika Komunikasi*, PT. Rosda Karya, Bandung, 2003,
- Sutrisno, Mudji, *Hermeneutika Pascakolonial*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2008
- Sumaryono, E, *Hermeneutika: Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009

Sukarno, *Amanat Proklamasi I*, Inti Pers dan Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta, 1966

-----, *Amanat Proklamasi II*, Inti Pers dan Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta, 1966

-----, *Amanat Proklamasi III*, Inti Pers dan Yayasan Pendidikan Soekarno, Jakarta, 1966

-----, *Amanat Proklamasi IV 1961-1966*, Inti Pers dan Yayasan Pendidikan Sukarno, Jakarta, 1986

-----, *Dibawah Bendera Revolusi I (DBR I)*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964

-----, *Dibawah Bendera Revolusi II (DBR II)*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964

-----, *Pancasila Dasar Negara*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1986

-----, *Pancasila Perdamaian Dunia*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1986

-----, *Indonesia Menggugat*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1985

-----, *Sarinah*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1985

-----, *Mencapai Indonesia Merdeka*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1985

-----, *Bung Karno Dan Islam*, CV. Haji Massagung-YPs, Jakarta, 1990

-----, *Ilmu Dan Perjuangan*, Inti Idayu Press & YPS, Jakarta, 1986

-----, *Bung Karno Dan Pemuda*, Haji Massagung-YPs, Jakarta, 1987

-----, *Bung Karno Dan ABRI*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1989

Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenanda Media Group, Jakarta, 2008

Wertheim, Wim F, *Jalan Sosialisme Dunia Ketiga*, ISAI, Jakarta, 2008

Wuryandari, Genewati, *Politik Luar Negeri Indoensia Di Tengah Pusaran Politik Domestik*, P2P-LIPI, 2008

Widjojo, Muridjan S & Mashudi Noersalim, *Bahasa Negara Versus Bahasa Gerakan Mahasiswa, Kajian Semiotik Atas Teks Pidato Presiden Soeharto dan Selebaran Gerakan Mahasiswa*, LIPI Press, Jakarta 2004

Yusuf, Sufri, *Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Zuhri, Saefudin, *Berangkat Dari Pesantren*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1987

Jurnal /Makalah

- Acep Iwan Saidi, *Hermeneutika, Sebuah Cara Untuk Memahami Teks*, Jurnal Sosioteknologi, edisi 13, 2008
- David Ransom, *Mafia Berkeley Pembunuhan Massal di Indonesia*, Koalisi Anti Utang, Jakarta, 2006
- Maria Astuti, *Makna Dan nilai Terkandung Dalam Teks Legenda Dayak Ngaju*, Jurnal Liguistika, 2008.
- -----, *Pemakuan Terhadap persetubuhan Kunthi*, 1996

Media On line

<http://cmip.library.cornell.edu/c/cmip/browse.html>

<http://LITGUIDE.Press.JHM.EDU>

<http://Plato.Stanford.Edu>

<http://teori2hi.multiply.com/journal/item/5>

<http://suicunesoul.blogspot.com/2008/12/teori-teori-dalam-hubungan.html>

<http://solindo.wordpress.com/2008/04/20/oldefo-vs-nefo/>

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ari Sulistyanto
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, tgl. Lahir : Semarang, 3 Juni 1970
Agama : Islam
Alamat : Bogor Country Estate Blok FM: 4, No.5
Jl. Soleh Iskandar, Bogor
Alamat Kantor : - Universitas Bung Karno
Jl. Kimia No.20 Jakarta Pusat
- Perhimpunan Persahabatan Indonesia China (PPICH)
Jl. Cempaka Putih Timur Raya, No.45 Jakarta Pusat

Riwayat Pendidikan

1. SMA Negeri 5 Surakarta tamat tahun 1989
2. Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, FISIP, Program Studi ; Komunikasi Massa tamat tahun 1995
3. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, Program Studi Ilmu Komunikasi tahun 2008

Riwayat Pekerjaan

1. PT. INDOMILK Jakarta, Tahun 1996 -1999
2. Universitas Bung Karno tahun 1999- sampai sekarang
2. Pengurus Perhimpunan Persahabatan Indonesia China tahun 1999 sampai sekarang.